



# **LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH  
2023**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.1.1 Penjelasan Umum .....	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah .....	19
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal ...	47
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .....	53
2.1 Capaian Kinerja Makro .....	53
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan .....	53
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran .....	53
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil .....	90
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan .....	96
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah .....	98
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANGUNAN .....	171
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	172
4.1 Urusan Pendidikan .....	172
4.2 Urusan Kesehatan .....	175
4.3 Urusan Pekerjaan Umum .....	181
4.4 Urusan Perumahan Rakyat.....	183
4.5 urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	185
4.6 Urusan Sosial .....	189
4.6 Program dan Kegiatan .....	192
BAB V PENUTUP .....	198
LAMPIRAN.LAMPIRAN	

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan petunjuknya, sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 ini dapat terselesaikan.

Dalam rangka melaksanakan kewajiban Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab, maka Kepala Daerah wajib menyampaikan LPPD kepada Pemerintah melalui Gubernur.

LPPD merupakan laporan hasil kinerja Kepala Daerah yang disajikan secara transparan dan terukur, yang dituangkan dalam data capaian indikator kinerja makro, indikator kinerja *Outcome* dan indikator kinerja *Output*. Data capaian kinerja dalam LPPD tersebut menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kudus meliputi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan Pelayanan Dasar, Urusan Wajib tidak berkaitan Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan. Selanjutnya dokumen LPPD akan menjadi bahan evaluasi oleh Pemerintah dalam upaya perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kudus pada masa mendatang.

Selanjutnya disampaikan permohonan maaf atas kekurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun lalu, walaupun Pemerintah Kabupaten Kudus telah berupaya seoptimal mungkin dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Kudus akan berkomitmen dan terus berbenah diri untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan Visi Kabupaten Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera

Kudus, Maret 2023

BUPATI KUDUS



Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Kudus Tahun 2022, yang juga merupakan implementasi RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 tahun keempat ini, merupakan wujud pemenuhan kewajiban konstitusional Bupati Kudus kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan pasal 69 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2022, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005–2025, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2022, serta Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2022.

#### 1.1.1. Penjelasan Umum

##### a. Undang-undang pembentukan daerah;

Dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

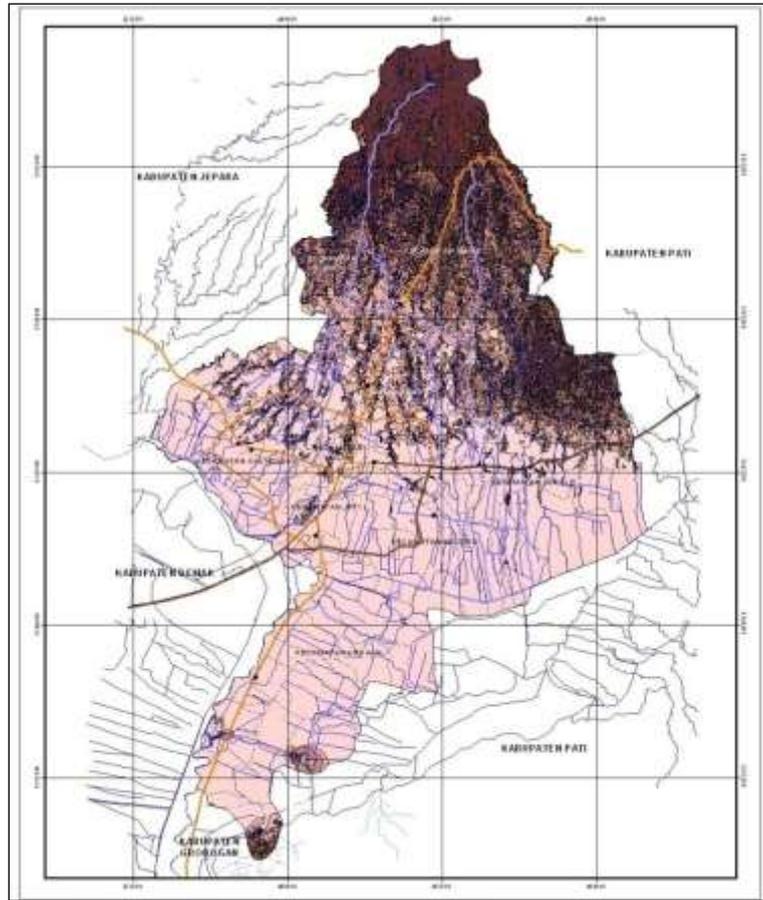
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578));
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus.

b. Data geografis wilayah;

Tanah di Kabupaten Kudus memiliki beragam kemiringan, mulai dari 0 sampai 40°, berdasarkan tingkat kemiringan di Kabupaten Kudus, kecamatan yang memiliki wilayah pada kemiringan yang beragam adalah Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe. Seluas 6139,51 Ha wilayah Kecamatan Jekulo berada pada kemiringan (0-2)°, 1115,1 Ha luas berada pada kemiringan (3-15)°, kemudian 176,35 Ha berada pada kemiringan (16-40)° serta 860,72 Ha yang berada pada tingkat kemiringan yang sangat curam. Sedangkan untuk Kecamatan Kaliwungu, Kota Kudus, Jati, serta Mejobo terletak pada kemiringan datar atau (0-2)°.



Sumber : RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032

Gambar 1.1 Peta Kelerengan Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus dapat dibagi menjadi 4 zona kerentanan gerakan tanah, yaitu sebagai berikut :

- a) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah  
Daerah ini mempunyai tingkat kerentanan sangat rendah untuk terjadinya gerakan tanah, sehingga sangat jarang atau tidak pernah terjadi adanya gerakan tanah. Pada zona ini mempunyai tebal tanah berkisar dari 0,5 – 4 m. Terdapat pada daerah datar sampai sedikit landai dengan kemiringan lereng 0-5% sampai dengan < 15%, wilayahnya meliputi Kecamatan Undaan, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe dan Kecamatan Jekulo. Batuan terdiri dari endapan alluvial dan sebagian tuf, tuf pasir dari Formasi Tuf Muria. Lahan umumnya digunakan sebagai permukiman, sawah, pasar, tambak dan perkantoran.
- b) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah  
Daerah ini mempunyai tingkat kerentanan rendah untuk terjadinya gerakan tanah, sehingga jarang terjadi adanya gerakan tanah. Bahkan bila kondisi kelerengan diganggu tidak akan membentuk gerakan

tanah, karena tanah di daerah ini umumnya telah teguh. Gerakan tanah yang terjadi di jumpai di lereng-lereng sungai karena adanya gerusan aliran sungai. Kabupaten Kudus mempunyai tebal tanah berkisar 0,3-5 m. Terdapat pada daerah datar sampai terjal, lereng umumnya berkisar antara 5% sampai dengan 15%, di lembah sungai bagian atas kadar lereng sampai > 50%, wilayahnya meliputi sebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe sebelah selatan, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Mejobo. Batuan terdiri dari tuf, tuf pasiran kadang dari Formasi Tuf Muria. Lahan umumnya digunakan sebagai hutan sejenis, sawah, tegalan dan permukiman.

c) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah

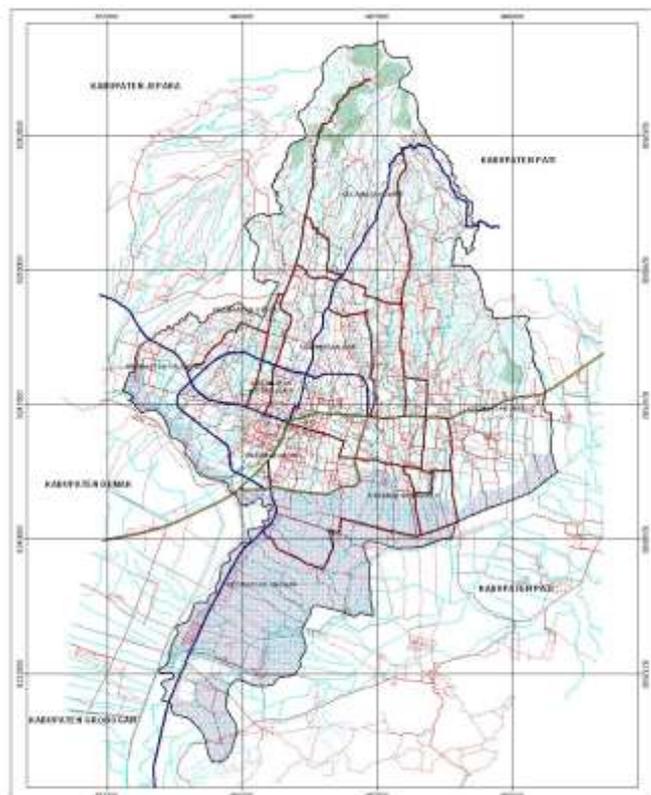
Daerah ini mempunyai tingkat kerentanan menengah untuk terjadinya gerakan tanah, sehingga kadang-kadang terjadi adanya gerakan tanah, bila kondisi kelerengan diganggu. Karena tanah di daerah ini umumnya sebagian masih merupakan tanah lepas-lepas yang menumpang di batuan dasarnya. Gerakan tanah dijumpai di lereng-lereng yang terjal dan mengarah ke lembah sungai. Penyebab gerakan tanah di zona ini umumnya disebabkan oleh kondisi tanah yang belum teguh dan gerusan air sungai yang membentuk tebing terjal dan kelerengan tinggi. Tebal tanah berkisar antara 0,5-10 m. Terdapat pada daerah bergelombang sampai terjal, lereng umumnya berkisar antara 30-50% sampai dengan >70%, di lembah sungai, wilayahnya meliputi daerah Gunung Pati Ayam sebelah utara dan Kecamatan Gebog. Batuan terdiri dari tuf, tuf pasiran, breksi andesit dari Formasi Tuf Muria, lava dari Formasi Lava Muria dan Batupasir-Gamping dari Formasi Patiayam. Lahan umumnya digunakan sebagai hutan sejenis, hutan heterogen dan pemukiman.

d) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi

Daerah ini mempunyai tingkat kerentanan tinggi untuk terjadinya gerakan tanah, sehingga sering terjadi adanya gerakan tanah. Gerakan tanah lama maupun baru akan sering terjadi. Faktor penyebab gerakan tanah di daerah ini karena kondisi tanah lapuk yang menumpang di batuan segar, kelerengan terjal dan sebagian terjadi karena adanya penggundulan hutan. Tebal tanah berkisar 0,3 ->5m.

Terdapat pada daerah bergelombang sampai terjal, lereng umumnya berkisar antar 50-70% sampai dengan >70%, di lembah sungai, wilayahnya meliputi Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe dan puncak Muria bagian selatan. Batuan terdiri dari tuf, tuf pasir, breksi andesit dan lava dari Formasi Lava Muria, batupasir dari Formasi Pati Ayam. Lahan umumnya digunakan sebagai tegalan, hutan heterogen.

Wilayah Kabupaten Kudus pada bagian utara merupakan wilayah dengan kemiringan 20% hingga lebih dari 45% yang didominasi jenis tanah latosol dan grumosol yang rawan longsor. Sedangkan wilayah bagian selatan relatif lebih datar, yang disusun oleh tanah alluvial yang bermanfaat bagi pertanian. Dengan kondisi ini menjadikan bagian selatan Kabupaten Kudus sebagai sentra pertanian yang subur. Wilayah pertanian ini rata-rata berada pada daerah cekungan yang merupakan pertemuan lembah Pegunungan Muria, Pegunungan Patiayam, dan Pegunungan Kendeng Utara, sehingga membuat daerah ini rawan terhadap bencana banjir. Wilayah Kabupaten Kudus yang rawan bencana banjir dan longsor seperti terlihat pada Gambar 1.2.



Sumber : RTRW Kabupaten Kudus 2012-2032

Gambar 1.2. Peta Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Kudus

c. Jumlah penduduk;

Gambaran umum demografis meliputi gambaran tentang jumlah penduduk, rasio ketergantungan, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, lapangan usaha dan tingkat pendidikan.

Tabel 1.1  
Banyaknya Penduduk menurut Jenis Kelamin  
di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

Tahun	Laki – laki		Perempuan		Total
	Orang	%	Orang	%	
2018	419.212	49.23	432.266	50,77	851.478
2019	428.161	49.78	431.894	50,22	860.055
2020	432.754	49.97	433.215	50.03	865.969
2021	433.374	49,97	433.831	50,03	867.205
2022	433.802	49,97	434.277	50,03	868.079

Diolah dari : DKB semester 2 tahun 2022 (Dinas Dukcapil)

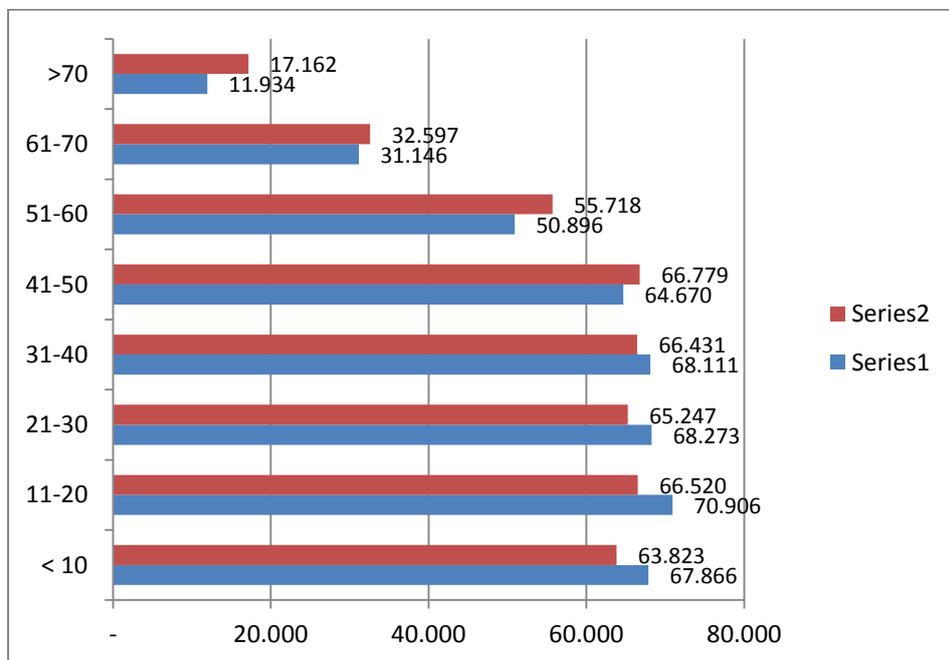
Komposisi penduduk laki-laki di Kabupaten Kudus pada tahun 2021 sebanyak 433.374 orang atau 49,97% dan perempuan sebanyak 433.831 atau sekitar 50,03%. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah penduduk sebanyak 868.079 orang dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 433.802 orang atau sekitar 49,97% dan perempuan sebanyak 434.277 orang atau 50,03%. Kondisi ini menunjukkan perkembangan jumlah penduduk perempuan meningkat lebih banyak dibanding laki-laki.

Tabel 1.2  
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis  
Kelamin Kabupaten Kudus Tahun 2022

Kelompok Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
≤ 10	67.866	63.823	131.689
11-20	70.906	66.520	137.426
21-30	68.273	65.247	133.520
31-40	68.111	66.431	134.542
41-50	64.670	66.779	131.449
51-60	50.896	55.718	106.614
61-70	31.146	32.597	63.743
> 70	11.934	17.162	29.096
Jumlah	433.802	434.277	868.079

Diolah dari : DKB Semester 2 Tahun 2022 (Dinas Dukcapil)

Sedangkan komposisi penduduk menurut kelompok usia di Kabupaten Kudus pada Tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada usia yang lebih muda lebih besar daripada kelompok usia lebih tua, hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk masih positif, dan menjadi bonus demografi bagi ketersediaan tenaga kerja. Dalam bentuk piramida, kondisi tersebut masih normal, sedangkan bentuk piramida terbalik mengindikasikan terjadinya pola *Aging Population* pada suatu daerah yang dapat berdampak pada *Dependency Ratio* (Angka Ketergantungan). Di Kabupaten Kudus pola piramida masih normal sehingga Angka Ketergantungan masih cukup baik dan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di Kabupaten Kudus.



Grafik 1.1.  
Jumlah Penduduk Per-usia Perjenis Kelamin Kabupaten Kudus Tahun 2022

Pada grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada kelompok usia lebih muda khususnya pada rentang usia 11-20 tahun masih lebih besar dari kelompok usia yang lain dengan Jumlah penduduk sebesar 137.426 jiwa terdiri perempuan 66.520 dan laki-laki 70.906 sedangkan kelompok usia tertinggi kedua ada pada rentang usia 31-40 tahun sebesar 134.542 jiwa terdiri dari perempuan 66.431 dan laki-laki 68.111.

Tabel 1.3  
Komposisi Penduduk menurut *Dependensi Rasio*  
di Kabupaten Kudus Tahun 2022

Tahun	0-14	15-64	>65	Jumlah	Rasio Ketergantungan
2018	197.987	603.611	49.880	851.478	41,07
2019	190.002	620.486	62.181	860.055	40,65
2020	201.581	613.933	50.455	865.969	41,05
2021	201.884	613.489	51.832	867.205	41,36
2022	189.271	618.301	60.507	868.079	40,40

*Diolah dari : DKB semester 2 tahun 2022 (Dinas Dukcapil)*

Pembagian penduduk menurut kelompok umur merupakan potret struktur penduduk setempat yang menggambarkan potensi penduduk produktif dan rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Rasio ketergantungan merupakan rasio antara kelompok penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap penduduk kelompok penduduk usia produktif (usia 15-65 tahun). Rasio Ketergantungan Kabupaten Kudus pada tahun 2022 sebesar 40,40.

Keberhasilan pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir dan budaya masyarakat terhadap minat dan apresiasi pendidikan. Animo masyarakat untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi yang makin luas terlihat pada jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana tertera dalam rincian tabel 1.4.

Tabel 1.4  
Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan  
Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

Tingkat pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
Tidak/Belum Sekolah	178.808	207.199	215.520	225.946	235.344
Tidak/Belum Tamat SD	65.291	63.716	64.338	62.373	59.661
Tamat SD/ sederajat	255.704	245.652	236.051	229.125	219.953
Tamat SLTP/ sederajat	144.251	144.957	146.140	144.005	140.876
Tamat SLTA/ sederajat	150.853	154.220	157.367	157.921	161.995
Akademi / Sarjana	40.411	44.311	46.553	47.835	50.250
Jumlah Penduduk	835.318	860.055	865.969	867.205	868.079

*Sumber : DKB semester 2 Tahun 2022 (Dinas Dukcapil)*

Berdasarkan Tabel 1.4. di atas, terlihat bahwa jenjang pendidikan yang paling banyak di Kabupaten Kudus pada tahun 2022 adalah pada jenjang Tidak/Belum Tamat SD yaitu 235.344 penduduk. Jumlah penduduk yang lulus SLTA/Sederajat lebih banyak daripada penduduk yang lulus SLTP/Sederajat, Diploma maupun Strata. Banyaknya jumlah lulusan SLTA/Sederajat tersebut menggambarkan berhasilnya pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kabupaten Kudus. Pada tahun 2022 jumlah penduduk yang berpendidikan Akademi/Sarjana mengalami peningkatan 2.415 orang atau naik 5,05 % dibandingkan tahun 2021.

d. Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan;

Kabupaten Kudus terdiri dari 9 kecamatan yang terbagi 123 desa dan 9 kelurahan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 1.5  
Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	
1	Kec. Kaliwungu	1	Desa Bakalan Krapyak
		2	Desa Prambatan Kidul
		3	Desa Prambatan Lor
		4	Desa Garung Kidul
		5	Desa Setrokalangan
		6	Desa Banget
		7	Desa Blimbing Kidul
		8	Desa Sidorekso
		9	Desa Gamong
		10	Desa Kedungdowo
		11	Desa Garung Lor
		12	Desa Karangampel
		13	Desa Mijen
		14	Desa Kaliwungu
		15	Desa Papringan
2	KOTA	16	Kelurahan Purwosari
		17	Desa Janggalan
		18	Desa Demangan
		19	Kelurahan Sunggingan
		20	Kelurahan Panjunan
		21	Kelurahan Wergu Kulon
		22	Kelurahan Wergu Wetan

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan
		23 Kelurahan Mlati Kidul
		24 Kelurahan Mlatinorowito
		25 Desa Mlati Lor
		26 Desa Nganguk
		27 Desa Kramat
		28 Desa Demaan
		29 Desa Langgardalem
		30 Desa Kauman
		31 Desa Damaran
		32 Kelurahan Kerjasan
		33 Kelurahan Kajeksan
		34 Desa Krandon
		35 Desa Singocandi
		36 Desa Glantengan
		37 Desa Kaliputu
		38 Desa Barongan
		39 Desa Burikan
		40 Desa Rendeng
3	Kec. Jati	41 Desa Jetiskapuan
		42 Desa Tanjungkarang
		43 Desa Jati Wetan
		44 Desa Pasuruhan Kidul
		45 Desa Pasuruhan Lor
		46 Desa Ploso
		47 Desa Jati Kulon
		48 Desa Getaspejaten
		49 Desa Loram Kulon
		50 Desa Loram Wetan
		51 Desa Jepangakis
		52 Desa Megawon
		53 Desa Ngembal Kulon
		54 Desa Tumpangkrasak
4	Kec. Undaan	55 Desa Wonosoco
		56 Desa Lambangan
		57 Desa Kalirejo
		58 Desa Medini
		59 Desa Sambung
		60 Desa Glagahwaru
		61 Desa Kutuk
		62 Desa Undaan Kidul
		63 Desa Undaan Tengah

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	
		64	Desa Karangrowo
		65	Desa Larikrejo
		66	Desa Undaan Lor
		67	Desa Wates
		68	Desa Ngemplak
		69	Desa Terangmas
		70	Desa Berugenjang
5	Kec. Mejobo	71	Desa Gulang
		72	Desa Jepang
		73	Desa Payaman
		74	Desa Kirig
		75	Desa Temulus
		76	Desa Kesambi
		77	Desa Jojo
		78	Desa Hadiwarno
		79	Desa Mejobo
		80	Desa Golantepus
		81	Desa Tenggeles
6	Kec. Jekulo	82	Desa Sadang
		83	Ds. Bulungcangkring
		84	Desa Bulung Kulon
		85	Desa Sidomulyo
		86	Desa Gondoharum
		87	Desa Terban
		88	Desa Pladen
		89	Desa Klaling
		90	Desa Jekulo
		91	Desa Hadipolo
		92	Desa Honggosoco
		93	Desa Tanjungrejo
7	Kec. Bae	94	Desa Dersalam
		95	Desa Ngembalrejo
		96	Desa Karangbener
		97	Desa Gondangmanis
		98	Desa Pedawang
		99	Desa Bacin
		100	Desa Panjang
		101	Desa Peganjaran
		102	Desa Purworejo
		103	Desa Bae

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	
8	Kec. Gebog	104	Desa Gribig
		105	Desa Klumpit
		106	Desa Getasrabi
		107	Desa Padurenan
		108	Desa Karangmalang
		109	Desa Besito
		110	Desa Jurang
		111	Desa Gondosari
		112	Desa Kedungsari
		113	Desa Menawan
		114	Desa Rahtawu
9	Kec. Dawe	115	Desa Samirejo
		116	Desa Cendono
		117	Desa Margorejo
		118	Desa Rejosari
		119	Desa Kandangmas
		120	Desa Glagah Kulon
		121	Desa Tergo
		122	Desa Cranggung
		123	Desa Lau
		124	Desa Piji
		125	Desa Puyoh
		126	Desa Soco
		127	Desa Ternadi
		128	Desa Kajar
		129	Desa Kuwukan
		130	Desa Dukuhwaringi
		131	Desa Japan
		132	Desa Colo

e. Jumlah perangkat daerah, dan pegawai pemerintah;

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus dengan :

- Peraturan Bupati Kudus Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus;

- Peraturan Bupati Kudus Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat DAerah Kabupaten Kudus;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus;

- Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kudus;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Kelas B;

- Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus.

Rincian jumlah perangkat daerah, unit kerja dan jumlah pegawai per unit kerja sebagaimana tabel 1.6.

Tabel 1.6  
Jumlah Perangkat Daerah, unit kerja dan pegawai

NO	OPD	JUMLAH PEGAWAI
1	SEKRETARIAT DAERAH	137
2	SEKRETARIAT DPRD	26
3	BAPPEDA	33
4	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	72
5	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	42
6	INSPEKTORAT DAERAH	45
7	DINAS SOSIAL, PPPA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	35
8	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	147
9	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	45
10	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	91
11	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	87
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	25
13	DINAS PERDAGANGAN	117
14	SATPOL PP	49
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	22
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	26
17	DINAS PERHUBUNGAN	74
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	23
19	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	42
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	27
21	KEC KOTA	98
22	KEC JEKULO	21

<b>NO</b>	<b>OPD</b>	<b>JUMLAH PEGAWAI</b>
23	KEC GEBOG	19
24	KEC DAWE	25
25	KEC KALIWUNGU	19
26	KEC JATI	19
27	KEC UNDAAN	19
28	KEC MEJOBLO	20
29	KEC BAE	17
30	BPBD	20
31	BADAN KESBANGPOL	20
32	DINAS KESEHATAN	731
33	RSUD	488
34	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	3.805
<b>JUMLAH</b>		<b>6.486</b>

f. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah

Sedangkan anggaran dan realisasi dapat dilihat sebagaimana tabel 1.7. berikut ini.

Tabel 1.7  
Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.039.641.707.439</b>	<b>2.072.666.999.383</b>	<b>101,62</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>405.622.452.000</b>	<b>412.612.343.109</b>	<b>101,72</b>
Pendapatan Pajak Daerah	157.040.386.000	167.448.269.394	106,63
Hasil Retribusi Daerah	29.460.617.000	24.105.792.404	81,82
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.688.534.000	9.459.247.784	88,50
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	208.432.915.000	211.599.033.527	101,52
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.629.519.255.439</b>	<b>1.658.338.656.274</b>	<b>101,77</b>
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.476.316.558.439</b>	<b>1.477.044.543.502</b>	<b>100,05</b>
Dana Bagi Hasil	254.419.178.000	279.196.280.839	109,74
Dana Alokasi Umum	747.504.503.000	741.118.818.488	99,15
Dana Alokasi Khusus	312.306.843.439	294.643.410.175	94,34
Dana Insentif Daerah	15.963.044.000	15.963.044.000	100,00
Dana Desa yang bersumber dari APBN	146.122.990.000	146.122.990.000	100,00
<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>153.202.697.000</b>	<b>181.294.112.772</b>	<b>118,34</b>
Bagi Hasil Pajak Provinsi	143.549.697.000	171.893.652.772	119,75
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	9.653.000.000	9.400.460.000	97,38
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>4.500.000.000</b>	<b>1.716.000.000</b>	<b>38,13</b>
Pendapatan Hibah	4.500.000.000	1.716.000.000	38,13
Pendapatan Hibah dari pemerintah Pusat	4.500.000.000	1.716.000.000	38,13

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
<b>BELANJA</b>	<b>2.580.511.409.364</b>	<b>2.223.830.622.851</b>	<b>86,18</b>
Belanja Operasi	1.837.039.734.684	1.567.978.190.976	85,35
Belanja Modal	456.116.596.645	379.328.767.594	83,16
Belanja Tak Terduga	18.665.058.035	7.934.031.867	42,51
Belanja Transfer	268.690.020.000	268.589.632.414	99,96
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>546.563.701.925</b>	<b>546.563.701.925</b>	<b>100,00</b>
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	546.563.701.925	546.563.701.925	100,00
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>5.694.000.000</b>	<b>2.910.000.000</b>	<b>51,11</b>
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.694.000.000	2.910.000.000	51,11
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>540.869.701.925</b>	<b>543.653.701.925</b>	<b>100,51</b>

Sumber : BPPKAD

Tabel 1.8  
Realisasi Belanja per Urusan

NO	URUSAN	ANGGARAN DAN REALISASI		
		Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	%
<b>A</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	<b>1.633.337.836.152</b>	<b>1.408.371.044.550</b>	<b>86,23</b>
1.	Pendidikan	686.156.197.082	593.880.776.019	86,55
2.	Kesehatan	664.583.115.740	546.077.477.334	82,17
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	102.274.637.313	96.908.401.244	94,75
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	63.371.898.184	60.184.902.690	94,97
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	15.235.898.602	13.792.607.961	90,53
6.	Sosial	101.716.089.231	97.526.879.302	95,88
<b>B</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	<b>187.869.849.196</b>	<b>163.150.001.599</b>	<b>86,84</b>
7.	Tenaga Kerja	27.316.046.685	18.147.958.277	66,44
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.011.273.226	778.988.340	77,03
9.	Pangan	3.553.541.350	3.531.221.075	99,37
10.	Pertanahan	425.000.000	276.405.840	65,04
11.	Lingkungan Hidup	11.920.443.871	11.370.421.388	95,39
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.686.632.973	9.040.240.225	93,33
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11.672.108.082	9.921.256.960	85,00
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.494.332.800	3.292.921.875	38,77
15.	Perhubungan	23.203.492.982	21.808.665.640	93,99
16.	Komunikasi & Informatika	35.780.188.171	34.413.667.525	96,18
17.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	4.152.764.860	3.415.999.100	82,26

NO	URUSAN		ANGGARAN DAN REALISASI		
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	%
18.	Penanaman Modal		12.314.831.621	10.550.337.867	85,67
19.	Kepemudaan dan Olahraga		16.663.951.329	16.356.608.050	98,16
20.	Statistik		67.382.600	57.289.080	85,02
21.	Persandian		111.596.660	46.630.579	41,78
22.	Kebudayaan		15.857.174.956	14.967.000.712	94,39
23.	Perpustakaan		30.950.000	30.829.000	99,61
24.	Kearsipan		5.608.137.030	5.143.560.066	91,72
<b>C</b>	<b>Urusan Pilihan</b>		<b>125.114.206.109</b>	<b>67.235.169.469</b>	<b>53,74</b>
25.	Kelautan dan Perikanan		564.799.404	545.682.820	96,62
26.	Pariwisata		5.540.248.219	5.085.652.012	91,79
27.	Pertanian		26.863.067.097	25.193.795.354	93,79
28.	Kehutanan		7.000.000	6.720.115	96,00
29.	Energi dan Sumber Daya Mineral		1.950.000	1.950.000	100,00
30.	Perdagangan		36.159.245.957	28.098.442.775	77,71
31.	Perindustrian		55.972.895.432	8.297.926.393	14,82
32.	Transmigrasi		5.000.000	5.000.000	100,00
<b>D</b>	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>		<b>634.189.517.907</b>	<b>585.074.407.233</b>	<b>92,26</b>
33.	Administrasi Pemerintahan		120.264.291.057	113.581.042.337	94,44
34.	Pengawasan		10.176.789.954	9.417.472.848	92,54
35.	Perencanaan		11.203.947.531	10.363.684.330	92,50
36.	Keuangan		315.451.114.941	301.086.629.324	95,45
37.	Kepegawaian		11.614.182.379	10.197.561.614	87,80
38.	Pendidikan dan Pelatihan		1.240.087.340	849.631.620	68,51
39.	Penelitian dan Pengembangan		335.670.000	321.293.673	95,72
40.	Sekretariat DPRD		97.155.331.604	75.482.332.424	77,69
41.	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan		59.707.909.020	57.077.186.102	95,59
42.	Kesatuan Bangsa dan Politik		7.040.194.081	6.697.572.961	95,13
	<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>2.580.511.409.364</b>	<b>2.223.830.622.851</b>	<b>86,18</b>

Sumber : BPPKAD

### 1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

#### a. Permasalahan strategis pemerintahan daerah yaitu;

##### 1. Kualitas dan daya saing sumberdaya manusia.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia diukur dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sampai dengan tahun 2022, IPM di Kabupaten Kudus sebesar 75,89 dan masuk kategori tinggi. Namun demikian, angka tersebut masih perlu ditingkatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan menjawab tantangan perubahan. Kondisi lain yang ditunjukkan dari rata-rata lama sekolah di

Kabupaten Kudus tahun 2022 sebesar 9,06 dan harapan lama sekolah tahun 2022 sebesar 13,25. Angka tersebut menunjukkan bahwa harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah masih perlu didorong pada tahun 2022. Berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan usaha yang lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia. Beberapa hal yang menjadi isu strategis dan masih harus dioptimalkan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia antara lain :

- Pendidikan

Kualitas penyelenggaraan pendidikan selain didukung oleh sarana prasarana dan kurikulum, salah satu faktor yang sangat menentukan adalah kualitas tenaga pendidik. Tenaga pendidik memegang peranan yang paling menentukan dalam peningkatan penyelenggaraan pendidikan. Dengan semakin majunya teknologi terutama di bidang informatika, robotika, penemuan dan inovasi di segala bidang, dibutuhkan tenaga pendidik yang mampu menjawab tantangan jaman, disamping pengembangan karakter dan penanaman rasa cinta tanah air pada seluruh siswa di semua tingkatan. Tantangan ini semakin berat dengan banyaknya pengaruh buruk yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia antara lain semakin lemahnya pemahaman terhadap budaya bangsa, nilai-nilai “ke-Bhineka Tunggal Ika-an” dan nasionalisme, serta semakin tumbuhnya paham radikalisme dan terorisme yang bisa berdampak pada kondusifitas Kabupaten Kudus. Untuk itu, pola pikir dan pola pengajaran kepada siswa harus terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan jaman.

- Kesehatan

Permasalahan yang cukup serius di bidang kesehatan adalah angka kematian bayi pada tahun 2022 yaitu 6,75 per 1000 kelahiran hidup dan ibu melahirkan yang masih relatif tinggi yaitu 150,95 per 100.000 kelahiran hidup. Upaya untuk menurunkan angka

tersebut adalah dengan melakukan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dilakukan dengan mengedepankan peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kudus termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus. Pemulihan kesehatan masyarakat dengan adanya pandemi Covid-19 di tahun 2021 dengan tetap melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat.

## 2. Tata kelola pemerintahan

Siklus manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima. Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang prima. Ruang pengaduan masyarakat harus lebih semakin terbuka, guna meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan bagi masyarakat. Maka pengembangan teknologi menjadi hal cukup penting sebagai instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu pelayanan perizinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan juga harus semakin ditingkatkan.

Akuntabilitas kinerja pembangunan juga menjadi satu kriteria menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Akuntabilitas kinerja dibangun sejak proses perencanaan dan penganggaran, hingga implementasi. Dalam rangka mencapai target nilai A pada evaluasi SAKIP dimana kondisi pada tahun 2020 sebesar

68,93, maka Pemerintah Kabupaten Kudus perlu meningkatkan kinerja yang dimulai dari proses perencanaan dalam menentukan tujuan, sasaran, program, kegiatan pembangunan daerah, beserta indikator kinerjanya agar relevan, selaras, dan konsisten.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan ASN yang berkualitas dan profesional, serta kelembagaan yang optimal. Untuk itu, peningkatan kompetensi dan kualitas ASN menjadi kunci mutlak yang harus dilakukan, disertai penempatan ASN sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Demikian juga penguatan kelembagaan agar efektif dan efisien, mulai dari kelembagaan tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa.

3. Kehidupan yang tertib, aman dan nyaman.

Aspek kondusifitas wilayah menjadi prasyarat penting dan strategis dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan program-program pembangunan pada tahun 2021. Kehidupan yang toleran dan kondusif menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tertib yang dapat terwujud melalui kepastian, perlindungan dan penegakan peraturan.

Angka kriminalitas pada tahun 2021 sebesar 0,01 cenderung relative stabil dan turun dari tahun 2020 sebesar 0,02. Dalam rangka menjaga kondusifitas wilayah pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Kudus terus melaksanakan sinergitas dan kerjasama antar tingkat pemerintahan serta lintas sektor sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan yang damai, aman, dan toleran bagi seluruh elemen masyarakat. Penciptaan kondusifitas wilayah ini juga diharapkan mampu mewujudkan iklim sejuk untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, meningkatkan perlindungan bagi kebebasan sipil masyarakat, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis dari dimensi ketertiban sosial.

4. Daya saing ekonomi dan kesempatan berusaha.

Kebijakan pengembangan usaha yang berbasis kerakyatan melalui pemberdayaan Usaha

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, membuka kesempatan kerja yang luas, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui fasilitasi sarana dan prasarana usaha, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), permodalan, pelayanan perizinan yang mudah, penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif dan akses pemasaran serta peningkatan daya saing perlu dikembangkan secara berkesinambungan.

Penduduk miskin di Kabupaten Kudus mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 7,31% (64.2440 jiwa) pada tahun 2020 menjadi 7,60% (67.060 jiwa) pada tahun 2021. Diperlukan sebuah formula yang dapat menurunkan angka kemiskinan di Kudus pada tahun-tahun mendatang mendekati 5%. Angka kemiskinan dapat dipengaruhi oleh angka pengangguran yang memicu persoalan kependudukan lain, seperti kriminalitas dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Tingkat pengangguran di Kudus pada tahun 2021 sebesar 3,77 %.

5. Pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam

Isu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup menjadi isu yang penting baik secara global maupun nasional khususnya terkait dengan isu perubahan iklim. Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini seiring dengan isu pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGs*).

Berdasarkan potensi bencana (banjir, tanah longsor, angin putting beliung dan kebakaran) Kabupaten Kudus termasuk dalam kategori 13 kabupaten/kota termasuk kategori risiko bencana sedang di Jawa Tengah, namun demikian tetap diperlukan peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Kondisi

geografis Kabupaten Kudus yang memiliki gunung dan dataran rendah serta cuaca yang cenderung panas menyebabkan bencana alam seperti di atas akan terus terjadi. Karena itu, diperlukan usaha-usaha untuk siaga bencana dan meminimalisir akibat dari bencana alam yang terjadi. Pembangunan infrastruktur untuk mitigasi bencana harus dilakukan secara optimal dan terencana dengan baik. Selain pembangunan infrastruktur untuk mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur yang menjangkau ke seluruh wilayah perlu dilakukan guna menciptakan konektivitas antar wilayah dengan tujuan untuk memperkecil ketimpangan wilayah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat daya saing ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.

Penebangan hutan di kawasan mata air di Gunung Muria tidak hanya menyebabkan resiko tanah longsor dan banjir yang dapat melanda daerah-daerah di Kudus, tapi juga menyebabkan keringnya mata air di kawasan Gunung Muria, sehingga berimbas pada penurunan debit air sungai dan kekeringan di dataran rendah di wilayah Kudus. Peningkatan pencemaran lingkungan akibat limbah industri juga semakin banyak terjadi di wilayah Kudus. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah perkotaan mengalami pencemaran dan pendangkalan yang parah. Untuk itu diperlukan tindakan nyata untuk mengatasi permasalahan lingkungan tersebut, usaha-usaha mengatasi kerusakan lingkungan tersebut harus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama *stakeholders*, akademisi, serta peran aktif masyarakat.

b. Visi, Misi Bupati

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut : *Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera*

Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.
  2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.
  3. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.
  4. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing
- c. Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah;
- Program Pembangunan Daerah berdasarkan RPJMD Tahun 2018-2023 sesuai Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
- Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
    - 1) Pendidikan
      - a) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
      - b) Program pendidikan non formal.
    - 2) Kesehatan
      - a) Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
      - b) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
      - c) Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
      - d) Program Pelayanan Kesehatan BLUD
      - e) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
      - f) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
    - 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
      - a) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
      - b) Program Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
      - c) Program Pengembangan Infrastruktur di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
      - d) Program Perencanaan dan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang
      - e) Program Peningkatan sarana dan prasarana Kebinamargaan

- 4) Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman  
Program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
  - 5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
    - a) Program pembinaan kesatuan bangsa dan politik.
    - b) Program penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang trantibum.
    - c) Program penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
    - d) Program perlindungan masyarakat dan penanggulangan bahaya kebakaran.
  - 6) Sosial
    - a) Program pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial.
    - b) Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keluarga Miskin.
    - c) Program penanggulangan bencana daerah
- Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
- 1) Tenaga kerja
    - a) Program perluasan kesempatan kerja, penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja
    - b) Program pembinaan, perlindungan hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan.
  - 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  - 3) Pangan  
Program peningkatan ketahanan pangan.
  - 4) Pertanahan  
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan penyelesaian konflik pertanahan.
  - 5) Lingkungan Hidup
    - a) Program pengendalian dan konservasi lingkungan hidup.

- b) Program pembinaan, pengawasan dan pengembangan kapasitas Lingkungan Hidup.
  - c) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).
- 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- a) Program pelayanan pendaftaran penduduk
  - b) Program pelayanan pencatatan sipil
  - c) Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data
- 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a) Program peningkatan pemberdayaan masyarakat.
  - b) Program fasilitasi pemerintahan desa.
- 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Program Keluarga Berencana.
- 9) Perhubungan
- a) Program peningkatan manajemen pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan.
  - b) Program peningkatan keselamatan dan sarana prasarana LLAJ.
- 10) Komunikasi dan Informatika
- a) Program Pengelolaan Komunikasi dan Informasi publik.
  - b) Program pengembangan teknologi dan sistem informasi.
- 11) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Program peningkatan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
- 12) Penanaman Modal
- a) Program perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal.
  - b) Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
  - c) Program pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan.
  - d) Program pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha.
- 13) Kepemudaan dan Olah Raga
- a) Program kepemudaan.

- b) Program peningkatan kualitas dan sarana prasarana olahraga.
- 14) Statistik
  - Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah.
- 15) Persandian
  - Program pengelolaan persandian
- 16) Kebudayaan
  - Program pengembangan dan pengelolaan kekayaan budaya dan cagar budaya
- 17) Perpustakaan
  - Program peningkatan pelayanan dan sistem administrasi Perpustakaan.
- 18) Kearsipan
  - Program peningkatan pelayanan dan sistem administrasi kearsipan.
- Urusan Pilihan
  - 1) Kelautan dan Perikanan
    - Program pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan.
  - 2) Pariwisata
    - Program peningkatan dan pengembangan pariwisata.
  - 3) Pertanian
    - a) Program peningkatan produksi dan sarana prasarana pertanian/perkebunan
    - b) Program peningkatan produksi sarana prasarana peternakan.
  - 4) Kehutanan
    - Program pengelolaan taman hutan raya
  - 5) Energi dan sumber daya mineral
    - Program pelayanan perizinan pemanfaatan energy dan sumber daya mineral
  - 6) Perdagangan
    - a) Program fasilitasi perdagangan, promosi dan perlindungan konsumen
    - b) Program peningkatan pengelolaan pasar
    - c) Program Pembinaan PKL dan asongan
  - 7) Perindustrian
    - Program peningkatan dan pengembangan perindustrian

- 8) Transmigrasi  
Program fasilitasi dan pengembangan wilayah penempatan transmigrasi
- Fungsi penunjang urusan pemerintahan
  - 1) Administrasi Pemerintahan
    - a) Program fasilitasi tata pemerintahan
    - b) Program penataan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan penegakan HAM
    - c) Program peningkatan kesejahteraan rakyat
    - d) Program pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi.
    - e) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
    - f) Program peningkatan perekonomian daerah
    - g) Program pengelolaan Administrasi Pembangunan
    - h) Program Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
    - i) Program penyelenggaraan kehumasan
    - j) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
    - k) Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan
  - 2) Pengawasan
    - a) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
    - b) Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
  - 3) Perencanaan
    - a) Program perencanaan pembangunan daerah.
    - b) Program perencanaan pemerintahan dan sosial budaya
    - c) Program perencanaan prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam.
  - 4) Keuangan
    - a) Program peningkatan pendapatan daerah
    - b) Program fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah.

- c) Program penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah.
    - d) Program pengelolaan perbendaharaan daerah.
    - e) Program pengelolaan aset daerah.
  - 5) Kepegawaian
    - a) Program penyelenggaraan administrasi aparatur.
    - b) Program pembinaan pegawai dan dokumentasi aparatur.
  - 6) Penelitian dan Pengembangan
    - Program penelitian dan pengembangan daerah.
- d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.
  - Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
    - 1) Pendidikan
      - a) Program Pengelolaan Pendidikan, dilaksanakan:
        - 1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
        - 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
        - 3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
        - 4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
      - b) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan :  
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat
    - 2) Kesehatan
      - a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat :
        - 1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
        - 2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
        - 3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
        - 4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
      - b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan :

1. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota
  2. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM Di Wilayah Kab/ Kota
  3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumberdaya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah UKP Kab/ Kota
- c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman :
1. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Di Produksi oleh Industri Rumah Tangga
  2. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
  3. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Setra Makanan Jajanan
  4. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil
  5. Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
- d) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan:
1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/ Kota
  2. Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/ Kota
  3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kab/ Kota
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA):
1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya Dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum:  
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
  - c) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah  
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab/ Kota
  - d) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase  
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - e) Program Penataan Bangunan Gedung  
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
  - f) Program Penyelenggaraan Jalan  
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
  - g) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
    1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
    2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
    3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
    4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
- a) Program pengembangan perumahan
    1. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
    2. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
  - b) Program Kawasan Permukiman
    1. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha
    2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha

- c) Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)  
 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
- 5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
  - a) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
    - 1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
    - 3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
  - b) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
    - 1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - 2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
  - c) Program Penanggulangan Bencana
    - 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
    - 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
    - 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- 6) Sosial
  - a) Program Pemberdayaan Sosial  
 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
  - b) Program Rehabilitasi Sosial
    - 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial
    - 2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza Di Luar Panti Sosial
  - c) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial  
 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- d) Program Penanganan Bencana
    - 1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
    - 2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
  - e) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
- 1) Tenaga kerja
    - a) Program Perencanaan Tenaga Kerja Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
    - b) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
      - 1. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
      - 2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
      - 3. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - c) Program Penempatan Tenaga Kerja
      - 1. Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/ Kota
      - 2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
      - 3. Pelindungan PMI (PRA dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
      - 4. Penerbitan Perpanjangan Imta yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
    - d) Program Hubungan Industrial
      - 1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
      - 2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
  - 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    - a) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota
  2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- b) Program Perlindungan Perempuan
1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota
  2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota
- c) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak  
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
- d) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
  2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- e) Program Perlindungan Khusus Anak  
Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Pangan
- a) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  2. Persentase Ketersediaan Pangan Utama
- b) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kab/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi
- c) Program Penanganan Kerawanan Pangan  
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
- d) Program Pengawasan Keamanan Pangan  
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Pertanian
  - a) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan  
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - b) Program Penatagunaan Tanah  
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota
- 5) Lingkungan Hidup
  - a) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
    1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/ Kota
    2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
  - b) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup  
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
  - c) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)  
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/ Kota
  - d) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)  
Penyimpanan Sementara Limbah B3
  - e) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)  
Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- f) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat  
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/ Kota
  - g) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat  
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/ Kota
  - h) Program Pengelolaan Persampahan  
Pengelolaan Sampah
- 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- a) Program Pendaftaran Penduduk
    - 1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
    - 2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
  - b) Program Pencatatan Sipil
    - 1. Pelayanan Pencatatan Sipil
    - 2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
  - c) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
    - 1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
    - 2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a) Program Penataan Desa  
Penyelenggaraan Penataan Desa
  - b) Program Peningkatan Kerjasama Desa  
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa
  - c) Program Administrasi Pemerintahan Desa  
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
  - d) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat  
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - a) Program Pengendalian Penduduk
    1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
    2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/ Kota
  - b) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
    1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
    2. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
    3. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
  - c) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)  
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- 9) Perhubungan.
  - a) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
    1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
    2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
    3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
    4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
    5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
    6. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
    7. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/ Kota
    8. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/ Kota

10) Komunikasi dan Informatika

- a) Program Informasi dan Komunikasi Publik  
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik  
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b) Program Aplikasi Informatika
  - 1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - 2. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

11) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- a) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
  - 1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - 2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
  - 3. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
- b) Program Pengembangan UMKM  
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

12) Penanaman Modal

- a) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi
  - 1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - 2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab/ Kota
- b) Program Promosi Penanaman Modal  
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/ Kota
- c) Program Pelayanan Penanaman Modal  
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
- d) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal  
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/ Kota

- e) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal  
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kab/Kota
- 13) Kepemudaan dan Olah Raga
- a) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program kepemudaan
    - 1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kab/Kota
    - 2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab/Kota
  - b) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
    - 1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota
    - 2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota
    - 3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
    - 4. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi
- 14) Statistik
- a) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota
- 15) Persandian
- a) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
- 16) Kebudayaan
- a) Program Pengembangan Kebudayaan
    - 1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - 2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/Kota
    - 3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kab/Kota

- b) Program Pengembangan Kesenian Tradisional  
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat  
Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
  - c) Program Pembinaan Sejarah  
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu)  
Daerah Kab/Kota
  - d) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar  
Budaya
    - 1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kab/  
Kota
    - 2. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kab/  
Kota
  - e) Program Pengelolaan Permuseuman  
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
- 17) Perpustakaan
- a) Program Pembinaan Perpustakaan
    - 1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah  
Kabupaten/Kota
    - 2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat  
Daerah Kabupaten/Kota
- 18) Kearsipan
- a) Program Pengelolaan Arsip
    - 1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota
    - 2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota
    - 3. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi  
Kearsipan Nasional Tingkat Kab/Kota
  - b) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip  
Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih  
Media Kabupaten/Kota

➤ Urusan Pilihan

- 1) Kelautan dan Perikanan
  - a) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
    - 1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
    - 2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
  - b) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil  
Perikanan  
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil  
Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan  
Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
- 2) Pariwisata
  - a) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi  
Pariwisata

1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
  2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
  - b) Program Pemasaran Pariwisata
    - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
  - c) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
    - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
- 3) Pertanian
- a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
    1. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kab/Kota
    2. Pengembangan Prasarana Pertanian
    3. Pembangunan Prasarana Pertanian
  - b) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
    1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kab/Kota
    2. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kab/Kota
    3. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
  - c) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
    - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kab/Kota
  - d) Program Penyuluhan Pertanian
    - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
- 4) Kehutanan
- Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
    - Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kab/Kota

- 5) Energi dan Sumber Daya Mineral
  - a) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 6) Perdagangan
  - a) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
    1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
    2. Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
  - b) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
    1. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
    2. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
    3. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kab/Kota
  - c) Program Pengembangan Ekspor Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - d) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
  - e) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kab/Kota
- 7) Perindustrian
  - a) Program Hubungan Industrial
    1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota

2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota
- 8) Transmigrasi
- a) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- fungsi penunjang urusan pemerintahan
- 1) Pemerintahan Sekretariat Daerah
    - a) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
      1. Administrasi Tata Pemerintahan
      2. Fasilitasi Kerjasama Daerah
    - b) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
      1. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
      2. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
    - c) Program Perekonomian dan Pembangunan
      1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
      2. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
  - 2) Pemerintahan Sekretariat DPRD
    - a) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
      1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
      2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
      3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
      4. Peningkatan Kapasitas DPRD
      5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
      6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
      7. Fasilitasi Tugas DPRD
  - 3) Perencanaan
    - a) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
      1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
      2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
      3. Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- b) Program Koordinasi dan Sinkronisasi  
Perencanaan Pembangunan Daerah
  - 1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
  - 2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
  - 3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- 4) Keuangan
  - a) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
    - 1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
    - 2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
    - 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
    - 4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
  - b) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah  
Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - c) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah  
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 5) Kepegawaian
  - a) Program Kepegawaian Daerah
    - 1. Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN
    - 2. Mutasi dan Promosi ASN
    - 3. Pengembangan Kompetensi ASN
    - 4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- 6) Penelitian dan Pengembangan
  - a) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
    - 1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
    - 2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
    - 3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
    - 4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
- 7) Pengawasan
  - a) Program Penyelenggaraan Pengawasan
    - 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- 2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- b) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi
  - 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
  - 2. Pendampingan dan Asistensi
- 8) Kewilayahan
  - a) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik  
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
  - b) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - c) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum  
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - d) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
  - e) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- 9) Pemerintahan Umum
  - a) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan  
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
  - b) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
    - 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik

- c) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- d) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- e) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial  
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

### 1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

- a. Dasar pertimbangan penerapan standar pelayanan minimal

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Standar Pelayanan Minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah wajib menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan hak atas pelayanan dasar sesuai dengan jenis dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan perluasan kewenangan kepada pemerintah daerah, sehingga mampu berkreasi dan inovatif dalam menggali dan mengalokasikan potensi daerah yang bertujuan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Sesuai dengan kewenangannya, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib, yang terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 11 ayat (3) menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan

pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial.

Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2014 menyebutkan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Untuk mengkomodir pelaksanaan pemenuhan SPM di daerah, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang kemudian dipertegas oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diminta untuk menyusun target pencapaian SPM dan sekaligus merumuskan program dan kegiatan dalam rangka pemenuhannya sesuai dengan kondisi daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah, maka Pemerintah Kabupaten Kudus memacu pencapaian Standar Pelayanan Minimal dengan menyusun Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kudus.

Dengan adanya Peraturan Bupati tersebut, dimaksudkan untuk memudahkan Organisasi Perangkat Daerah dalam berkoordinasi dan konsolidasi internal guna penyelenggaraan pelayanan dasar yang mampu mencapai target Standar Pelayanan Minimal sebagaimana batas waktu yang ditetapkan secara nasional, dan bertujuan untuk memberikan landasan hukum kepada Organisasi Perangkat Daerah dalam pengintegrasian rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

Dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud di atas, juga diatur terkait pembentukan Tim Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kudus, sehingga diharapkan penyelenggaraan pemenuhan SPM di Kabupaten Kudus dapat dilaksanakan secara optimal dan terkoordinir berdasarkan data, statistik dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan baik yang bersifat khusus maupun umum.

b. Dasar penerapan standar pelayanan minimal

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dan landasan dalam penyelenggaraan penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintahan Kabupaten Kudus, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kudus.

c. Kebijakan umum

Standar Pelayanan Minimal memiliki tujuan yang sangat ideal dalam rangka memenuhi hak-hak warga negara atas pelayanan dasar pada urusan wajib pemerintah daerah. Namun demikian penyediaan pelayanan dasar dengan memperhatikan standar pelayanan mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kudus tidak semata-mata berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, melainkan bahwa hal tersebut merupakan pula wujud kebijakan visi dan misi Kepala Daerah sebagai top manager Pemerintah Kabupaten Kudus yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023.

Perlu dikemukakan bahwa dalam RPJMD Kabupaten Kudus tahun 2018-2023, telah ditetapkan indikator-indikator yang terkait dengan upaya peningkatan pelayanan dasar baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini membuktikan Pemerintah Kabupaten Kudus memiliki komitmen yang serius agar setiap warga dapat memperoleh jaminan kualitas dari hasil-hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 tahun.

Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam penerapan dan pencapaian pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal pada Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Kudus mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pelayanan dasar sebagai berikut :

- pemenuhan layanan dasar masyarakat pada bidang Pendidikan dialokasikan anggaran sebesar Rp.5.542.755.574,- dengan serapan realisasi mencapai 91,72%.
- pemenuhan layanan dasar masyarakat pada bidang kesehatan dialokasikan anggaran sebesar Rp.7.207.695.820,- dengan serapan realisasi mencapai 75,94%.
- pemenuhan layanan dasar masyarakat pada bidang Pekerjaan Umum dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.510.099.000,- dengan serapan realisasi mencapai 78,58%.

- pemenuhan layanan dasar masyarakat pada bidang Perumahan Rakyat dialokasikan anggaran sebesar Rp.53.700.000,- dengan serapan realisasi mencapai 100%.
- pemenuhan layanan dasar masyarakat pada bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dialokasikan anggaran sebesar Rp.4.082.4033.540,- dengan serapan realisasi mencapai 99,71%.
- pemenuhan layanan dasar masyarakat pada bidang Pendidikan dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.046.560.510,- dengan serapan realisasi mencapai 89,95%.

d. Arah Kebijakan Penerapan SPM

Pemerintah Kabupaten Kudus telah menuangkan rencana penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar kedalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan beberapa penyesuaian pada nomenklatur program dan kegiatan.

Langkah-langkah selanjutnya yang diperlukan untuk menegaskan komitmen untuk segera melaksanakan penerapan dan pencapaian SPM antara lain sebagai berikut :

- Mendorong Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tupoksi terkait dengan urusan wajib dan pilihan untuk segera melakukan penyusunan rencana penerapan dan pencapaian SPM dengan target tahunan yang disesuaikan dengan ketentuan tenggang tahun pencapaiannya ;
- Melakukan pengintegrasian Rencana Penerapan dan Pencapaian SPM pada masing-masing bidang ke dalam dokumen perencanaan dan kegiatan dengan melibatkan TAPD
- Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada urusan wajib yang menjadi prioritas disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kudus.

Rencana Arah Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Kudus sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 diprioritaskan sebagaimana tabel berikut:

TABEL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2018-2023

ARAH KEBIJAKAN				
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023
<p>Penguatan Pembangunan Berbasis Ekonomi Kerakyatan yang Kompetitif dan Berdaya Saing, dengan prioritas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan;</li> <li>2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan;</li> <li>3. Penguatan ekonomi kerakyatan;</li> <li>4. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran;</li> <li>5. Peningkatan kualitas infrastruktur;</li> <li>6. Penguatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.</li> </ol>	<p>Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertumbuhan ekonomi kreatif;</li> <li>2. Pengembangan jaringan perdagangan dan jasa;</li> <li>3. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran;</li> <li>4. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;</li> <li>5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.</li> </ol>	<p>Percepatan Pembangunan di Segala Bidang Berlandaskan Keunggulan Kompetitif, dengan prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas dan daya saing sumberdaya manusia;</li> <li>2. Tata Kelola Pemerintah;</li> <li>3. Kehidupan yang tertib, aman, nyaman;</li> <li>4. Daya Saing Ekonomi dan kesempatan berusaha;</li> <li>5. Pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan dan kelestarian sumber daya alam.</li> </ol>	<p>Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan didukung kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman, dengan prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kondusivitas, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan toleransi;</li> <li>2. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah;</li> <li>3. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;</li> <li>4. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran;</li> <li>5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.</li> </ol>	<p>Peningkatan Kesejahteraan didukung penguatan daya saing ekonomi dan masyarakat yang modern, religius dan cerdas, dengan prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran;</li> <li>2. Penguatan Daya Saing Daerah;</li> <li>3. Pemantapan ekonomi kreatif dan kerakyatan;</li> <li>4. Pengelolaan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;</li> <li>5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.</li> </ol>

**BAB II**  
**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian indikator makro sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1  
Capaian Indikator Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	75,16	75,89	0,97
2	Angka Kemiskinan	7,60	7,41	-2,5
3	Angka Pengangguran	3,77	3,21	-14,85
4	Pertumbuhan Ekonomi	-1,54	2,23	244,8
5	Pendapatan Per Kapita	127.550.000	133.880,000	4,96
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	20,55	-	

*Sumber data : BPS Kabupaten Kudus*

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Capaian kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari capaian indikator kinerja kunci keluaran, indikator kinerja kunci hasil dan indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan.

### 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
1	Pendidikan	Pendidikan PAUD				
		1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	392	Unit	Disdikpora
		2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Orang	Disdikpora
		3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	359	Orang	Disdikpora
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	1.733	Orang	Disdikpora
		5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	1.730	Orang	Disdikpora
		6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	1066	Orang	Disdikpora
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	342	Orang	Disdikpora
		Pendidikan Dasar				
		1	Jumlah SD Negeri Terakreditasi	420	Unit	Disdikpora
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Orang	Disdikpora
		3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Orang	Disdikpora
		4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	31.861	Orang	Disdikpora

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	10.982	Orang	Disdikpora
		6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	3.581	Orang	Disdikpora
		7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.539	Orang	Disdikpora
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3.374	Orang	Disdikpora
		9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.125	Orang	Disdikpora
		10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	848	Orang	Disdikpora
		11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	236	Orang	Disdikpora
		12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	803	Orang	Disdikpora
		13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	288	Orang	Disdikpora
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1700	Orang	Disdikpora
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	771	Orang	Disdikpora
		16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	386	Orang	Disdikpora

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	42	Orang	Disdikpora
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	346	Orang	Disdikpora
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	204	Orang	Disdikpora
Pendidikan Menengah Pertama						
		1	Jumlah SMP Negeri Terakreditasi	50	Unit	Disdikpora
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	47.562	Orang	Disdikpora
		3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	19.026	Orang	Disdikpora
		4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	31.861	Orang	Disdikpora
		5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	10.983	Orang	Disdikpora
		6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	3.581	Orang	Disdikpora
		7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.538	Orang	Disdikpora
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3.374	Orang	Disdikpora
		9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.398	Orang	Disdikpora

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	848	Orang	Disdikpora
		11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	236	Orang	Disdikpora
		12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	803	Orang	Disdikpora
		13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	347	Orang	Disdikpora
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1700	Orang	Disdikpora
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	771	Orang	Disdikpora
		16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	386	Orang	Disdikpora
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	38	Orang	Disdikpora
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	346	Orang	Disdikpora
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	282	Orang	Disdikpora

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		Pendidikan Kesetaraan				
		1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	12	Orang	Disdikpora
		2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Orang	Disdikpora
		3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	Orang	Disdikpora
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	223	Orang	Disdikpora
		5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	380	Orang	Disdikpora
		6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	201	Orang	Disdikpora
		7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	0	Orang	Disdikpora
		8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	16	Orang	Disdikpora
2	Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan				
		1	Jumlah RS Rujukan kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	16	Unit	Dinas Kesehatan
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi				
		1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	16	Unit	Dinas Kesehatan
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	15.066		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	1.205	Orang	Dinas Kesehatan

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	13.661		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan,persalinan sesuai standar	3.115	Orang	Dinas Kesehatan
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	13.600		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	3.115	Orang	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	68.108		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	3.083		Dinas Kesehatan
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	125.543		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	3.163	Orang	Dinas Kesehatan
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	576.104		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	3.163	Orang	Dinas Kesehatan
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	88.188		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	3.163	Orang	Dinas Kesehatan
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	231.173		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	3.163	Orang	Dinas Kesehatan
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	17.933		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	3.163	Orang	Dinas Kesehatan

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2.166		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	2.174	Orang	Dinas Kesehatan
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	10.995		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	2.358	Orang	Dinas Kesehatan
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	18.935		Dinas Kesehatan
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	3.222	Orang	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir				
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kota (ha)	638.880	Ha	Dinas PUPR
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kota (m)	17.702	M	Dinas PUPR
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kota (ha)	Nihil	Ha	Dinas PUPR
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kota (m)	Tidak ada wilayah pantai	M	Dinas PUPR
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kota	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kota	ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kota	Tidak ada	Jumlah	Dinas PUPR
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kota/Kota				
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kota (ha)	Tidak ada	Ha	Dinas PUPR

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kota (m)	Tidak ada	M	Dinas PUPR
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kota (ha)	Tidak ada	Ha	Dinas PUPR
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kota (m)	Tidak ada	M	Dinas PUPR
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kota	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kota	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kota	Tidak ada	Jumlah	Dinas PUPR
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi						
		1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	90,02	%	Dinas PUPR
		2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	90,02	%	Dinas PUPR
		3	Persentase panjang jaringan irigasi Tersier dalam kondisi baik	90,02	%	Dinas PUPR
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota						
		1	Pemenuhan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) lintas kota	1 Dok	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		2	Tersusun dan ditetapkannya Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) kota	1 Dok	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		3	Jumlah BUMD dan atau UPTD kota penyelenggaran SPAM	Tidak ada	BUMD/UPTD	Dinas PUPR
		4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Tidak ada	Izin	Dinas PUPR
		5	Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	Tidak ada	Kerja sama	Dinas PUPR

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik				
		1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	2.056	Rumah	Dinas PUPR
		2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	1.356	Rumah	Dinas PUPR
		3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	3.812	Rumah	Dinas PUPR
		4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	32	Rumah	Dinas PUPR
		5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	32	Rumah	Dinas PUPR
		6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	1356	Rumah	Dinas PUPR
		7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	30,12	%	Dinas PUPR
		8	Kinerja penyediaan pelayanan IPLT akses aman	0,94	%	Dinas PUPR
		9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	23,66	%	Dinas PUPR
		10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	23,66	%	Dinas PUPR
		11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	33,33	%	Dinas PUPR
		12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	11,53	%	Dinas PUPR
		13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	100,00	%	Dinas PUPR
		14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0,566	%	Dinas PUPR
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota				
		1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0	%	Dinas PUPR

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/kota dalam tahun eksisting	12.736	Izin	Dinas PUPR
		3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	1	Bangunan	Dinas PUPR
		6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota	0	Bangunan	Dinas PUPR
		7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah kota	3.743	Bangunan	Dinas PUPR
		8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kota yang dipelihara/dirawat	173	Bangunan	Dinas PUPR
Rasio kemantapan jalan						
		1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kab/ kota	639.262	M	Dinas PUPR
		2	Panjang jalan yang dibangun	Tidak ada	M	Dinas PUPR
		3	Panjang jembatan yg dibangun	12	M	Dinas PUPR
		4	Panjang jalan yang ditingkatkan	8.785,16	M	Dinas PUPR
		5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	93	M	Dinas PUPR
		6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	21.417,86	M	Dinas PUPR
		7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	Tidak ada	M	Dinas PUPR
		8	Panjang jalan yang dipelihara	8.395	M	Dinas PUPR
		9	Panjang jembatan yang dipelihara	235	M	Dinas PUPR
Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli						
		1	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kota	0	Orang	Dinas PUPR
		2	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kota	164	Orang	Dinas PUPR
		3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	164	Orang	Dinas PUPR

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kota yang aktif dengan data termutakhir	tidak ada	Ada/ Tidak	Dinas PUPR
		5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota yang bersumber dari APBD kabupaten/kota	Tidak ada	Ada/ Tidak	Dinas PUPR
		6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota yang bersumber dari APBN	Tidak ada	Ada/ Tidak	Dinas PUPR
		7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak ada	Ada/ Tidak	Dinas PUPR
		8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Tidak ada	Ada/ Tidak	Dinas PUPR
		9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kota	Tidak ada	Ada/ Tidak	Dinas PUPR
		10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/ analis konstruksi di wilayah kab/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Tidak ada	Ada/ Tidak	Dinas PUPR
		11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/ analis	Tidak ada	Ada/ Tidak	Dinas PUPR
		12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/ teknisi/ analis di wilayah kabupaten/kota	Tidak ada	Ada/ Tidak	Dinas PUPR

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kab/kota	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	ada	Ada/Tidak	Dinas PUPR
		18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	78	Badan Usaha	Dinas PUPR
		19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/ kota	Tidak ada	Badan Usaha	Dinas PUPR
		20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/kota	Tidak ada	Badan Usaha	Dinas PUPR
		21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/kota	Tidak ada	Badan Usaha	Dinas PUPR
		22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak ada	izin	Dinas PUPR
		23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Pengawasan	Dinas PUPR

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Kecelakaan Konstruksi	Dinas PUPR
		25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Pengawasan	Dinas PUPR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten				
		1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	22.433	Unit	Dinas PKPLH
		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	2.352	Unit	Dinas PKPLH
		3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	2.613	Orang	Dinas PKPLH
		4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	NIHIL	Unit	Dinas PKPLH
		5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Nihil	Unit	Dinas PKPLH
		6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	NIHIL	Unit	Dinas PKPLH
		7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	99	Unit	Dinas PKPLH
		8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	NIHIL	Orang	Dinas PKPLH
		9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	NIHIL	Ha	Dinas PKPLH
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten				
		1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	RT	Dinas PKPLH
		2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	RT	Dinas PKPLH

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	RT	Dinas PKPLH
		4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	RT	Dinas PKPLH
		5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	RT	Dinas PKPLH
		6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	Ha	Dinas PKPLH
Persentase Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani						
		1	Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh < 10 Ha	8,589	Ha	Dinas PKPLH
		2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	437	Unit	Dinas PKPLH
		3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	136,814	Ha	Dinas PKPLH
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)						
		1	Jumlah rumah di kab/kota	246.714	Rumah	Dinas PKPLH
		2	Jumlah unit PK RTLH	437	Rumah	Dinas PKPLH
		3	Jumlah rumah tidak layak huni	6.774	Rumah	Dinas PKPLH
		4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	271	Rumah	Dinas PKPLH
		5	Rasio rumah dan KK	1,15	%	Dinas PKPLH
		6	Jumlah rumah pembangunan baru	269		Dinas PKPLH
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)						
		1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	40	Perumahan	Dinas PKPLH
		2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	98	Rumah	Dinas PKPLH
		3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	246.714	Rumah	Dinas PKPLH
		4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi(on site / off site)	100	Rumah	Dinas PKPLH
		5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	9	Perumahan	Dinas PKPLH
		6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	246.714	Rumah	Dinas PKPLH

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	20	Pengembang	Dinas PKPLH
		8	Jumlah pengembang yang terregistrasi	20	Pengembang	Dinas PKPLH
		9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	Pengembang	Dinas PKPLH
5	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan				
		1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/kota yang ditangani	1942	Jumlah	Satpol PP
		2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	4.137	Orang	Satpol PP
		3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	56	Perda& Perkada	Satpol PP
		4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	4	Orang	Satpol PP
		5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	10	Orang	Satpol PP
		6	Tersedianya sarana prasarana minimal	1	SOP	Satpol PP
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				
		1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	%	BPBD
		2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100	%	BPBD
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
		1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100	%	BPBD
		2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100	%	BPBD
		3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	1,07	%	BPBD
		4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	1,92	%	BPBD
		5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	10,97	%	BPBD
		6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100	%	BPBD

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				
		1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100	%	BPBD
		2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	0	%	BPBD
		3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100	%	BPBD
		4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100	%	BPBD
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				
		1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kota	46	Layanan	Satpol PP
		2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Nihil	Pos	Satpol PP
		3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Nihil	Orang	Satpol PP
		4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Nihil	Pos	Satpol PP
		5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	3	Sarpras	Satpol PP
		6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	32	Orang	Satpol PP
		7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	103	Orang	Satpol PP

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	2	Keg	
		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti				
		1	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan Yang Dimiliki	4	layanan	DinsosP3A P2KB
		2	Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Untuk Masuk Dalam Data Terpadu FM dan OTM	2009	orang	DinsosP3A P2KB
		3	Jumlah Tim Reaksi Cepat Yang Dibentuk	1	tim	DinsosP3A P2KB
		4	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Dijangkau	1744	orang	DinsosP3A P2KB
		5	Jumlah Kendaraan Roda Empat yang Akses Khusus Layanan Kedaruratan yang Dimiliki	1 unit mobil resque	unit	DinsosP3A P2KB
6	Sosial	6	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Menerima Paket Permakanaan Sesuai Standar Gizi	413	Orang	DinsosP3A P2KB
		7	Jumlah Rumah Singgah/ Shelter/ Tempat Tinggal Sementara yang Dimiliki Sesuai Standar	1	unit	DinsosP3A P2KB
		8	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Menerima Paket Sandang	20	Orang	DinsosP3A P2KB
		9	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Memanfaatkan Alat Bantu	37	Orang	DinsosP3A P2KB
		10	Jumlah Alat Bantu Yang Tersedia di Rumah Singgah/ Shelter	1 kursi roda 2 kruk	unit	DinsosP3A P2KB
		11	Jumlah Paket Perbekalan Kesehatan Yang Tersedia	-	Paket	DinsosP3A P2KB
		12	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Memanfaatkan Paket Perbekalan Kesehatan	-	Orang	DinsosP3A P2KB

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		13	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Disediakan di Rumah Singgah	-		DinsosP3A P2KB
		14	Jumlah Pekerja Sosial Profesional dan/atau TKS dan/atau Relawan Sosial yang Disediakan	1	Orang	DinsosP3A P2KB
		15	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial Sesuai Standar di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	1744	Orang	DinsosP3A P2KB
		16	Jumlah Bimbingan Sosial Yang Dilaksanakan Kepada Keluarga dan Masyarakat	1 bl 1 kali		DinsosP3A P2KB
		17	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Difasilitasi Untuk Mendapatkan Dokumen Kependudukan	39	orang	DinsosP3A P2KB
		18	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	44	orang	DinsosP3A P2KB
		19	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Mendapatkan Layanan Penelusuran Keluarga	9	orang	DinsosP3A P2KB
		20	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Direunifikasi Dengan Keluarga	9	Orang	DinsosP3A P2KB
		21	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Dirujuk	49	Orang	DinsosP3A P2KB
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten				
		1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	14.554	Orang	DinsosP3A P2KB

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	431	Orang	DinsosP3A P2KB
		3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	132 desa/kel	Penampungan	DinsosP3A P2KB
		4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	230	Paket	DinsosP3A P2KB
		5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	4034	Orang	DinsosP3A P2KB
		6	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	33	Orang	DinsosP3A P2KB
7	Tenaga Kerja	Persentase kota/kota yang menyusun rencana tenaga kerja				
		1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten	ada	Ada/Tidak	Disnaker perinkop UKM
		2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	99	%	Disnaker perinkop UKM
		3	Jumlah perusahaan yang Menyusun rencana tenaga kerja	3	Perusahaan	Disnaker perinkop UKM
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi				
		1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	21,43	%	Disnaker perinkop UKM
		2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	77	%	Disnaker perinkop UKM
		3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	3,11	%	Disnaker perinkop UKM
		4	Persentase LPK yang terakreditasi	0,15	%	Disnaker perinkop UKM
		5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	100	%	Disnaker perinkop UKM
		6	Jumlah penganggur yang dilatih	2704	%	Disnaker perinkop UKM
		7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100	%	Disnaker perinkop UKM
		8	Persentase penyerapan lulusan	52,7	%	Disnaker perinkop UKM
		9	Lulusan bersertifikat kompetensi	2,26	%	Disnaker perinkop UKM

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		10	Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang	77,09	%	Disnaker perinkop UKM
		11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)	4	Pelatihan	Disnaker perinkop UKM
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja						
		1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0,09	%	Disnaker perinkop UKM
		2	Data tingkat produktivitas total	0,00	%	Disnaker perinkop UKM
Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)						
		1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	62,8	%	Disnaker perinkop UKM
		2	Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	102,38	%	Disnaker perinkop UKM
		3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	94.983	SP/SB	Disnaker perinkop UKM
		4	Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	92,53	%	Disnaker perinkop UKM
		5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	63,6	%	Disnaker perinkop UKM
		6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0	%	Disnaker perinkop UKM
		7	Jumlah Mogok Kerja	0	Mogok	Disnaker perinkop UKM
		8	Jumlah Penutupa Perusahaan	0	Perusahaan	Disnaker perinkop UKM
		9	Jumlah Perselisihan Kepentingan	0	Perselisihan	Disnaker perinkop UKM
		10	Jumlah Perselisihan antar Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) Perusahaan	0	Perselisihan	Disnaker perinkop UKM
		11	Jumlah Perselisihan PHK	10	Perselisihan	Disnaker perinkop UKM

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		12	Jumlah Pekerja / Buruh yang Ter-PHK	16	Perselisihan	Disnaker perinkop UKM
		13	Jumlah Perselisihan yang Diselesaikan Melalui Perundingan Bipartite	4	Perselisihan	Disnaker perinkop UKM
		14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten/ Kota yang Diberdayakan	1	LKS	Disnaker perinkop UKM
		15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	40	%	Disnaker perinkop UKM
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kab/kab dalam 1 (satu) daerah kab				
		1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kab	3.509	Lowongan Kerja	Disnaker perinkop UKM
		2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	67.709	Orang	Disnaker perinkop UKM
		3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab	23	BKK	Disnaker perinkop UKM
		4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kota	0	Orang	Disnaker perinkop UKM
		5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	5	Orang	Disnaker perinkop UKM
		6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab	0	Lembaga	Disnaker perinkop UKM
		7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab	13	Perjanjian	Disnaker perinkop UKM
		8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	3195	orang	Disnaker perinkop UKM
		9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	358	Orang	Disnaker perinkop UKM
		10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	358	Orang	Disnaker perinkop UKM
		11	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Yang Mendapatkan Fasilitas Kepulangan	0,00	%	Disnaker perinkop UKM

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		12	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Yang Mendapatkan Pendidikan & Pelatihan Kerja	77,09	%	Disnaker perinkop UKM
		13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan Keluarganya	0,00	%	Disnaker perinkop UKM
		14	Jumlah Layanan Terpadu satu Atap (LTSA) Yang Dibentuk (layanan TKI / PMI)	50,00	%	Disnaker perinkop UKM
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD				
		1	Jumlah Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Kab Yang Telah Dilatih PUG	34 OPD 27 Desa	Lemba ga	DinsosP3A P2KB
		2	Jumlah Program PUG di Pemda yang Sudah Dievaluasi Melalui Analisis Gender Tingkat Kab	24	Prog/ Keg	DinsosP3A P2KB
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten				
		1	Jumlah Media Massa Yang Pernah Berkerjsama Untuk Melakukan "KIE" Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	2	Media Massa	DinsosP3A P2KB
		2	Jumlah Lembaga Layanan Anak Yang Telah Memiliki SPM	6	Lemba ga	DinsosP3A P2KB
		3	Persentase Korban Kekerasan Anak Yang Terlayani	4,7	%	DinsosP3A P2KB
		4	Jumlah Lembaga Layanan Anak Yang Mendapatkan Pelatihan	6	lembaga	DinsosP3A P2KB
		5	Jumlah Lembaga Layanan Anak Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan/ Fasilitas Oleh Pemkab/Kota (APBD Kab)	-	Lemba ga	DinsosP3A P2KB
		Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 anak				
		1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten yang mendapatkan pelatihan	1	organisa si	DinsosP3A P2KB
		2	Jumlah kader perempuan tingkat kota yang sudah dilatih	7	Orang	DinsosP3A P2KB
		3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaanperempuan yang mendapat pelatihan	1	Lemba ga	DinsosP3A P2KB
		4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh Pemkab	2 JPPA dan forum anak	Lemba ga	DinsosP3A P2KB

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	tdk ada	Kebijakan/ Program	DinsosP3A P2KB
		6	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	1 (JPPA)	Lemba ga	DinsosP3A P2KB
		7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	%	DinsosP3A P2KB
9	Pangan	Persentase Cadangan Pangan				
		1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	18	Ada/ Tidak	Dispertan pangan
		2	Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	25.250	Ada/ Tidak	Dispertan pangan
		3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak ada	Ada/ Tidak	Dispertan pangan
		4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Tidak ada	Ada/ Tidak	Dispertan pangan
		5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	Ada/ Tidak	Dispertan pangan
		6	Tertanganinya kerawanan pangan	18	Ada/ Tidak	Dispertan pangan
		7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tidak ada	Ada/ Tidak	Dispertan pangan
		8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	10	Ada/ Tidak	Dispertan pangan
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan				
		1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan oleh Bupati	100	%	Dinas PUPR
		2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0	%	Dinas PUPR
		3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee	tidak ada		Dinas PUPR
		4	Dokumen Izin membuka tanah	tidak ada		Dinas PUPR
		5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah kab	tidak ada		Dinas PUPR

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten				
		1	Hasil Perhitungan kota terhadap :			Dinas PKPLH
			a) Indeks Kualitas Air, (IKA)	43,75		Dinas PKPLH
			b) Indeks Kualitas Udara (IKU)	79,63		Dinas PKPLH
			c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)			Dinas PKPLH
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kabupaten				
		1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten		%	Dinas PKPLH
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten				
		1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten	92,86	%	Dinas PKPLH
		2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten	0,003	%	Dinas PKPLH
		3	Penetapan Hak MHA Terkait Dengan PPLH Yang Berada di Daerah Kabupaten	0	%	Dinas PKPLH
		4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0	%	Dinas PKPLH
		5	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten yang ditangani	100,00	%	Dinas PKPLH
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik				
		1	Penerbitan akta perkawinan	147,25	%	Dinas Dukcapil
		2	Penerbitan akta perceraian	200	%	Dinas Dukcapil
		3	Penerbitan akta kematian	100	%	Dinas Dukcapil
		4	Penyajian data kependudukan	300	%	Dinas Dukcapil
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal				
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	-	Desa	Dinas PMD

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	-	Desa	Dinas PMD
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	-	Lemba ga	Dinas PMD
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	-	Desa	Dinas PMD
Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri						
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	109,00	Desa	Dinas PMD
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	5,00	Desa	Dinas PMD
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	5719,00	Lemba ga	Dinas PMD
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	80,00	Desa	Dinas PMD
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR				
		1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	ada	Ada/ Tidak	DinsosP3A P2KB
		2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	25-49	Nilai Tengah	DinsosP3A P2KB
		3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	242	orang	DinsosP3A P2KB
		4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	1,7	%	DinsosP3A P2KB

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		5	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	7	Stakeholder	DinsosP3A P2KB
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)				
		1	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100	%	DinsosP3A P2KB
		2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	18,93	%	DinsosP3A P2KB
		3	Pemerintah Daerah yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	21	kampung KB	DinsosP3A P2KB
		4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	87,61	%	DinsosP3A P2KB
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)				
		1	Persentase kesertaan KB di kab dgn kesertaan rendah	44	%	DinsosP3A P2KB
		2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	70,45	%	DinsosP3A P2KB
15	Perhubungan	Rasio konektivitas kota				
		1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	0,02	%	Dishub
		2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	198,31	%	Dishub
		3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	3,292	%	Dishub
		V/C Ratio di Jalan kota				
			Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten aatau kota	78,21	%	Dinas Perhubungan
19	Komunikasi dan Informatika	: Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo				
		1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	%	Dinas Kominfo
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100	%	Dinas Kominfo

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dgn memanfaatkan jaringan intra pemerintah	ada	Ada/ Tidak	Dinas Kominfo
		Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi				
		1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	20,63	%	Dinas Kominfo
		2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	75,76	%	Dinas Kominfo
		3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	%	Dinas Kominfo
		4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	64,49	%	Dinas Kominfo
		5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	11,59	%	Dinas Kominfo
		6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	34,21	%	Dinas Kominfo
		7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	43,86	%	Dinas Kominfo
		8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100	%	Dinas Kominfo

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100	%	Dinas Kominfo
		10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100	%	Dinas Kominfo
		11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	100	%	Dinas Kominfo
		12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	78,79	%	Dinas Kominfo
		13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	100	%	Dinas Kominfo
		14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	ada	Ada/ tidak	Dinas Kominfo
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah kabupaten				
		1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabuapten/ kota	100	%	Dinas Kominfo
		2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100	%	Dinas Kominfo
		3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100	%	Dinas Kominfo
17	Koperasi dan UKM	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas				
		1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	0	%	Disnaker perinkop UKM
		2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	100	%	Disnaker perinkop UKM

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	27,62	%	Disnaker perinkop UKM
		4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	8,23	%	Disnaker perinkop UKM
		5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	15,1	%	Disnaker perinkop UKM
		6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,11	%	Disnaker perinkop UKM
		7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	11,23	%	Disnaker perinkop UKM
		8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0	%	Disnaker perinkop UKM
		9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	4,6	%	Disnaker perinkop UKM
		10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kab/kota	8,47	%	Disnaker perinkop UKM
		11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kabupaten/kota	0	%	Disnaker perinkop UKM
		12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kabupaten/ kota	21,73	%	Disnaker perinkop UKM

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kota dalam 1 (satu) daerah kab/kota	0	%	Disnaker perinkop UKM
		Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha				
		1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	2,94	%	Disnaker perinkop UKM
		2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	7,59	%	Disnaker perinkop UKM
		3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	1,47	%	Disnaker perinkop UKM
		4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0,47	%	Disnaker perinkop UKM
		5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	2,11	%	Disnaker perinkop UKM
		6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	4,21	%	Disnaker perinkop UKM
		7	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	2,52	%	Disnaker perinkop UKM
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten				
		1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	ada	Ada/ Tidak	Dinas PMPTSP
		2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tidak ada	Ada/ Tidak	Dinas PMPTSP
		3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	Jumlah Laporan	Dinas PMPTSP
		4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	2	Jumlah Kegiatan	Dinas PMPTSP
		5	Kegiatan pameran penanaman modal	0	Jumlah Kegiatan	Dinas PMPTSP
		6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0	Jumlah Kegiatan	Dinas PMPTSP
		7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	1.702	Jumlah Konsultasi	Dinas PMPTSP
		8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	6645	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan	Dinas PMPTSP

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		9	Laporan realisasi penanaman modal	1.086.472.800.000	(Rupiah)	Dinas PMPTSP
		10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kota serta kabupaten/kota	22		Dinas PMPTSP
		11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	270	Perusahaan	Dinas PMPTSP
		12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten	8	Ada/Tidak	Dinas PMPTSP
19	Pemuda dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri				
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	74	Orang	Disdikpora
		2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	Orang	Disdikpora
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan				
		1	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	200	Orang	Disdikpora
		2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	100	Orang	Disdikpora
		Peningkatan Prestasi Olahraga				
		1	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	161	Orang	Disdikpora
		2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	25	Event	Disdikpora
20	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah				
		1	Tersedianya buku profil daerah	ada	Ada/tidak	Dinas Kominfo
		2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	7	Jumlah Survey	Dinas Kominfo
		3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	8	Jml kompilasi	Dinas Kominfo
		4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	2	Jumlah Survey	Dinas Kominfo
		5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	1	Jumlah Kompilasi	Dinas Kominfo
		6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	66,67	%	Dinas Kominfo
		7	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	100	%	Dinas Kominfo

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah				
		1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan	0	%	Dinas Kominfo
		2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen	50,88	%	Dinas Kominfo
		3	Persentase sistem elektronik/ asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0	%	Dinas Kominfo
		4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS)	47,06	%	Dinas Kominfo
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya				
		1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	115	Obyek	Disbudpar
		2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	48	Obyek	Disbudpar
		3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	92	Obyek	Disbudpar
		4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	0	Orang	Disbudpar
		5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	25	Cagar Budaya	Disbudpar
		6	Perlindungan cagar budaya kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	222	Cagar Budaya	Disbudpar
		7	Layanan perizinan membawa cagar budaya kabupaten ke luar kabupaten dengan dukungan data	0	Cagar Budaya	Disbudpar
		8	Pengembangan cagar budaya kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi),	2	Cagar Budaya	Disbudpar

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		9	Pemanfaatan cagar budaya kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	2	Cagar Budaya	Disbudpar
		10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	224	Koleksi	Disbudpar
		11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	75415	Orang	Disbudpar
		12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.			Disbudpar
		13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	1	Tim	Disbudpar
		14	Pembentukan tim ahli cagar budaya kota	1	Tim	Disbudpar
		15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	5	Tim	Disbudpar
		16	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	41	Orang	Disbudpar
		17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	9	Orang	Disbudpar
		18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	12	Unit	Disbudpar
		19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	26	Kegiatan	Disbudpar
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat				
			Rasio kecukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk			Dinas Arpus
			Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat		%	Dinas Arpus
			Rasio kecukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk		%	Dinas Arpus
			Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan		%	Dinas Arpus
		5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat		kali	Dinas Arpus
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat				
		1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	1	Naskah Kuno	Dinas Arpus

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data		
		2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa		Naskah Kuno	Dinas Arpus		
		3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	116 buku	Budaya Etnis	Dinas Arpus		
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan						
		1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip		%	Dinas Arpus		
		2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip		%	Dinas Arpus		
			Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik		%	Dinas Arpus		
			Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN		%	Dinas Arpus		
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat						
		1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0	Jumlah Arsip	Dinas Arpus		
		2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	Jumlah Arsip	Dinas Arpus		
		3	Penyelamatan arsip perangkat daerah kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kota yang sesuai NSPK di kota	0	Jumlah Arsip	Dinas Arpus		
		4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kota yang sesuai NSPK	0	Jumlah Arsip	Dinas Arpus		
		5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0	Jumlah Arsip	Dinas Arpus		
				6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kota yang sesuai NSPK	0	Jumlah Arsip	Dinas Arpus
		Urusan Pilihan						
25	Kelautan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)						
		1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	560	orang	Dispertan pangan		

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	0	%	Dispertan pangan
		3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kota/ kota yang diterbitkan	0	Izin	Dispertan pangan
		4	Jml pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)	170	Pembudidaya	Dispertan pangan
		5	Jml benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	118.080.000	Benih	Dispertan pangan
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan				
		1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	66		Disbudpar
		2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	679		Disbudpar
		3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kota	15	TDUP	Disbudpar
		4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	11	orang	Disbudpar
		5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	9	Kegiatan	Disbudpar
		6	Jumlah wisatawan manca negara per kebangsaan	11	orang	Disbudpar
		7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	2	Industri	Disbudpar
		8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	10,466		Disbudpar
		9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	71,42		Disbudpar
		10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	28	Lokasi	Disbudpar
28	Kehutanan	1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0	Dokumen	Dinas PUPR
		2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	11		Dinas PUPR

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		3	Pemulihan ekosistem pada Tahura	2,513		Dinas PUPR
		4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0		Dinas PUPR
29	ESDM	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kota				
		1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota		ada/ tidak	
30	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)				
		1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :			Dinas Perdagangan
			a. Pusat perbelanjaan	0	%	
			b. Toko swalayan	0	%	
		2	presentas epenerbitan TDG	11,00	%	Dinas Perdagangan
		3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	318,00		Dinas Perdagangan
		4a	a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	0,00	%	Dinas Perdagangan
		4b	b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	0,00	%	Dinas Perdagangan
			c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	0,00	%	Dinas Perdagangan
		5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/kota	0,00	%	Dinas Perdagangan
		6	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	0	%	Dinas Perdagangan
		7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	9,00	%	Dinas Perdagangan
		8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	60,30	%	Dinas Perdagangan
		1	Jumlah penanganan pengaduan konsumen	0,00	Pengaduan	Dinas Perdagangan
		2	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang tereduksi	0,00	Konsumen	Dinas Perdagangan
		Persentase kinerja realisasi pupuk				
		1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	21595,477		Dinas Perdagangan

No	Urusan	No IKK	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku				
		1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	10499	%	Dinas Perdagangan
		2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	2,00	%	Dinas Perdagangan
31	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota				
		1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kab/kota	0,00	%	Disnaker perinkop UKM
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP				
		1	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	0	%	Disnaker perinkop UKM
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil yang dikeluarkan oleh instansi terkait				
		1	Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) kecil yang diterbitkan	100,00	%	Disnaker perinkop UKM
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri kecil yang dikeluarkan oleh instansi terkait				
		1	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil yang diterbitkan	0	%	Disnaker perinkop UKM
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini				
		1	Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri di ka/kota	3,49		Disnaker perinkop UKM
31	Transmigrasi	1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya		Kawasan	
		2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya		Permukiman	
		3	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya		Permukiman	

### 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	94,185	%	Disdikpora
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	97,038	%	Disdikpora
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	99,785	%	Disdikpora
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	22,849	%	Disdikpora
2	Kesehatan	5	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	0,151		Dinas Kesehatan
		6	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	94,118	%	Dinas Kesehatan
		7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	95,394	%	Dinas Kesehatan
		8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	%	Dinas Kesehatan
		9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,022	%	Dinas Kesehatan
		10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	91,919	%	Dinas Kesehatan
		11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98,403	%	Dinas Kesehatan
		12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	48,020	%	Dinas Kesehatan
		13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	74,690	%	Dinas Kesehatan
		14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	52,043	%	Dinas Kesehatan
		15	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	92,243	%	Dinas Kesehatan
		16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	72,853	%	Dinas Kesehatan

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	72,915	%	Dinas Kesehatan
		18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	97,808	%	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	100	%	Dinas PUPR
		20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten	tidak ada wilayah pantai	%	Dinas PUPR
		21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	900024,67	%	Dinas PUPR
		22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	98,247	%	Dinas PUPR
		23	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	%	Dinas PUPR
		24	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	100	%	Dinas PMPTSP
		25	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten	93,341	%	Dinas PUPR
		26	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	47,399	%	Dinas PUPR
			Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	%	Dinas PUPR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100	%	Dinas PKPLH
		28	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	0,00	%	Dinas PKPLH
		29	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	94,092	%	Dinas PKPLH
		30	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	2,746	%	Dinas PKPLH

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		31	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100,00	%	Dinas PKPLH
5	Ketentrama, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	32	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	96,257	%	Satpol PP
		33	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	96,552	%	Satpol PP
		34	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	140210	Orang	BPBD
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	120424	Orang	BPBD
		36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	130384	Orang	BPBD
		37	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	%	BPBD
		38	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	13,56	Menit	Satpol PP
		6	Sosial	39	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	90,366
40	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten			100	%	Dinsos P3AP2KB
7	Tenaga Kerja	41	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	78,947	%	Disnaker Perinkop UKM
		42	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,794	%	Disnaker Perinkop UKM
		43	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	14340156 6,849		Disnaker Perinkop UKM
		44	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar	63,595	%	Disnaker Perinkop UKM
		45	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	47,623	%	Disnaker Perinkop UKM

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	46	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	55,493	%	Dinsos P3AP2KB
		47	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	100	%	Dinsos P3AP2KB
		48	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	1,971	Per 100.000	Dinsos P3AP2KB
9	Pangan	49	Persentase cadangan pangan	188,575	%	Disperten Pangan
10	Pertanahan	50	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	%	Dinas PUPR
		51	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum	0,00	%	Dinas PUPR
		52	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	0,00	%	Dinas PUPR
		53	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0,00	%	Dinas PUPR
		54	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	0,00	%	Dinas PUPR
		55	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	%	Dinas PUPR
11	Lingkungan Hidup	56	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten	54,88	%	Dinas PKPLH
		57	Terlaksananya pengelolaan sampah Regional/Terpadu di wilayah Kabupaten	38633,349	%	Dinas PKPLH
		58	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	21,711	%	Dinas PKPLH
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	59	Perekaman KTP Elektronik	97,669	%	Dinas Dukcapil
		60	Persentase anak usia 0- 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	64,65	%	Dinas Dukcapil
		61	Kepemilikan akta kelahiran	98,481	%	Dinas Dukcapil
		62	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	33,33	%	Dinas Dukcapil
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	63	Persentase pengentasan desa tertinggal	tdk ada desa tertinggal	%	Dinas PMD

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		64	Persentase peningkatan status desa mandiri	56,757	%	Dinas PMD
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	65	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,08		Dinsos P3AP2KB
		66	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	64,315	%	Dinsos P3AP2KB
		67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	15,686	%	Dinsos P3AP2KB
15	Perhubungan	68	Rasio konektivitas kabupaten	0,68		Dishub
		69	Kinerja lalu lintas kabupaten	56		Dishub
16	Komunikasi dan Informatika	70	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	%	Dinas Kominfo
		71	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	64,486	%	Dinas Kominfo
		72	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kab	75,012	%	Dinas Kominfo
17	Koperasi dan UKM	73	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	18,60	%	Disnaker Perinkop UKM
		74	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	100	%	Disnaker Perinkop UKM
18	Penanaman Modal	75	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	-34,293	%	Dinas BMPTSP
19	Kepemudaan dan Olahraga	76	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,636	%	Disdikpora
		77	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	73,329	%	Disdikpora
		78	Peningkatan prestasi olahraga	40	Medali	Disdikpora
20	Statistik	79	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	%	Dinas Kominfo
		80	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	%	Dinas Kominfo
21	Persandian	81	Tingkat keamanan informasi pemerintah	38,295		Dinas Kominfo
22	Kebudayaan	82	Terlestarikannya Cagar Budaya	61,667	%	Disbudpar

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
23	Perpustakaan	83	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	23,78	%	Dinas Arpus
		84	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	58,66	%	Dinas Arpus
24	Kearsipan	85	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan	21,49	%	Dinas Arpus
		86	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap	27,62	%	Dinas Arpus
<b>Urusan Pilihan</b>						
25	Kelautan Perikanan	87	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP)	2735,20	Ton	Dispertan Pangan
26	Pariwisata	88	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	0,00	%	Disbudpar
		89	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	81,685	%	Disbudpar
		90	Tingkat Hunian akomodasi	21,141	%	Disbudpar
		91	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,763	%	Disbudpar
		92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0,183	%	Disbudpar
27	Pertanian	93	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	659,97	ton	Dispertan Pangan
		94	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	tidak ada kasus	%	Dispertan Pangan
28	Kehutanan			Tidak Perlu Diisi		
29	ESDM	95	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/Kabupaten	0,00	%	
30	Perdagangan	96	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP Toko Swalayan)	0,00	%	Dinas Perdagangan
		97	Persentase kinerja realisasi pupuk	96,546	%	Dinas Perdagangan
		98	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	68,621	%	Dinas Perdagangan

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		99	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten	0,369	%	Disnaker Perinkop UKM
31	Perindustrian	100	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)	100	%	Disnaker Perinkop UKM
		101	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	%	Disnaker Perinkop UKM
		102	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0,00	%	Disnaker Perinkop UKM
		103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	0,00	%	Disnaker Perinkop UKM
		104	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100		Disnaker Perinkop UKM
32	Transmigrasi					

### 2.2.3 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
33	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	107,890	%	BPPKAD
		2	Persentase PAD	19,907	%	BPPKAD
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	level 3	Level	Inspektorat
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level 3	Level	Inspektorat
		5	Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	14,182	%	BPPKAD

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
		6	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	Inspektorat
					WTP	
					WTP	
					WTP	
34	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)	7	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0,00	%	Bagian PBJ
		8	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	54,909	%	Bagian PBJ
		9	Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	53,94	%	Bagian PBJ
			Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	61,45		Bagian PBJ
35	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	10	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100,652	%	BKPSDM
		11	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	12,158	%	BKPSDM
		12	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	50,00	%	BKPSDM
36	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	13	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	13,5232	%	BPPKAD
		14	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	1,7233	%	BPPKAD
		15	Assets management	4,00	Jumlah	BPPKAD
			KIB A s/d KIB E		ya	
			Permendagri No. 47 Tahun 2021		ya	
			Rekon 1 th sekali		ya	
			Rekapitulasi Barang ke Neraca		ya	
		16	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	20,55	%	BPPKAD

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Satuan	Sumber Data
37	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi Dan Partisipasi Publik)	17	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	115,638	,,,,,,,,,,%	Dinas Kominfo
		18	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	15,789	,,,,,,,,,,%	Dinas Kominfo

### 2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah.

Skala penilaian capaian kinerja setiap indikator menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang selanjutnya dikategorikan ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut :

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber data : Permendagri 86 Tahun 2017

#### a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Tabel 2.2  
Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 dalam Perjanjian Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Harapan Lama Sekolah	14,67
2.	Rata-rata lama sekolah	9,01
3.	Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	87,77%
4.	Angka Harapan Hidup	76,52
5.	Angka Kematian Ibu	52,78
6.	Angka Kematian Bayi	7,1
7.	Kemampuan konsumsi rumahtangga perkapita	11.271,84

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
8.	Indeks Reformasi Birokrasi	85
9.	Nilai Akutabilitas Kinerja	81,00
10.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP
11.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,5
12.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,68
13.	Indeks Rasa Aman	0,53
14.	Indeks Toleransi	100%
15.	PDRB Perkapita ( Juta Rupiah)	139,78
16.	Angka Kemiskinan	6,1
17.	Angka Pengangguran	3,05
18.	Nilai Investasi	8,79 T
19.	Persentase (%) Insfrastruktur Dalam Kondisi Mantap	82,72%
20.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,56

Sumber data : diolah oleh Bagian Organisasi

b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan target dalam Perjanjian Kinerja

Tabel 2.3  
Capaian Indikator Kinerja Utama dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun 2022		
		Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Harapan lama sekolah	14,67	13,25	90,32
2.	Rata-rata lama sekolah	9,01	9,06	100,55
3.	Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	87,77%	87,87%	100,11%
4.	Angka Harapan Hidup	76,52	76,76	100,31
5.	Angka Kematian Ibu	52,78	88,24	32,82
6.	Angka Kematian Bayi	7,1	5,96	116,06
7.	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita	11.271,84	11.272,00	100
8	Indeks Reformasi Birokrasi	85	69,21	81,42
9..	Nilai Akuntabilitas Kinerja	81,00	71,13	87,81
10.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	Masih dalam proses	

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun 2022		
		Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
11.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,5	88,31	105,76
12.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,68	3,38	126,12
13.	Indeks rasa aman	0,53	0,86	162,26
14.	Indeks Toleransi	100%	100%	100%
15.	PDRB Per Kapita (juta rupiah)	139,78	126,95	90,82
16.	Angka Kemiskinan	6,1	7,41	82,32
17.	Angka Pengangguran	3,05	3,21	95,02
18.	Nilai Investasi	8,79 T	10,30 T	117,18
18..	Persentase (%) infrastruktur dalam kondisi mantap	82,72%	84,86	102,59
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,56	54,88	82,45

Sumber data : diolah oleh BAgian Organisasi

c. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan tahun dalam sebelumnya

Tabel 2.4  
Capaian Indikator Kinerja Utama Dibandingkan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kierja Tahun					
		2021			2022		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Harapan Lama Sekolah	14,44	13,24	91,69	14,67	13,25	90,32
2.	Rata-rata lama sekolah	8,70	8,76	100,69	9,01	9,06	100,55
3.	Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	87,54%	86,13%	98,39	87,77%	87,87%	100,11 %
4.	Angka Harapan Hidup	76,51	76,78	100,35	76,52	76,78	100,30
5.	Angka Kematian Ibu	59,27	150,95	-54,68	52,78	88,24	32,82
6.	Angka Kematian Bayi	7,30	6,75	107,53	7,1	5,96	116,06
7.	Kemampuan konsumsi rumah tangga perkapita	11.130,49	11.272,00	101,27	11.271,84	11.272,00	100
8.	Indeks Reformasi Birokrasi	79,00	67,52	85,46	85	69,21	81,42
9.	Nilai Akutabilitas Kinerja	75,00	69,45	92,60	81,00	71,13	87,81
10.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	Masih dlm	

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kierja Tahun					
		2021			2022		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
	BPK)					proses	
11.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00	86,88	104,67	83,5	88,31	105,76
12.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,56	2,53	98,83	2,68	3,38	126,12
13.	Indeks Rasa Aman	0,53	0,44	83,02	0,53	0,86	162,26
14.	Indeks Toleransi	100	91,67	91,67	100%	100%	100%
15.	PDRB Perkapita ( Juta Rupiah)	134	126,65	94,51	139,78	126,95	90,82
16.	Angka Kemiskinan	6,21	7,60	81,71	6,1	7,41	82,32
17.	Angka Pengangguran	3,15	3,77	80,32	3,05	3,21	95,02
18.	Nilai Investasi	8,34 T	39,44 T	472,90	8,79 T	10,30 T	117,18
19.	Persentase (%) Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap	81,72	83,60	102,30	82,72%	84,86	102,59
20.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,34	62,76	96,05	66,56	54,88	82,45

Sumber data : diolah oleh Bagian Organisasi

d. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan target dalam Pembangunan Jangka Menengah

Tabel 2.4  
Capaian Indikator Kinerja Utama Dibandingkan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun						Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2022 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020	2021	2022				
		% Capaian	% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Harapan lama sekolah	94,63	93,17	91,69	14,67	13,25	90,32	14,90	88,93
2.	Rata-rata lama sekolah	102,13	102,94	100,69	9,01	9,06	100,55	9,20	98,48
3.	Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	99,93	103,80	98,39	87,77%	87,87%	100,11%	88,00	99,85
4.	Angka Harapan Hidup	100,03	100,14	100,35	76,52	76,78	100,30	76,54	100,31
5.	Angka Kematian Ibu	89	28,67	-54,68	52,78	88,24	32,82	52,78	32,82
6.	Angka Kematian Bayi	95	89,86	107,53	7,1	5,96	116,06	6,9	113,62
7.	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita	104,33	101,55	101,27	11.271,84	11.272,00	100	11.413,19	98,76
8.	Indeks Reformasi Birokrasi	85,80	90,89	85,46	85	69,21	81,42	90	75,02
9.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	94,13	95,08	92,60	81,00	71,13	87,81	83	84,94

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun						Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2022 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020	2021	2022				
		% Capaian	% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	Masih dalam proses		WTP	
11.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	101,16	105,87	104,67	83,5	88,31	105,76	85	107,70
12.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	128,17	131,06	98,83	2,68	3,38	126,12	2,87	117,77
13.	Indeks rasa aman	161,54	103,77	83,02	0,53	0,86	162,26	0,53	
14.	Indeks Toleransi	100 %	91,67	91,67	100%	100%	100%	100 %	
15..	PDRB Per Kapita (juta rupiah)	99,59	96,77	94,51	139,78	126,95	90,82	144,87	
16.	Angka Kemiskinan	99,70	86,67	81,71	6,1	7,41	82,32	5,90	79,62
17.	Angka Pengangguran	85,49	29,84	80,32	3,05	3,21	95,02	2,90	90,34
18	Nilai Investasi	77,25	42,12	472,90	8,79 T	10,30 T	117,18	9,19 T	
19..	Persentase (%) infrastruktur dalam kondisi mantap	101,26	103,06	102,30	82,72%	84,86	102,59	83,73%	101,35
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	101,22	100,84	96,05	66,56	54,88	82,45	67,77	80,98

Sumber data : diolah oleh Bagian Organisasi

- e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan kinerja yang dicapai

### 1. Meningkatnya kualitas pendidikan

Realisasi sasaran meningkatnya kualitas pendidikan dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Perhitungan
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Harapan lama sekolah	Proporsi lama sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang
		Rata-rata lama sekolah	Partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan
		Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	Jumlah nilai rata-rata dari Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Kelulusan (AL) dan Persentase Sekolah/Lembaga terakreditasi A jenjang pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Masyarakat

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

**Tabel 2.5**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan**  
**Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun								Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2022 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020	2021			2022				
		% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Harapan lama sekolah	94,63	93,17	14,44	13,24	91,69	14,67	13,25	90,32	14,90	88,93
2.	Rata-rata lama sekolah	102,13	102,94	8,70	8,76	100,69	9,01	9,06	100,55	9,20	98,48
3.	Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	99,93	103,80	87,54%	86,13%	98,39	87,77%	87,87%	100,12	88,00%	99,85
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	98,90	99,97			96,92			97,06		95,75

*Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, BPS, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022 (data diolah)*

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2022

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 97,00%. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,08% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2021 sebesar 96,92%.

Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 masih kurang 4,72 %

1. Harapan lama sekolah	$\frac{14,90 - 13,25}{13,25}$	x	=	-
		100%		12,45%
2. Rata-rata lama sekolah	$\frac{9,20 - 9,06}{9,06}$	x	=	-1,55%
		100%		
3. Persentase (%) akses dan mutu pendidikan	$\frac{88,00 - 87,87}{87,87}$	x	=	-0,15%
		100%		
Rata-rata persentase (%) terhadap akhir RPJM 2023				-
				4,72%

2. Capaian kinerja IKU

a. Angka capaian kinerja IKU Harapan lama sekolah tahun 2022 sebesar 90,32%. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 1,37% apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 91,69%, Realisasi Tahun 2022 sebesar 13,25 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 13,24 mengalami kenaikan sebesar 0,01 dan angka tersebut telah melampaui sebesar 1,39%

Meningkatnya dari Realisasi Tahun 2022 sebesar 13,24 dengan realisasi sebesar 13,25 menunjukkan secara rata-rata anak usia 7 (tujuh) tahun yang masuk jenjang formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,25 tahun atau setara dengan D-2. Faktor yang mendukung realisasi ini adalah tersedianya lembaga pendidikan hingga kepedesaan meningkat sehingga akses masyarakat untuk bersekolah hingga perguruan tinggi.

Program yang mendukung Realisasi Harapan Lama Sekolah adalah Program Peningkatan Pendidikan dengan kegiatan pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pengelolaan Pendidikan non formal/kesetaraan.

Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kudus Tahun 2022 mengalami penurunan sedikit apabila dibandingkan dengan tahun 2021 hal ini dikarenakan adanya pandemi yang belum berakhir sampai saat ini.

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2022 di Kabupaten Kudus mengalami peningkatan menjadi 13,25 dibandingkan 12,93, maknanya penduduk di Kabupaten Kudus telah mengenyam pendidikan rata – rata di jalur perguruan tinggi.

- b. Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Kudus adalah 9,06 tahun berarti bahwa rata-rata penduduk sekolah sampai kelas 3 SMP.

Meningkat dari target yaitu 9,01 dengan realisasi sebesar 9,06. Faktor yang mempengaruhi angka ini adalah partisipasi sekolah dimana tingkat atau fokus tertinggi yang pernah atau sedang diduduki semakin meningkat juga ijazah dari jenjang dari jenis pendidikan yang pernah atau sedang diduduki semakin meningkat.

Program yang mendukung realisasi rata-rata lama sekolah adalah program peningkatan pendidikan dengan kegiatan pengelolaan pendidikan Sekolah dasar, Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama, program pendidikan Anak Usia dini, dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan.

Rata-rata Lama Sekolah tahun 2022 mengalami peningkatan lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Tengah (7,34)

Peningkatan realisasi Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kudus Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan karena faktor ketersediaan layanan pendidikan yang bisa diakses oleh masyarakat mengalami peningkatan. Hal tersebut bisa dilihat dari realisasi peningkatan akses dan mutu pendidikan.

Efektifitas tersebut karena faktor ketersediaan layanan pendidikan yang bisa diakses oleh masyarakat secara optimal sehingga berpengaruh pada tingkat kelulusan peserta didik menjadi 100% yang berimbas pada capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah.

- c. Angka capaian kinerja IKU Persentase (%) akses dan mutu pendidikan tahun 2022 sebesar 100,12%. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 5,41% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 98,39%. Realisasi Tahun 2022 sebesar 87,87 % apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 86,13% mengalami kenaikan sebesar 1,74%.

Persentase Akses dari Mutu

Dari Target tahun lalu 2022 sebesar 87,77, Realisasi sebesar 87,87. Realisasi tersebut dipengaruhi Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Kelulusan (AL) dan Presentase Sekolah atau lembaga terakreditasi A pada jenjang pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan masyarakat.

Faktor yang mendukung APM adalah kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya dari jenjang PAUD hingga SMP Meningkatkan.

- Angka Kelulusan adalah kelulusan tidak lagi ditentukan oleh Ujian Nasional melainkan oleh sekolah sehingga sekolah mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk meluluskan siswa meski tetap berpedoman pada ketentuan nasional.
- Sekolah Atau Lembaga yang terakreditasi yang meningkat dipengaruhi jumlah sekolah yang terakreditasi meningkat.

Program yang mendukung realisasi Presentase Akses dan Mutu adalah program pengelolaan pendidikan dengan kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah dasar, pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama, program pendidikan Anak Usia Dini dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

Meningkatkan kualitas pendidikan berindikator persentase akses dan mutu pendidikan daerah semakin menurun karena ada penurunan Angka Partisipasi Murni (APM) di jenjang pendidikan dasar, akreditasi jenjang PAUD dan Dikmas yang perlu ditingkatkan dan penyesuaian sistem perhitungan akses dan mutu pendidikan. Nilai kelulusan dan akreditasi menggambarkan mutu pendidikan dan nilai partisipasi menggambarkan akses pendidikan. Kedepan diharapkan nilai partisipasi bisa mencapai 100% sehingga berdampak pada peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

Ketiga indikator tersebut didukung dengan 4 (empat) program yaitu :

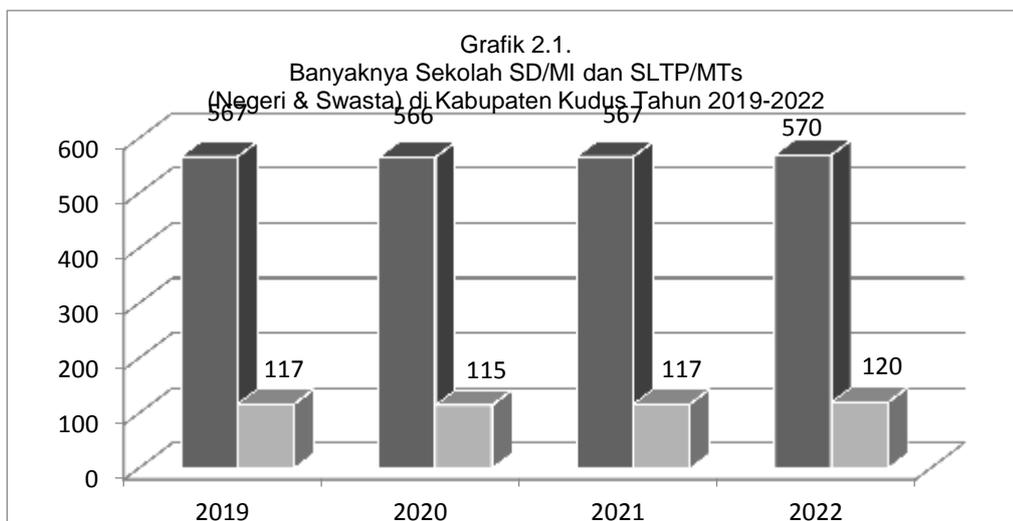
1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
3. Program Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
4. Program Pengembangan kapasitas kepemudaan

Penurunan target tersebut disebabkan karena faktor :

- a. Angka Partisipasi Murni ( APM ) di jenjang pendidikan dasar.
- b. Akreditasi jenjang PAUD.
- c. Pendidikan Masyarakat perlu ditingkatkan dan penyesuaian sistem perhitungan akses dan mutu pendidikan.

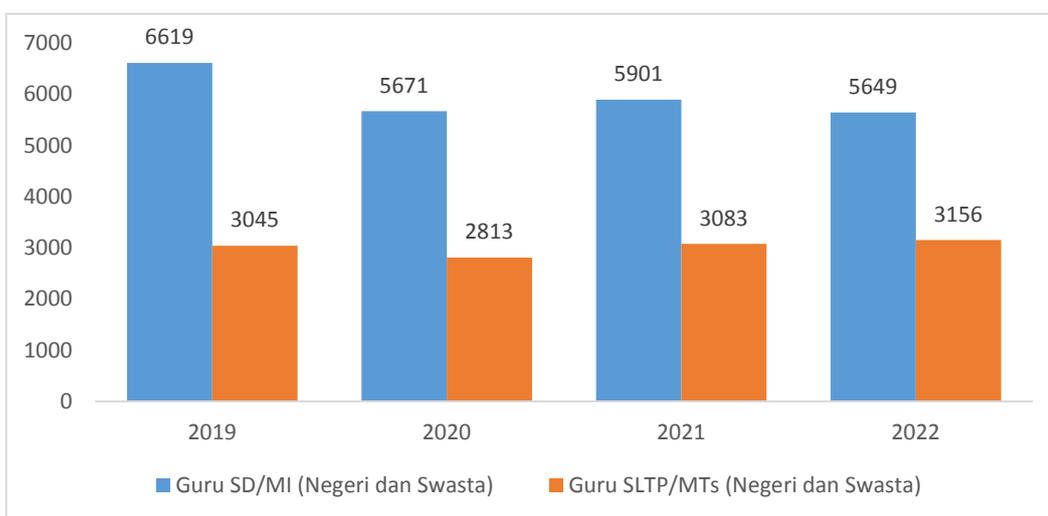
Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan adalah 97,00% atau Sangat tinggi

Sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Kudus dalam dunia Pendidikan dapat dilihat dari Penyediaan sarana dan prasarana berupa gedung sekolah pada satuan pendidikan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus, berikut jumlah sekolah tingkat dasar, guru dan murid di Kabupaten Kudus :



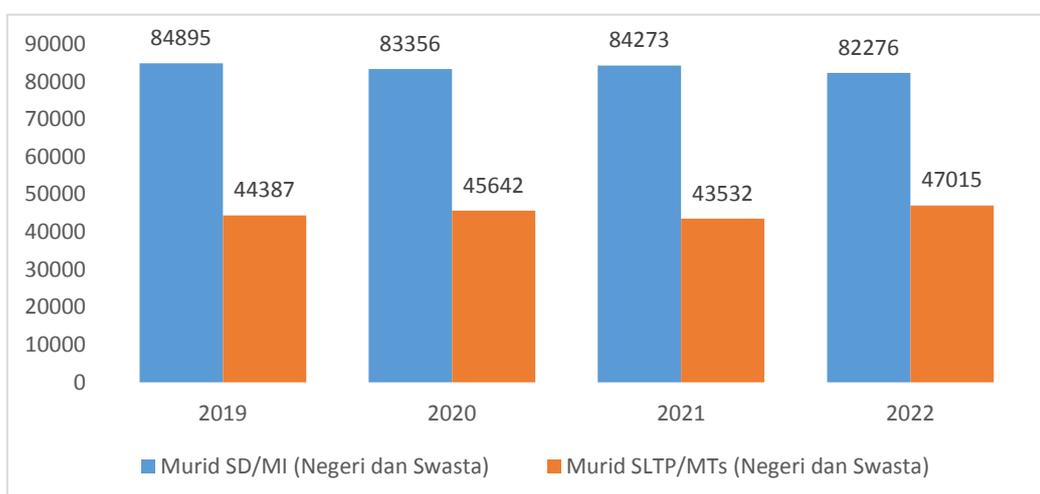
Sumber data : Dinas Pendidikan , Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022

**Grafik 2.2**  
Banyaknya Guru untuk Tingkat SD/MI dan SLTP/MTs  
(Negeri & Swasta) di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2021



Sumber data : Dinas Pendidikan , Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022

**Grafik 2.3**  
Banyaknya Murid untuk Tingkat SD/MI dan SLTP/MTs  
(Negeri & Swasta) di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2022



Sumber data : Dinas Pendidikan , Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021

Penduduk yang bersekolah di sekolah negeri dan swasta selama periode tahun 2022 – 2023 secara umum mengalami fluktuasi, hal ini dapat dilihat dari banyaknya murid di setiap jenjang pendidikan yang mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tingkat pendidikan jika dibanding dengan tahun sebelumnya, pendidikan dasar yaitu SD ( Negeri dan Swasta ) di tahun ajaran 2022/2023 jumlah murid yang bersekolah mengalami penurunan 1.997 murid. Untuk pendidikan SLTP (Negeri dan Swasta) juga mengalami kenaikan jumlah murid sebesar 3.483 murid.

Peningkatan jumlah penduduk yang bersekolah, tentunya harus diimbangi dengan penyediaan sarana fisik dan tenaga guru yang memadai. Pada tahun ajaran 2022/2023, tersedia jumlah SD sebanyak 424 unit dan MI sebanyak 146 unit, SLTP dan MTs masing-masing sebanyak 52 dan 68 unit.

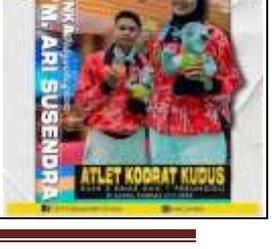
Jumlah universitas / perguruan tinggi pada tahun akademik 2022/2023 tercatat ada 8 buah, yaitu Universitas Muria Kudus (UMK) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Cendekia Utama Kudus, Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU), AKBID Mardi Rahayu, AKBID Penda, Akper Krida Husada dan Akademi Kebidanan Muslimat NU Kudus.

**Penghargaan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2022**

NO	NAMA PENGHARGAAN	INSTANSI YANG DIBERIKAN	TAHUN	PENERIMA PENGHARGAAN	KETERANGAN/ DOKUMENTASI
1	Juara III Lomba Cipta Lagu Anak Kategori Naskah Lagu Anak Tingkat Provinsi	KB Ummi Halimatus sa'diyyah	2022	Chabibah A'yun	
2	Peringatan Hari Kartini Tahun 2022 Tingkat Provinsi dalam bidang pendidikan	Organisasi Aksi Silidaritas Era Kabinet Indonesia Maju	2022	Yuyun Eka Susanti	

<b>NO</b>	<b>NAMA PENGHARGAAN</b>	<b>INSTANSI YANG DIBERIKAN</b>	<b>TAHUN</b>	<b>PENERIMA PENGHARGAAN</b>	<b>KETERANGAN/ DOKUMENTASI</b>
3.	Olimpiade SAIN Nasional (OSN) Peraih Medali Emas Tingkat Nasional	Balai Pengembangan Talenta Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi	2022	Felicia Joleen Harianto, SD Masehi Kudus	
4.	Olimpiade SAIN Nasional (OSN) Peraih Medali Perak Tingkat Nasional	Balai Pengembangan Talenta Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi	2022	Lionel Wijaya, SD Cahaya Nur	
5.	Olimpiade SAIN Nasional (OSN) Peraih Medali Perunggu Tingkat Nasional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	2022	Nararya Rafa Suryawirawan, SD 1 Barongan	
6.	Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Peraih Medali Emas Tingkat Nasional	Balai Pengembangan Talenta Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi	2022	Kayla Felisiana Istanti, SMP 1 Kudus	
7.	Juara I Lomba MAPSI SMP Tingkat Jawa Tengah	Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah	2022	Vila Sofia, SMP TAHFIDH MA'HAD YASIN	
8.	Juara I Lomba MAPSI SMP Tingkat Jawa Tengah	Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah	2022	Fikri Adnan Oktar, SMP 1 Bae	

<b>NO</b>	<b>NAMA PENGHARGAAN</b>	<b>INSTANSI YANG DIBERIKAN</b>	<b>TAHUN</b>	<b>PENERIMA PENGHARGAAN</b>	<b>KETERANGAN/ DOKUMENTASI</b>
9.	Juara III Lomba MAPSI SMP Tingkat Jawa Tengah	Kantor Kementrian Agama Provinsi Jawa Tengah	2022	Tiara Najla Salsabila, SMP 1 Kudus	
10.	SEA Pencak Silat CHAMPIONSHIP SINGAPURA Peraih Medali Emas Tingkat Internasional	8 <sup>TH</sup> SOUTHEAST ASIA Pencak Silat CHAMPIONSHIP 2022	2022	Safira Dwi Meilani	
11.	19 <sup>TH</sup> WORLD Pencak Silat CHAMPIONSHIP 2022 Peraih Medali Emas Tingkat Internasional	19 <sup>TH</sup> WORLD PENCAK SILAT CHAMPIONSHIP 2022	2022	Safira Dwi Meilani	
12.	Kejurnas Memperingati HUT KE-10 RSPAU dr. S. Hardjolukito Di Yogyakarta dari Cabang Olahraga Pencak Silat Peraih Mendali Emas Tingkat Nasional	Kejurnas memperingati HUT KE-10 RSPAU dr. S. Hardjolukito Di Yogyakarta	2022	Yuris Februari K.	
13.	Invitasi Terbuka Kejuaraan Cabang Olahraga Tenis Meja KADET NASIONAL Tahun 2022 Peraih Medali Perunggu Tingkat Nasional	Invitasi Terbuka Kejuaraan Tenis Meja KADET NASIONAL Tahun 2022	2022	Nabila Fikriyah	
14.	Kejurnas Bola Voli U-17 Peraih Juara III Tingkat Nasional	Kejurnas Bola Voli U-17	2022	TIM BOLA VOLI U-17	

<b>NO</b>	<b>NAMA PENGHARGAAN</b>	<b>INSTANSI YANG DIBERIKAN</b>	<b>TAHUN</b>	<b>PENERIMA PENGHARGAAN</b>	<b>KETERANGAN/ DOKUMENTASI</b>
15.	Kejurnas Cabor Tenis Meja Manado 2022 Kategori Tunggal KADET Putri Peraih Medali Emas Tingkat Nasional	Kejurnas Tenis Meja Manado 2022 Kategori Tunggal KADET Putri	2022	Adisty	
16.	Kejurnas Cabor Tenis Meja Manado 2022 Kategori Beregu KADET Putra Peraih Medali Perak Tingkat Nasional	Kejurnas Tenis Meja Manado 2022 Kategori Beregu KADET Putra	2022	Fatah	
17.	PRA POPNAS ZONA III 2022 Peraih Medali Perak Tingkat Nasional	PRA POPNAS ZONA III 2022	2022	TIM BASKET PUTRI	
18.	POMNAS XVII TAHUN 2022 Peraih Medali Emas Tingkat Nasional	POMNAS XVII TAHUN 2022	2022	Safira Dwi Meilani	
19.	POMNAS XVII TAHUN 2022 Peraih Medali Emas Tingkat Nasional	POMNAS XVII TAHUN 2022	2022	Ammar Abdullah Dhani Arni Raihan	
20.	POSPENAS TAHUN 2022 Peraih Medali Perunggu Tingkat Nasional	POSPENAS TAHUN 2022	2022	Irsalina Izzati	
21.	POMNAS XII TAHUN 2022 Peraih Medali Emas Tingkat Nasional	POMNAS XII TAHUN 2022	2022	M. Ari Susendra (80-85KG)	

NO	NAMA PENGHARGAAN	INSTANSI YANG DIBERIKAN	TAHUN	PENERIMA PENGHARGAAN	KETERANGAN/ DOKUMENTASI
22.	POMNAS XII TAHUN 2022 Peraih Medali Perunggu Tingkat Nasional	POMNAS XII TAHUN 2022	2022	M. Ari Susendra (Gerak Getar Campuran)	
23.	POMNAS XII TAHUN 2022 Peraih Medali Emas Tingkat Nasional	POMNAS XII TAHUN 2022	2022	Vinka Widyaningrum	
24.	Kejurnas Voli U-17 Peringkat III Tingkat Nasional	Kejurnas VOLI U-17	2022	TIM PUTRA	
25.	Kejurnas Senior Gulat Puan Maharani CUP 2022 Peraih Medali Emas Tingkat Nasional	Kejurnas Senior Gulat Puan Maharani CUP 2022	2022	Ahmad Umar Maulana	
26.	PASKIBRAKA Tingkat Nasional Tahun 2022	PASKIBRAKA Tingkat Nasional	2022	I Dewa Ayu Firsty Meita D	
27.	PASKIBRAKA Tingkat Jawa Tengah Tahun 2022	PASKIBRAKA Tingkat Jawa Tengah	2022	M. Franchy Luthfian R	

## 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Realisasi Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator	Formula Perhitungan
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola moralitas menurut umur
		Angka Kematian Ibu	Banyaknya kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa nifas pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dikali 100.000
		Angka Kematian Bayi	Banyaknya kematian bayi (dibawah 1 Tahun) selama tahun tertentu dibagi banyaknya kelahiran hidup pada waktu tertentu dikali 1000

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 2.6

### Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun								Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2022 terhadap target akhir 2023 (%)
		2020	2020	2021			2022				
		% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Angka Harapan Hidup	100,03	100,14	76,51	76,78	100,35	76,52	76,76	100,31	76,54	100,29
2.	Angka Kematian Ibu	89	28,67	59,27	150,95	-54,68	52,78	88,24	32,82	52,78	32,82
3.	Angka Kematian Bayi	95	89,86	7,30	6,75	107,53	7,1	5,96	116,06	6,9	113,62
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	94,68	72,89			51,07			83,06		82,24

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, BPS, LKj IP Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

#### 1) Capaian kinerja sasaran tahun 2022

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 83,06%. Angka tersebut kurang sebesar 31,99% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2021 sebesar 51,07%

Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023

$$1. \text{ Angka Harapan Hidup } \frac{76,54 - 76,52}{76,52} \times 100\% = -0,03\%$$

2. Angka Kematian Ibu	$\frac{52,78 - (88,24-52,78)}{52,78} \times 100\% = 32,82\%$
3. Angka Kematian Bayi	$\frac{6,90 - (7,10-6,90)}{6,90} \times 100\% = 97,10\%$
Rata-rata persentase (%) terhadap akhir RPJM 2023	43,30%

## 2) Capaian kinerja IKU

a. Angka capaian kinerja IKU Angka Harapan Hidup tahun 2022 sebesar 100,31%. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,04% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 100,35%. Realisasi Tahun 2022 sebesar 76,76 dipengaruhi oleh:

1. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat dengan capaian kinerja 94,99 %
2. Cakupan pelayanan pengendalian penyakit dengan capaian kinerja 75,17%
3. Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan dengan capaian kinerja 96,73%

apabila dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar 76,78 telah mengalami penurunan sebesar 0,02

Faktor pendukung keberhasilan capaian Angka Harapan Hidup Tahun 2022 adalah :

1. Pembentukan satgas covid 19
2. Penerapan prokes dalam semua aspek
3. Penerapan PHBS dalam Perilaku
4. Penguatan germas di lingkungan keluarga
5. Penguatan kegiatan testing, tracing, dan treatment
6. Optimalisasi Vaksin, logistik
7. Peningkatan kapasitas petugas (SDM).

Program/kegiatan yang mendukung capaian angka harapan hidup adalah :

- 1) Program Peningkatan kesehatan masyarakat meliputi peningkatan kesehatan keluarga dan gizi, peningkatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, fasilitasi promosi dan pemberdayaan kesehatan.
- 2) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit meliputi peningkatan Imunisasi dan surveilan wabah/ KLB/Bencana, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pelayanan pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular.

- 3) Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan meliputi pelayanan dan pembiayaan kesehatan, Pelayanan kefarmasian, perbekalan dan alat kesehatan, pelayanan perijinan, pengelolaan sumber daya kesehatan dan sistem informasi, operasional pelayanan laboratorium kesehatan, operasional pelayanan kesehatan di puskesmas, pelayanan kesehatan BLUD.
- b. Angka capaian kinerja IKU Angka Kematian Ibu Tahun 2022 sebesar 32,82%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar -54,68%. Realisasi Tahun 2022 sebesar 88,24 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 150,95 Permasalahan/penyebab penurunan luring signifikan pada pencapaian target Angka Kematian Ibu pada Tahun 2022 karena (10) sepuluh kematian terbanyak penyebabnya karena penyulit kehamilan dan persalinan yaitu Pre eklamsia, eklamsia, penyakit jantung bawaan dan 1 terkonfirmasi covid 19.

Berbagai upaya telah dilakukan meliputi meningkatkan akses layanan bagi ibu dan bayi baru lahir berupa peningkatan jumlah kunjungan ANC dari 4x menjadi 6x, persalinan di fasilitasi pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas layanan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir berupa penguatan antenatal, persalinan dan post natal sesuai standar.

Berdasarkan hasil analisis data resiko tinggi ibu hamil tahun 2022 lebih tinggi dari target nasional yaitu 20% sedangkan di Kabupaten Kudus naik menjadi 28%, hal ini karena masih banyaknya ibu hamil yang seharusnya tidak layak hamil tapi tetap hamil yaitu ibu hamil dengan 4 T (Terlalu muda, Terlalu tua, Terlalu banyak, dan Terlalu sering) serta ALKI (Anemia, Lila kurang dari 23,5 cm, penyakit kronis dan penyakit Infeksi menular seksual. Penyebab kematian terbanyak adalah penyebab tidak langsung diantaranya karena penyakit penyerta atau penyakit kronis seperti jantung, TB Paru, hepatitis, leukemia, SLE, hipertensi serta diperburuk oleh kejadian pandemi covid-19. Faktor penyebab kematian yang lain adalah faktor usia, jumlah anak (paritas), eklamsia, dan perdarahan.

Upaya yang telah ditempuh adalah penerapan konsep safe motherhood pilar yaitu penguatan “Keluarga

Berencana”, memastikan bahwa baik individu maupun pasangan memiliki akses terhadap informasi dan layanan keluarga berencana untuk merencanakan waktu, jumlah dan jarak kehamilan, penguatan kerjasama lintas program dan lintas sektor. Hal ini dimaksudkan agar ibu hamil benar-benar merupakan kehamilan yang diinginkan dan kondisi ibu sehat. diusahakan tidak hamil lagi atau tidak hamil dulu sebelum kondisi ibu sehat.

Program kegiatan pendukung Program /kegiatan yang mendukung capaian angka kematian ibu adalah :

- 1) Program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi serta desa siaga aktif, penguatan tata kelola meliputi pemantauan gizi, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK/anemia, edukasi ibu hamil melalui aplikasi BUNDAKU, penguatan system rujukan dengan aplikasi SIBULAN,
- 2) Program Peningkatan kesehatan masyarakat meliputi peningkatan kesehatan keluarga dan gizi, peningkatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, fasilitasi promosi dan pemberdayaan kesehatan.
- 3) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit meliputi peningkatan Imunisasi dan surveilan wabah/KLB/Bencana, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pelayanan pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular.
- 4) Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan meliputi pelayanan dan pembiayaan kesehatan, Pelayanan kefarmasian, perbekalan dan alat kesehatan, pelayanan perijinan, pengelolaan sumber daya kesehatan dan sistem informasi, operasional pelayanan laboratorium kesehatan, operasional pelayanan kesehatan di puskesmas, pelayanan kesehatan BLUD.

Berdasarkan analisis program kegiatan yang dilaksanakan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)

Analisa kegagalan /faktor pendukung kegagalan pencapaian target berdasarkan hasil Audit Maternal dan Perinatal (AMP) yang dilaksanakan di Kabupaten tahun 2021 penyebab kematian terbanyak akibat terkonfirmasi

covid 19 sebanyak 17 kasus yaitu 80,95%, penyakit penyerta sebanyak 4 kasus yaitu 19,05 % karena penyulit kehamilan dan persalinan yaitu pre eklamsi , ekamsi, penyakit jantung bawaan dan TBC.

Strategi yang digunakan untuk menutunkan angka kematian ibu adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Satgas Covid 19.
2. Penguatan puskesmas dan jaringannya
3. Penguatan manajemen program
4. Peningkatan peran serta masyarakat
5. Penguatan kerjasama dan kemitraan
6. Penguatan akselerasi dan inovasi dengan cara Optimalisasi aplikasi Si BULAN dalam rangka percepatan system
7. Audit Kematian Ibu
8. Edukasi tentang 5 M, screening covid pada ibu hamil dengan rapid antigen

c. Angka capaian kinerja IKU Angka Kematian Bayi tahun 2022 sebesar 116,06%. Angka tersebut kurang sebesar 2,44 % apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 113,62%. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa kasus kematian bayi di Kabupaten Kudus sejumlah 106 bayi dari total kelahiran hidup dalam 1 (satu) tahun sejumlah 13.600 bayi x 1.000 kelahiran hidup.

Realisasi Tahun 2022 sebesar 5,96 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 6,9 mengalami kenaikan sebesar 0,94

Faktor yang mempengaruhi tingginya angka kematian bayi sebanyak 106 kasus :

1. Asfiksia sebanyak 20% yaitu kasus kegagalan bayi baru lahir untuk bernafas secara spontan dan teratur
2. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 26% karena belum kematangan organ yang disebabkan persalinan sebelum waktunya atau premature.
3. Kelainan kongenital sebanyak 11% karena kegagalan pertumbuhan (proses embryogenesis) saat hamil yang menyebabkan kelainan kongenital atau cacat bawaan.
4. Terkonfirmasi covid 19 dan lainnya sebanyak 43%

Program kegiatan pendukung program/kegiatan yang mendukung capaian angka kematian bayi adalah Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan meliputi pelayanan kesehatan keluarga dan gizi melalui

kegiatan pemantauan gizi, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK/anemia, edukasi ibu hamil melalui aplikasi BUNDAKU, penguatan system rujukan dengan aplikasi SIBULAN, pendampingan ke rumah sakit rujukan, serta kegiatan Audit Maternal Perinatal, pembinaan tenaga kesehatan dalam upaya penanggulangan AKI-AKB, pengawasan ibu hamil resiko tinggi melalui Rumah Tunggu Kelahiran.

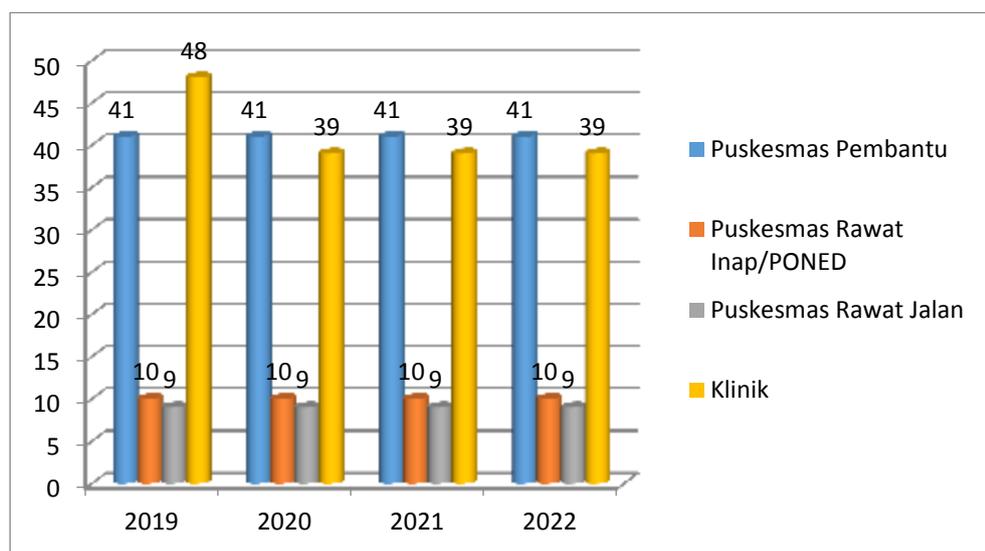
Keberhasilan menurunkan angka kematian bayi di Kabupaten Kudus pada tahun 2022 dilaksanakan melalui :

1. Pelaksanaan program kunjungan neonatal yang optimal.
2. Memberikan asuhan bayi baru lahir melalui pemberian pelayanan.
3. Deteksi dini tanda bahaya.
4. Menjaga kehangatan dan pemberian ASI.
5. Mencegah infeksi dan pendarahan dengan memberikan vitamin K injeksi untuk menurunkan resiko kesakitan dan kematian.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 83,06% atau Tinggi

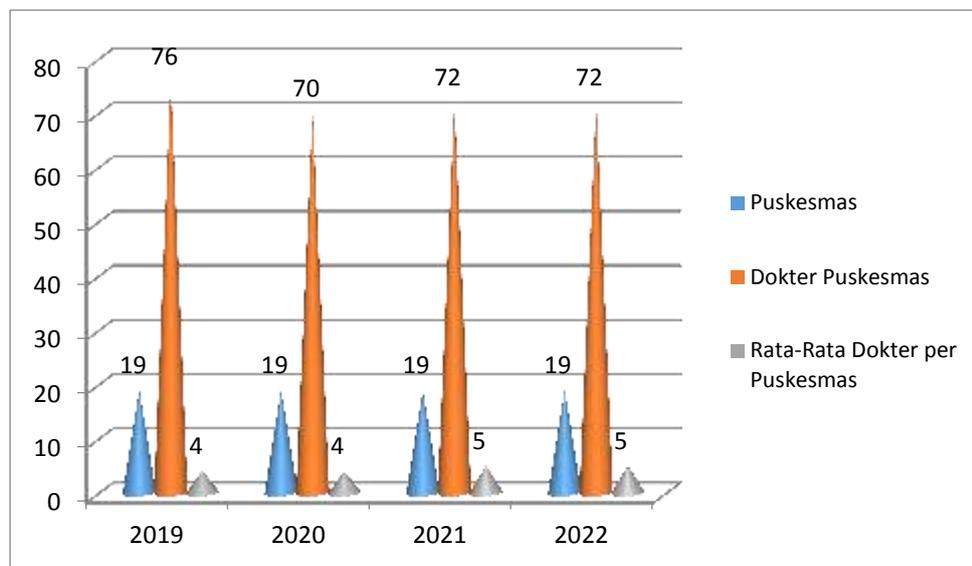
### Sarana dan prasarana Kesehatan di Kabupaten Kudus

Grafik 2.4  
Banyaknya Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2022



Sumber data : DKK Tahun 2022

**Grafik 2.5**  
**Banyaknya Puskesmas dan Rata-Rata Dokter Tiap Puskesmas**  
**di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2021**



Sumber data : DKK Tahun 2022

Pada tahun 2022 sarana kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), yang merupakan sarana kesehatan yang terjangkau dan dapat menunjang kesehatan masyarakat hingga pedesaan jumlahnya mencapai 19 buah. Upaya dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas, maka dilaksanakan akreditasi dengan status sebagai berikut :

- Status akreditasi madya sejumlah 13 Puskesmas
- Status akreditasi utama sejumlah 4 Puskesmas
- Status akreditasi dasar sejumlah 2 Puskesmas

Sarana kesehatan lainnya, yang membantu kinerja Puskesmas yaitu Puskesmas Pembantu, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Keliling, yang tersebar di seluruh kecamatan.

Pembangunan di bidang Kesehatan tidak lepas dari jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. Peningkatan sarana kesehatan sangat diperlukan sebagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya pada RSUD dr. Loekmonohadi Kabupaten Kudus saat ini sudah terakreditasi dengan Status Paripurna.

### **3. Meningkatnya Kemampuan Konsumsi Masyarakat**

Realisasi Sasaran meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1	Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita	Total pengeluaran rumah tangga dibagi jumlah rumah tangga (dalam ribu rupiah perorang pertahun)

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 2.7  
Capaian Kinerja Sasaran Kemampuan Konsumsi Masyarakat Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun								Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2022 terhadap target akhir 2023 (%)
		2020	2020	2021			2022				
		% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita	104,33	101,55	11.130,49	11.272,00	101,27	11.271,84	11.272,00	100	11.413,19	98,75
2.	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	104,33	101,56			101,27			100		98,75

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, Bappeda (data diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2022

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 100%. Angka tersebut kurang sebesar 1,27% dari capaian kinerja sasaran tahun 2021 sebesar 101,27%.

Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 masih kurang 1,25 %

$$1. \text{ Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita} \quad \frac{11.413,19 - 11.272,00}{11.272,00} \times 100\% = -1,25\%$$

Rata-rata persentase (%) terhadap akhir RPJM 2023 -1,25%

2. Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU Kemampuan Konsumsi rumah tangga Per Kapita tahun 2022 sebesar 100%. Angka tersebut kurang sebesar 1,27% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 101,27%. Realisasi Tahun 2022 sebesar 11.272,00 sama dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 11.272,00.

Realisasi sebesar 100 adalah dari Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi

sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/ pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Angka-angka konsumsi/ pengeluaran rata-rata per kapita diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengkonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk.

Faktor yang mendukung keberhasilan kemampuan konsumsi masyarakat

Masih diterapkannya kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat akibat pandemic covid19 pada tahun 2022, kecenderungan tingkat konsumsi masyarakat per kapita justru terjadi peningkatan. Salah satu factor yang mempengaruhi adalah, dengan terbatasnya pergerakan masyarakat, maka keinginan untuk melakukan aktivitas konsumtif dalam rumah justru semakin meningkat, apalagi didukung dengan semakin mudahnya layanan belanja via online.

Program yang mendukung Kemampuan Konsumsi rumah tangga Per Kapita adalah :

1. Program peningkatan ketahanan pangan
2. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Program Pemberdayaan kelembagaan sosial dan keluarga miskin
4. Program Pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial

Faktor penyebab keberhasilan

Realisasi sasaran meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat pada tahun 2022 mampu melampaui target yang telah ditetapkan karena faktor terjaganya stabilitas harga-harga barang terutama kebutuhan pokok serta kondusifitas wilayah yang cenderung stabil. Meskipun terjadi penurunan produktivitas masyarakat ditinjau dari segi lapangan usaha, namun untuk pengeluaran konsumsi masyarakat masih dapat dipertahankan dengan menjaga ketersediaan barang bahan kebutuhan pokok dan terjaminnya stabilitas harga barang.

Program kegiatan yang mendukung keberhasilan antara lain adalah monitoring ketersediaan barang dan harga barang secara rutin oleh tim pengendalian inflasi daerah.

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Disamping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 100 % atau **Sangat Tinggi**

#### 4. Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi.

Realisasi Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN & RB
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dari Kementerian PAN & RB
		Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Rata-rata tertimbang dari masing-masing unsur pelayanan
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Hasil Evaluasi Penerapan SPBE dari Kementerian PAN & RB

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

**Tabel 2.8**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun								Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2022 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020	2021			2022				
		% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	85,80	90,89	79,00	67,52	85,47	85,00	69,21	81,42	90	76,90
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	94,13	95,08	75,00	69,45	92,60	81,00	71,13	87,81	83	85,70
3.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Masih dalam proses		WTP	
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	101,16	105,87	83,00	86,88	104,67	83,5	88,31	105,76	85	103,89
5.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	128,17	131,06	2,56	2,53	98,83	2,68	3,38	126,12	2,87	117,77
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	102,32	104,58			95,39			115,94		110,83

Sumber data :RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, Bagian Organisasi, BPPKAD, Dinas Kominfo Tahun 2022 Kabupaten Kudus (data diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2022

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 115,94%. Angka tersebut melampaui sebesar 20,55% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2021 sebesar 95,39%.

Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 masih kurang 7,01 %

1. Indeks Reformasi Birokrasi	$\frac{90,00 - 69,21}{69,21} \times 100\% = -30,04\%$
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	$\frac{83,00 - 71,03}{71,03} \times 100\% = -16,85\%$
3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP x 100% = WTP
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\frac{85,00 - 88,31}{88,31} \times 100\% = 3,75\%$
5. Indeks Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	$\frac{2,87 - 3,38}{3,38} \times 100\% = 15,09\%$
Rata-rata persentase (%) terhadap akhir RPJM 2023	-7,01%

## 2. Capaian kinerja IKU

- a. Angka capaian kinerja IKU Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022 sebesar 81,42% Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 4,05% apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 85,47%.

Dalam Implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kudus mengupayakan perubahan di 8 (delapan) area yang menjadi focus perubahan. Sebagai dampak dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah melakukan upaya perbaikan dan tindak lanjut diantaranya yaitu:

- 1) Telah meningkatkan upaya perbaikan pada komponen hasil seperti terkait Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang ditandai dengan peningkatan nilai IPKP Tahun 2022 sebesar 91,10 dari KemenPAN RB dan IPAK Tahun 2022 sebesar 85,31 dari Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Pemerintah Kabupaten Kudus yang cukup signifikan
- 2) Telah meningkatkan upaya perbaikan pada komponen hasil antara, yang dapat terlihat dengan peningkatan pada beberapa komponen penilaian serta terdapat penilaian komponen yang baru dilakukan pada tahun 2022;
- 3) Telah meningkatkan upaya implementasi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang ditandai dengan adanya kenaikan predikat dari B (Baik) menjadi BB (Sangat Baik);
- 4) Terhadap rekomendasi dari Kemenpan RB tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kudus telah melakukan beberapa tindak lanjut sebagai berikut ;
  - Pelaksanaan Internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK yang dilanjutkan dengan pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap Core Value sebagai monev di tiap Perangkat Daerah;
  - Meningkatkan penerapan manajemen SPBE dengan penyusunan arsitektur SBPE dan peta rencana SPBE Kabupaten Kudus, pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi SPBE, dan sosialisasi digitalisasi layanan dan integrasi aplikasi pada seluruh PD. Hal ini ditunjukkan dengan adanya

peningkatan Indeks SPBE pada Pemerintah Kabupaten Kudus dari 2,53 menjadi 3,38;

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh aplikasi yang ada sebagai control dalam kualitas pemanfaatan aplikasi. Angka capaian kinerja IKU Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2022 masih dalam proses evaluasi/penilaian dari Kemen Pan RB.
- b. Angka capaian kinerja IKU Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2022 sebesar 87,81% Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 4,79% apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 92,60%.

Tahun 2022 Kabupaten Kudus mendapatkan Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 dengan predikat Nilai BB pada tanggal 6 Desember 2022 dari KemenPAN RB. Pemerintah Kabupaten Kudus telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan telah melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut :

1. Telah dilakukan reviu terhadap sebagian besar rumusan tujuan, sasaran, hingga indikator kinerja utama level PD dan telah ditindaklanjuti dengan penyusunan draft IKU terbaru, namun belum diformalkan dan disesuaikan sampai ke dokumen perencanaan lainnya seperti PK;
2. Peningkatan pemanfaatan aplikasi e-planning sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara bulanan oleh pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dengan menyajikan pengukuran indikator yang disandingkan dengan realisasi anggaran hingga ke level sub kegiatan;
3. Dalam peningkatan kualitas evaluasi internal, Inspektorat telah berupaya melalui berbagai upaya seperti :
  - Pembahasan rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dengan tiap PD terkait tindak lanjut yang harus dipenuhi;
  - Pelaporan hasil evaluasi SAKIP kepada Bupati dan Sekretaris Daerah untuk mendorong PD agar segera menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP;

- Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus telah mengirimkan surat kepada seluruh PD perihal implementasi SAKIP agar PD berkomitmen untuk perbaikan SAKIP termasuk juga Bappeda dan Bagian Organisasi untuk memantau tindak lanjut hasil evaluasi;
  - Pelaksanaan diklat teknis penyusunan dokumen perencanaan yang diikuti oleh seluruh PD dalam rangka peningkatan kapasitas aparat perencana.
- c. Angka capaian kinerja IKU Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) tahun 2022 sebesar Masih dalam proses dari BPK.

Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus yang lebih efektif untuk melaksanakan program dan kegiatan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mendapatkan Hasil Evaluasi dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sampai dengan Tahun 2022 sudah 10 (sepuluh) kali dengan hasil WTP.

- d. Angka capaian kinerja IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2022 sebesar 105,76% Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,09% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 104,67%. Realisasi Tahun 2022 sebesar 88,31 apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 86,88

Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kudus melaksanakan kegiatan survey kepuasan masyarakat sebanyak 4 kali dengan hasil rata-rata pencapaian 88,31% dengan katagori Baik. Hal tersebut dipengaruhi oleh :

- Penyusunan dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik di Perangkat Daerah serta Unit Pelayanan Lainnya;
- Telah dilaksanakan forum konsultasi publik dalam rangka partisipasi masyarakat untuk perbaikan layanan publik di Perangkat Daerah serta Unit Pelayanan Lainnya;
- Pelaksanaan survey Kepuasan Masyarakat secara elektronik yang dilaksanakan serentak mulai triwulan 1 s.d triwulan IV;
- Dilaksanakan evaluasi kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah terhadap 5 Perangkat Daerah dan 2 Unit kerja dengan nilai 92,87 berkategori Zona hijau kategori kualitas tertinggi.

- e. Angka capaian kinerja IKU Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2022 sebesar 126,12%. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 27,29% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 98,83%. Realisasi Tahun 2022 sebesar 3,38 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 2,53.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Dengan dikeluarkannya Perpres No.95 tahun 2018 tentang SPBE, ini membuktikan bahwa saat ini pemerintah kita serius dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan saling berhubungan dalam suatu sistem administrasi pemerintahan dan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada suatu instansi pemerintahan.

Untuk memetakan kondisi implementasi e-government secara nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan evaluasi SPBE di instansi pusat maupun daerah. Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Hasil evaluasi ini berisikan nilai indeks SPBE, nilai indeks domain dan aspek, kekuatan dan kelemahan, rekomendasi serta nilai dari masing-masing indikator yang diharapkan memberi gambaran terhadap penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, sehingga dapat melakukan perbaikan-perbaikan pada implementasi kebijakan, tata kelola serta layanan SPBE.

Berdasarkan evaluasi KEMENPANRB, indeks SPBE Kabupaten Kudus pada tahun 2022 mencapai nilai sebesar 3,38 dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 2,53 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.9  
Indeks SPBE Kabupaten Kudus Tahun 2019-2022

Nama Indeks	Nilai			
	2019	2020	2021	2022
<b>SPBE</b>	<b>2,73</b>	<b>3,08</b>	<b>2,53</b>	<b>3,38</b>
Domain Kebijakan SPBE	2,53	3,12	2,30	3,90
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	2,29	3,43	2,30	3,90
Domain Tata Kelola SPBE	2,7	2,90	1,90	3,00
Perencanaan Strategi SPBE	2,14	2,43	1,75	2,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,5	2,00	2,50	3,50
Penyelenggara SPBE	2,5	3,00	1,00	2,50
Domain Manajemen SPBE	2,33	2,33	1,00	2,36
Penerapan Manajemen SPBE	2,33	2,33	1,00	2,75
Audit TIK	2,33	2,33	1,00	1,33
Domain Layanan SPBE	3,09	3,39	3,49	3,82
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,86	3,43	3,70	3,70
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,5	3,33	3,17	4,00

Dapat dilihat pada tabel di atas, pada domain kebijakan internal SPBE, domain tata kelola SPBE dan domain layanan SPBE mengalami kenaikan nilai. Jika dibandingkan evaluasi pada tahun 2021 dan 2022 yang mengalami kenaikan hanya 0,33 point, tahun 2022 komitmen Pemerintah Kabupaten Kudus pada penyelenggaraan SPBE ini ditandai dengan dikeluarkannya Perbup Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kudus.

Dari hasil evaluasi penyelenggaraan SPBE tersebut, ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kudus yaitu :

1. Masih belum optimalnya kinerja tim pengarah SPBE
2. Belum tersusunnya rencana induk SPBE yang digunakan sebagai acuan dalam penerapan SPBE
3. Belum memiliki kebijakan proses bisnis terintegrasi
4. Masih ada beberapa layanan yang belum terdigitalisasi
5. Belum adanya tata kelola untuk integrasi aplikasi sehingga masih banyak aplikasi yang dikembangkan secara parsial

Solusi :

1. Perlunya kejelasan rincian tugas tim pengarah dan perlu diagendakan pertemuan rutin dengan tim pengarah SPBE

2. Perlunya menyusun rencana induk SPBE yang memuat sasaran SPBE, kebijakan dan strategi SPBE, arsitektur SPBE, dan peta jalan SPBE
3. Perlunya memotret kondisi eksisting dan kebutuhan layanan administrasi maupun layanan publik yang ada di Kabupaten Kudus dan menyusun peta jalan pembangunan dan pengembangan aplikasi
4. Perlunya menyusun dokumen integrasi dan tata kelola aplikasi

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 100,28% atau Sangat tinggi.

### 5. Meningkatkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama

Realisasi Sasaran meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama	Indeks Rasa Aman	Indeks Rasa Aman Penegakan Perda, Penanganan Gangguan Tibumtranmas, Perlindungan Masyarakat dan Damkar dikali 100%
		Indeks Toleransi	Nilai Rata-rata presentase potensi konflik agama, gangguan keamanan dari kelompok radikal dan konflik social yang tertangani

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 2.10  
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Ketertiban, Keamanan dan kenyamanan lingkungan serta Toleransi Umat Beragama Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun								Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2022 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020	2021			2022				
		% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Indeks rasa aman	161,54	103,77	0,53	0,44	83,02	0,53	0,86	162,26	0,53	162,26
2.	Indeks Toleransi	100 %	91,67	100	91,67	91,67	100%	100	100%	100	100%
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	130,77	97,72			87,35			131,13		131,13

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, LKjIP Kantor Kesbangpol Tahun 2022 dan LKjIP Satpl PP Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2022

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 131,13%. Angka tersebut melebihi sebesar 43,78% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2021 sebesar 87,35%.

Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 melampaui 18,88 %

1. Indeks Rasa aman	$\frac{0,53 - 0,86}{0,53} \times 100\% = -62,26\%$
2. Indeks Toleransi	$\frac{100 - 100}{100} \times 100\% = 100,00\%$
Rata-rata persentase (%) terhadap akhir RPJM 2023	18,88%

2. Capaian kinerja IKU

a. Angka capaian kinerja IKU Indeks rasa aman tahun 2022 sebesar 162,26%. Angka tersebut melebihi sebesar 79,24% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 83,02%. Realisasi Tahun 2022 sebesar 0,86 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 0,44 mengalami penurunan sebesar 0,42 dan angka tersebut juga telah sama terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 162,26%.

Perhitungan Indeks Rasa Aman Tahun 2022.

- Jumlah Penanganan Tibum	= 1.903
- Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda	= 59
- Jumlah Penanganan Kebakaran	= 66
TOTAL	= 2.028

$$\text{Indeks rasa aman} = \frac{\text{Jumlah Penanganan Gangguan Tibum Tranmas x Luas wilayah}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

$$= \frac{2.028 \times 364}{857415} = 0,86\%$$

Analisis terkait indeks rasa aman

Faktor yang mendukung tidak tercapainya indeks rasa aman :

- Karena kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan bagi masyarakat ekonomi lemah yang berdampak pada terjadinya PHK.
- Berkurangnya lapangan pekerjaan sehingga masyarakat cenderung mengambil jalan pintas pada kegiatan-kegiatan informal yang melanggar.

Pelaksanaan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bertujuan untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program yang diprioritaskan pada Pengamanan Perayaan Hari Raya dan Tahun Baru, Pembinaan Ketentraman, Ketertiban Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah, Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Upaya Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba/Minuman Keras dan Prostitusi, fasilitasi Forkopinda, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana serta Pembinaan kepada Ormas/LSM dan Parpol.

Kinerja di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat disamping dengan upaya menurunkan tindak kriminalitas dan konflik di daerah serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu, didukung pula dengan adanya upaya perbaikan fasilitas publik dan fasilitas penduduk akibat bencana, rekrutmen Pol PP sampai pada rasio 72,00 per 10.000 penduduk, terbangunnya desa tangguh bencana sebanyak 21 desa rawan bencana serta penanganan kasus-kasus pelanggaran peraturan daerah sampai 100%.

Penurunan angka konflik di daerah mempunyai arti yang positif karena menunjukkan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban daerah semakin kondusif.

Strategi yang dilaksanakan untuk peningkatan kondusifitas keamanan daerah di masa datang adalah:

1. Optimalisasi deteksi dini dan kewaspadaan terhadap potensi konflik sosial yang dapat mempengaruhi kestabilan daerah.
  2. Pemantapan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional, pembaharuan kebangsaan, kesadaran dan kemampuan bela negara.
  3. Optimalisasi koordinasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gangguan Narkoba ( P4GN).
  4. Pemantapan pendidikan politik bagi masyarakat.
- b. Angka capaian kinerja IKU Indeks Toleransi tahun 2022 sebesar 100%. Angka tersebut melebihi apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 91,67%. Realisasi Tahun 2022 sebesar 100% apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 91,67%,

Pencapaian indeks toleransi tahun 2022 di Kabupaten Kudus dipengaruhi oleh :

1. Prosentase potensi konflik agama yang tertangani 75%
2. Prosentase potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani 100%
3. Prosentase potensi konflik sosial yang tertangani 100%

Perhitungan Indeks Toleransi :

$$\text{Indeks toleransi} = \frac{\% \text{ potensi konflik sosial} + \% \text{ potensi gangguan keamanan} + \% \text{ konflik sara}}{3}$$

$$= \frac{100+100+100}{3} = 100\%$$

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari pencapaian Indeks Toleransi di Kabupaten Kudus adalah :

1. Peran aktif lembaga-lembaga kemasyarakatan/ Organisasi Kemasyarakatan baik yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan/inisiatif dari masyarakat untuk membentuk sebuah organisasi yang peduli terhadap toleransi.  
Contoh : FKUB, FPBI, MUI, Dewan Gereja Indonesia dll
2. Tersedianya regulasi yang mengatur toleransi umat beragama salah satunya yang mengatur tentang SOP Pendirian Rumah Ibadah.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebebasan beragama dan penganut kepercayaan.
4. Meningkatnya kehadiran pemerintah dalam penyelesaian konflik yang bernuansa SARA melalui sosialisasi dan mediasi-mediasi penyelesaian permasalahan intoleransi.

Program Kegiatan yang mendukung keberhasilan adalah :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 131,13% atau **Tinggi**.

## 6. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

Realisasi Sasaran meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	PDRB Perkapita	Jumlah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun
		Angka Kemiskinan	Jumlah penduduk rata-rata pengeluaran perkapita perbulan (dibawah garis kemiskinan) dibagi jumlah penduduk dikali 100%
		Angka Pengangguran	Jumlah angkatan kerjayang tidak memperoleh kesempatan kerja dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 2.12  
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun								Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2022 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020	2021			2022				
		% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PDRB Per Kapita (juta rupiah)	99,59	96,77	134	126,65	94,51	139,78	125,95	90,11	144,87	86,94
2.	Angka Kemiskinan	99,70	86,67	6,21	7,60	81,71	6,10	7,41	82,32	5,90	79,62
3.	Angka Pengangguran	85,49	29,84	3,15	3,77	80,32	3,05	3,21	95,02	2,90	90,34
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	94,93	71,09			85,51			89,15		85,53

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, Bappeda, Dinsos P3AP2 KB dan Dinas Perinkop UKM Tahun 2022 Kabupaten Kudus (data diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

### 1) Capaian kinerja sasaran tahun 2022

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 89,15%. Angka tersebut telah melampaui sebesar 3,64% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2021 sebesar 85,51%. Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 masih kurang 1,43 %

1. PDRB Per Kapita (Juta rupiah)	$\frac{144,87 - 125,95}{125,95} \times 100\% = -15,02\%$	
2. Angka Kemiskinan	$\frac{5,90 - 7,41}{7,41} \times 100\% = 20,38\%$	
3. Angka Pengangguran	$\frac{2,90 - 3,21}{3,21} \times 100\% = -9,66\%$	
Rata-rata persentase (%) terhadap akhir RPJM 2023		-1,43%

## 2) Capaian kinerja IKU

- a. Angka capaian kinerja IKU PDRB Per Kapita (juta rupiah) tahun 2022 sebesar 90,11%. Angka tersebut menurun sebesar 4,40% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 94,51%. Realisasi Tahun 2022 sebesar 126,95 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 126,65.

Realisasi sebesar 126,95 juta rupiah adalah dari : PDRB perkapita adalah nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu. Angka PDRB perkapita Kabupaten Kudus pada tahun 2022 sebesar 126,95 Juta rupiah diperoleh dari perhitungan jumlah PDRB Kabupaten Kudus menurut harga berlaku sebesar 108.214,90 juta rupiah dibagi oleh jumlah penduduk sebesar 857.415 jiwa.

Faktor yang mendukung keberhasilan PDRB Per Kapita Pada tahun 2022, jumlah PDRB Kabupaten Kudus mengalami penurunan sebesar -1,98 persen sesuai dengan harga konstan. Sedangkan jika dihitung dengan harga berlaku PDRB Kabupaten Kudus mengalami penurunan sekitar -1,2 persen. Meski demikian tingkat PRDB per Kapita Kabupaten Kudus mengalami kenaikan sebesar 0,57 persen atau sekitar 7 Juta per penduduk. Faktor mempengaruhi tingkat PDRB dikabupaten Kudus disebabkan oleh adanya perlambatan jumlah penduduk. Selain itu, mulai bergairahnya dunia perekonomian daerah, memberikan angin bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan omzet usaha mereka sehingga diterima oleh pasar dengan Pasar Kudus.

Program yang mendukung untuk meningkatkan PDRB per kapita saat ini pemerintah daerah Kabupaten Kudus telah melakukan banyak hal antara lain :

1. Program peningkatan produksi dan sarana prasarana pertanian/ perkebunan

2. Program peningkatan dan pengembangan pariwisata
  3. Program peningkatan dan pengelolaan pasar
  4. Program kesempatan kerja, penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja
  5. Program peningkatan dan pengembangan perindustrian
  6. Program peningkatan dan pengembangan KUKM
- b. Angka capaian kinerja IKU Angka Kemiskinan tahun 2022 sebesar 82,32%. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,61% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 81,71%. Realisasi Tahun 2022 sebesar 7.41 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 7,60 mengalami kenaikan sebesar 0,19 ( angka yang tidak diharapkan).

Untuk mengukur kemiskinan, Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Untuk Tahun 2022 batas garis kemiskinan adalah sebesar 482.806 rupiah ber jiwa.

Faktor yang mempengaruhi kegagalan angka kemiskinan :

Tingkat kemiskinan pada tahun 2022 kembali menurun dari kondisi tahun sebesar 7,60 persen menjadi 7,41 persen. Salah satu penyebab terjadi peningkatan jumlah SDIT dan lainnya

Untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus, Pemerintah Daerah telah berusaha untuk meningkatkan pelatihan dan sekaligus tambah DPRB.

Program yang telah dijalankan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan antara lain :

1. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  2. Program Pemberdayaan kelembagaan sosial dan keluarga miskin
  3. Program Pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial
- c. Angka capaian kinerja IKU Angka Pengangguran tahun 2022 sebesar 95,02 Angka tersebut telah melampaui

sebesar 14,70 apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 81,71%. Realisasi Tahun 2022 sebesar 3,21 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 3,77 turun sebesar 0,56.

Realisasi sebesar 3,21 adalah dari Perhitungan :

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka

$$\begin{aligned} \text{TPT} &= \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Anggaran KerJa}} \times 100\% \\ &= \frac{15.800}{492.030} \times 100\% \\ &= 3,21 \end{aligned}$$

Faktor yang mempengaruhi menurunnya angka pengangguran adalah

- Potensi ekonomi sudah mulai membaik setelah pandemi, perekonomian berangsur membaik yang didukung adanya peningkatan permintaan pasar, dunia usaha mulai melakukan usahanya sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja;
- Terjadi Peningkatan terhadap penyediaan lapangan kerja baik di sektor formal, informal dan jasa;
- Adanya kebijakan Pemerintah mempermudah perijinan usaha sehingga banyak tumbuh usaha-usaha baru yang akan menambah lapangan kerja baru.

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian angka pengangguran adalah :

- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja, melalui kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
- b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Kegiatan sebagai berikut :
  - Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi,
  - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja, melalui kegiatan sebagai berikut :
  - Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten / Kota;
  - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.
- d. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, melalui kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.

Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Kabupaten kudas mencapai 66.060 jiwa berkurang sebanyak 1.000 jiwa dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 67.060 jiwa.

Garis kemiskinan penduduk Kabupaten Kudus mengalami kenaikan dari 450.992 pada tahun 2021 menjadi 482.806 pada tahun 2022. Kabupaten Kudus termasuk dalam kategori 10 Kabupaten/kota Garis Kemiskinan sedang, yaitu garis kemiskinan di atas garis kemiskinan provinsi dan dibawah garis kemiskinan nasional. Sedangkan capaian Angka pengangguran pada tahun 2022 sebesar 3,21%.

Permasalahan/penyebab kegagalan

Belum tercapainya target realisasi kinerja Sasaran meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2022 dengan Penurunan angka Kemiskinan, dan penurunan angka pengangguran disebabkan karena adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan terhambatnya aktivitas ekonomi pada semua sektor.

Musibah pandemi Covid-19, menyebabkan pembatasan aktivitas masyarakat dalam berbagai bidang seperti kegiatan pembatasan mobilitas, pembatasan kegiatan hiburan dan pariwisata, serta penyelenggaraan pendidikan secara daring dari rumah telah menurunkan aktivitas ekonomi masyarakat baik pada sektor formal maupun informal. Hal ini menyebabkan jumlah masyarakat miskin dan jumlah pengangguran meningkat.

Solusi

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk kembali meningkatkan capaian kinerja Sasaran meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2022 adalah dengan menekan tingkat penyebaran Covid-19 secara komprehensif dengan pencegahan penularan dan percepatan penanganan penyembuhan pasien Covid19 sehingga Pemerintah daerah dapat membuka kembali pembatasan aktivitas masyarakat pada berbagai sektor dengan norma kehidupan yang baru. Selain itu, untuk menjaga tingkat pendapatan masyarakat tingkat bawah agar tidak semakin turun dan mengurangi jumlah masyarakat miskin, Pemerintah Daerah tetap mempertahankan program bantuan masyarakat langsung untuk masyarakat terdampak covid-19 dan mengembangkan untuk meningkatkan lapangan kerja dan ketrampilan kerja.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Kudus juga melaksanakan program-program perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pembangunan kawasan transmigrasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pendampingan Wira Usaha (PWU) dan penyelenggaraan Job Fair.

Disisi lain juga menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di Kabupaten Kudus memiliki peranan yang signifikan dalam rangka ikut memecahkan masalah pengangguran di Kabupaten Kudus.

Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkan. Apabila dibanding dengan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,57%, Kabupaten Kudus lebih baik yaitu sebesar 2,36% dan di banding Tingkat Nasional sebesar 5,86% Kabupaten Kudus masih tetap lebih baik.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 89,15% atau **Tinggi**.

Tabel 2.13  
Penduduk Miskin Kabupaten Kudus Tahun 2019 – 2022

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	58.000	64.240	67.060	66.060
2.	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,68	7,31	7,60	7,41
3.	Garis kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	406.470	429.666	450.922	482.806
4.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,83	1,01	1,23	
5.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,17	0,18	0,27	

Sumber : SIPD – BPS Tahun 2022 (rilis maret 2022)

Persentase penduduk miskin Kabupaten Kudus apabila dibandingkan dengan Kabupaten sekitar, dapat dilihat sebagaimana gambar berikut :

Grafik 2.6.  
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kudus dan Daerah Sekitar Tahun 2019-2021



Sumber : SIPD - BPS Kudus Tahun 2021

## 7. Meningkatkan daya saing investasi daerah

Realisasi Sasaran meningkatkan daya saing investasi daerah dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	Nilai Investasi	Investasi tahun n x 1.05 (n+1) dalam jutaan rupiah

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 2.14  
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Daya Saing Investasi Daerah Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun								Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2022 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020	2021			2022				
		% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Nilai Investasi	77,25	42,12	8,34 T	39,44 T	472,90	8,79 T	10,30 T	117,18	9,19 T	112,08
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	77,25	42,12			472,90			117,18		112,08

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023 dan DPMPSTP Tahun 2022 Kabupaten Kudus (data diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

### 1) Capaian kinerja sasaran tahun 2022

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 117,18%. Angka tersebut kurang sebesar 355,72% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2021 sebesar 472,90%.

Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 kelampaui sebesar 10,78 %

$$1. \text{ Nilai Investasi} \quad \frac{9,19 \text{ T} - 10,30 \text{ T}}{10,30 \text{ T}} \times 100\% = 10,78\%$$

$$\text{Rata-rata persentase (\%)} \quad \text{terhadap akhir RPJM 2023} \quad 10,78\%$$

### 2) Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU Nilai Investasi tahun 2022 sebesar 117,18%. Angka tersebut kurang sebesar 355,72% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 472,90%. Realisasi Tahun 2022 sebesar 10,30 T apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 39,44 T mengalami penurunan sebesar 29,11T

Upaya-upaya yang ditempuh melalui :

- Sosialisasi OSS versi RBA kepada para pelaku usaha dan masyarakat melalui media sosial dan tatap muka.
- Melakukan Promosi Penanaman Modal melalui Media Cetak dan media cetak (Surat Kabar).
- Melakukan pembinaan, pengawasan kepada pelaku usaha dalam memberikan pemahaman dan tanggung jawabnya dengan melakukan pelaporan LKPM

Hal ini didukung oleh program dan kegiatan dalam anggaran APBD Tahun 2022 yaitu :

- Program Promosi Penanaman Modal
- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- Program Pelayanan Penanaman Modal
- Program Pengendalian Penanaman Modal
- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 117,18% atau Sangat Tinggi

### 8. Meningkatkan infrastruktur pendukung pengembangan wilayah

Realisasi Sasaran meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya Infrastruktur pendukung pengembangan wilayah	Presentase Infrastruktur dalam kondisi mantap	Presentase jalan, Jembatan, drainase. Irigrasi dalam kondisi mantap dibagi 4

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 2.15

#### Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Pengembangan Daerah Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun								Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2022 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020	2021			2022				
		% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persentase (%) infrastruktur dalam kondisi mantap	101,26	103,06	81,72	83,60	102,30	82,72	84,86	102,59	83,73%	101,35
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	101,26	103,06			102,30			102,59		101,35

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023 dan LKJP Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2022.

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2022

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 102,59%. Angka tersebut naik sebesar 0,28% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2021 sebesar 102,30%.

Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 kelampaui sebesar 0,86 %

$$1. \text{ Persentase (\%)} \text{ infrastruktur dalam kondisi mantap} \quad \frac{83,73 - 84,86}{84,86} \times 100\% = 0,86\%$$

Rata-rata persentase (\%) terhadap akhir RPJM 2023 0,86%

2. Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU Persentase (%) infrastruktur dalam kondisi mantap tahun 2022 sebesar 102,59%. Angka tersebut naik sebesar 0,28% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 102,30%. Realisasi Tahun 2022 sebesar 84,86 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 83,60

Kondisi Infrastruktur dalam kondisi mantap Tahun 2022 di Kabupaten Kudus tercapai sebesar 84,86% dipengaruhi oleh :

- Prosentase Jalan dalam kondisi mantap	93,34%
- Prosentase Jembatan dalam kondisi mantap dan sedang	91,06%
- Prosentase Luas Irigasi dalam kondisi baik	90,02%
- Prosentase Panjang saluran Drainase perkotaan dalam kondisi baik pembuangan aliran air tidak tersumbat	<u>65,00%</u>
<b>Jumlah</b>	<b>339,42%</b>

Realisasi Kondisi Infrastruktur dalam kondisi mantap adalah:  
339,42% : 4 = 84,86%

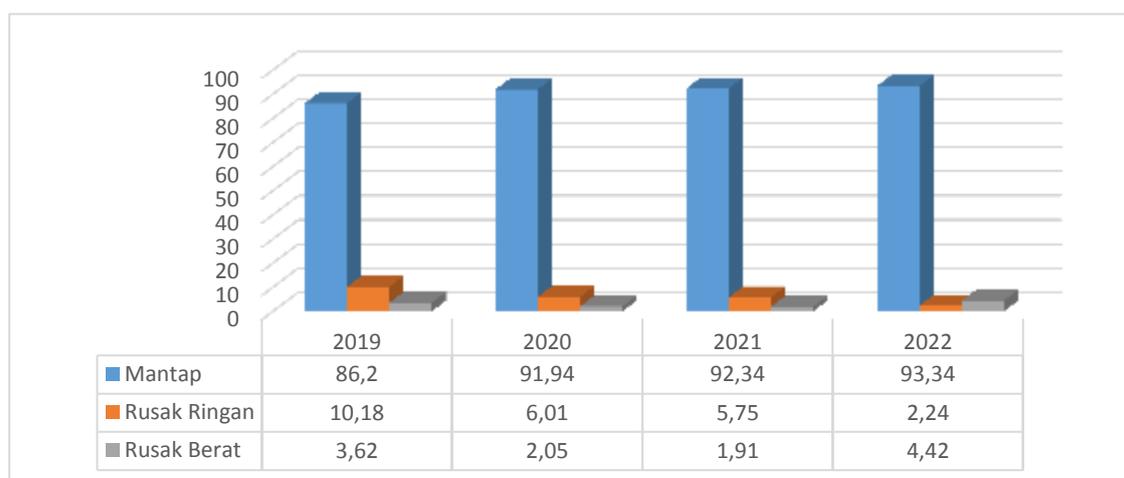
Berikut ini adalah sarana dan prasarana Jalan di Kabupaten Kudus sebagai berikut :

Tabel 2.16  
Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kudus  
Berdasarkan Kondisi Tahun 2019-2022

No.	Kondisi Jalan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021
1	Mantap	86,20	91,94	92,34	93,34
2	Rusak ringan	10,18	6,01	5,75	2,24
3	Rusak berat	3,62	2,05	1,91	4,42

Sumber data : Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2022

**Grafik 2.7.**  
**Panjang Jalan Menurut Kondisi Di Kabupaten Kudus**  
**Tahun 2019-2022**



Sumber data : Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2022

Di Kabupaten Kudus terdapat tiga penggolongan status jalan dimana masing-masing dikelola secara terpisah. Ketiganya adalah jalan Negara, jalan Provinsi dan jalan Kabupaten dengan panjang 639.261,70 km. Jalan Negara yang melewati wilayah Kabupaten Kudus adalah jalur pantura atau disebut juga jalan Daendels, yang membelah Kabupaten Kudus sepanjang 21.180 km atau 3,44 persen dari total panjang jalan. Kemudian jalan Provinsi sepanjang 54.939 km atau 7.20 persen dan ketiga jalan Kabupaten sepanjang 639.261,7 km atau 89,36 persen.

Berikut ini adalah sarana dan prasarana Jembatan Kabupaten Kudus sebagai berikut :

**Tabel 2.17**  
**Jumlah dan Kondisi Jembatan Kabupaten Kudus**  
**Tahun 2019-2022**

No.	Kondisi Jembatan	Satuan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Baik	unit	208	312	312	181
		%	58,43	87,64	87,64	42,59
2.	Sedang	unit	106	9	9	206
		%	29,78	2,53	2,53	48,47
3.	Rusak	unit	42	35	35	38
		%	11,80	9,83	9,83	8,94
<b>JUMLAH</b>		<i>unit</i>	<b>356</b>	<b>356</b>	<b>356</b>	<b>425</b>

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2022

Keberadaan sarana dan prasarana irigasi terkait langsung dengan ketersediaan sumber daya air. Sumber daya air ini mempunyai nilai yang sangat strategis dalam pembangunan

daerah di Kabupaten Kudus, terutama untuk menunjang peningkatan produksi pertanian, penyediaan air bersih di kawasan permukiman, industri, pariwisata, dan sebagainya.

Daerah irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Kudus pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.18  
Kondisi Daerah Irigasi Kabupaten Kudus  
Tahun 2019 – 2022

No	Kondisi Daerah Irigasi	Satuan	2019	2020	2021	2022
1	Baik	Ha	8.882,90	9.022,40	9.049,40	9.268,40
		%	86,28	87,64	87,90	90,02
2	Rusak Ringan	Ha	799,00	799,00	513,00	640,00
		%	7,76	7,76	4,98	6,22
3	Rusak Sedang	Ha	513,00	513,00	733,00	387,00
		%	4,98	4,98	7,12	3,76
4	Rusak Berat	Ha	100,50	-	-	-
		%	0,98	-	-	-
	Jumlah Total	Ha	10.295,40	10.295,40	10.295,40	10.295,40
	Jumlah Pembulatan	Ha	10.295	10.295	10.295	10.295
		%	100	100	100	100

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2022

Saluran drainase tahun 2018 ada Perubahan Data base Drainase menyesuaikan SK Jalan Kabupaten dengan Panjang saluran 584.280 meter dengan kondisi baik, saluran drainase Tahun 2018 sebanyak 243.349 meter dengan kondisi sedang 108.557 meter, sedangkan kondisi rusak sebanyak 232.374 meter. Untuk Tahun 2022 Panjang Saluran Drainase ada perubahan yaitu menjadi 592.692,25 meter dengan kondisi baik 44,28 % (262.437,75 m), Kondisi sedang 20,72% (122.810,00 m) sedangkan kondisi rusak 35,00% (207.444,50 m). Prosentase Drainase Kondisi mantap tahun 2021 adalah sebesar 64,00 % sedangkan Tahun 2022 adalah sebesar 65,00 % persentase ada peningkatan.

Tabel 2.19  
Kondisi Saluran Drainase Di Kabupaten Kudus  
Tahun 2019 – 2022

No	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Prosentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	60,23	63,03	64,00	65,00

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2022

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan Kondisi Infrastruktur dalam kondisi mantap Kabupaten Kudus Tahun 2022 adalah :

1. Upaya penanganan Kondisi Infrastruktur rusak ringan dan berat melalui penggantian dan pemeliharaan Infrastruktur di Kabupaten Kudus
2. Penyusunan perencanaan rehabilitasi infrastruktur untuk tahun yang akan datang sesuai dengan skala prioritas.
3. Koordinasi lintas sektor terkait dengan pemanfaatan infrastruktur yang berdampak pada beban dan kapasitas yang dapat berdampak pada kerusakan infrastruktur.

Program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya insfratraktur :

1. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum didukung oleh Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
2. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase didukung oleh Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
3. Penyelenggaraan Jalan didukung oleh Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dan Jembatan dengan Sub Kegiatan Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Pembangunan Jembatan, Rehabilitasi Jembatan

Kinerja Urusan pekerjaan Umum lainnya dapat dilihat melalui cakupan air minum perkotaan dan perdesaan serta sanitasi. Cakupan pelayanan air minum dan sanitasi sampai tahun 2021 adalah sebesar 98,25 % untuk air minum dan 100 % untuk sanitasi

Tabel 2.20  
Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Kabupaten  
Kudus Tahun 2019-2022

No	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Prosentase penduduk berakses air minum	95,37	97,03	98,00	98,25
2	Prosentase rumah tinggal bersanitasi	100	100	100	100

*Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2022*

Menurut Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus tahun 2022-2024. RTRW Kabupaten Kudus baru saja ditetapkan pada tahun 2022, sehingga capaian pelaksanaan penataan ruang sebelumnya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kudus Kinerja Penataan ruang yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kabupaten Kudus sampai pada 2021 telah tersusun 6 (enam) RDTR Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perkotaan dan 2 (dua) RDTR Kawasan Strategis Kabupaten. Selain penyusunan rencana rinci, pada tahun 2017 hingga tahun 2022 telah dilaksanakan Revisi Dokumen RTRW Kabupaten Kudus. Cakupan pelayanan ketaatan penataan ruang di Kabupaten Kudus selalu 100% setiap tahunnya. Hasil cakupan penataan ruang Kabupaten Kudus konstan dari tahun ke tahun sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.21  
Cakupan Pelayanan Penataan Ruang Kabupaten Kudus  
Tahun 2019-2022

No	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Persentase Ketaatan Rencana Tata Ruang	100	100	100	100

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2022

Sedangkan Urusan pertanahan dan penataan Ruang Kabupaten Kudus bekerja sama dengan BPN Kabupaten Kudus. Capaian persentase luas tanah bersertikat di tahun 2021 yaitu 80,00 % sedangkan target di tahun 2022 persentase luas tanah bersertikat 73,19 % capaian 80,78 % target terlampaui sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.22  
Database Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP)  
Kabupaten Kudus Tahun 2019-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2019	2020	2021	2022
1	Luas Wilayah daratan Kabupaten Kudus	ha	42.515,64	42.515,70	42.516,00	
2	Luas tanah Bersertipikat HGB	ha	776,22	740,5199	714,00	
3	Persentase luas tanah Bersertipikat HGB	ha	1,83	1,74	2,00	
4	Luas tanah Bersertipikat HP	ha	2.296,87	3.606,9167	5.417,00	
5	Persentase luas tanah	ha	5,40	8,48	13,00	

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2019	2020	2021	2022
	Bersertipikat HP					
6	Luas tanah Bersertipikat HM	ha	28.662,38	27.401,22 64	27.812,00	
7	Persentase luas tanah Bersertipikat HM	ha	67,42	64,45	65,00	
8	Luas tanah Bersertipikat HW	ha	41,82	62,0062	84,00	
9	Persentase luas tanah Bersertipikat HW	ha	0,10	0,15	0,2	
10	Total Luas tanah Bersertipikat	ha	31.777,29	31.810,669 7	34.027	
11	Persentase luas tanah Bersertipikat	ha	74,74	74,80	80,00	80,78

Sumber data : BPN Kabupaten Kudus, Dinas PUPR Kabupaten Kudus Tahun 2022

Faktor pendorong dari naiknya indeks kualitas Pencapaian sasaran meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan daerah ini dilaksanakan melalui :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional.
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
5. Program Pengeloaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
6. Program Penataan Bangunan Gedung.
7. Program Penyelenggaraan Jalan.
8. Program Perencanaan dan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang.
9. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.
10. Program Penatagunaan Tanah.
11. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Adapun permasalahan pada peningkatan infrastruktur pendukung pengembangan daerah adalah :

1. Banyaknya tuntutan masyarakat untuk membangun dan memelihara jalan, jembatan serta sarana irigasi melebihi program/kegiatan yang telah ditetapkan Alokasi dana yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur sangat terbatas dan tidak sebanding dengan banyaknya tuntutan masyarakat akan pembangunan Sumber daya manusia yang terbatas, baik dari segi jumlah maupun kemampuannya/ profesionalismenya.
2. Sumber daya manusia yang terbatas, baik dari segi jumlah maupun kemampuannya/profesionalismenya.

3. Peran serta masyarakat masih sangat rendah terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, jembatan dan saluran irigasi sehingga mengakibatkan banyaknya sarana dan prasarana yang telah dibangun menjadi cepat rusak (tidak tahan lama).
4. Faktor usia jalan dan intensitas maupun tonase kendaraan yang melebihi kekuatan kelas jalan, sehingga mengakibatkan kerusakan jaringan jalan dan jaringan irigasi yang cukup banyak dan diperlukan dana yang cukup besar untuk memperbaikinya.

Strategi untuk peningkatan infrastruktur dalam kondisi mantap yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan provinsi Jawa Tengah untuk mendukung dana pembangunan di Kabupaten Kudus, baik itu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Bantuan Keuangan Provinsi maupun sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menetapkan skala prioritas program/kegiatan untuk mengakomodir tuntutan masyarakat.
3. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman aparat pelaksanaan (sumber daya manusia agar lebih professional, diantaranya dengan diikutkan dalam pelatihan, kursus, dan lain-lain.
4. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk ikut serta menjaga dan merawat sarana dan prasarana infrastruktur yang telah dibangun, sehingga tidak mudah rusak.

#### **Solusi :**

Adapun solusi dari permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pekerjaan yang masih perlu penanganan diusulkan pada tahun berikutnya.
2. Perlunya pendekatan persuasif yang lebih intensif kepada masyarakat yang terkena dampak pelebaran jalan.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 102,59 % atau **Sangat tinggi**

#### **9.Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan**

Realisasi Sasaran meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan dapat diukur dengan

Indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1.	Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Rata-rata indeks kualitas air, Indeks kualitas udara dan Indeks tutupan lahan dibagi 3

Sumber data : Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019

Tabel 2.23  
Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun								Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2022 terhadap target akhir 2023 (%)
		2019	2020	2021			2022				
		% Capaian	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	101,22	100,84	65,34	62,76	96,05	66,57	54,88	82,45	67,77	80,98
	Rata-rata persentase (%) capaian kinerja	101,22	100,84			96,05			82,45		80,98

Sumber data : RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023 dan LKjIP Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran Strategis sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2022

Capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 82,45%. Angka tersebut turun sebesar 13,60% dari capaian kinerja rata-rata sasaran tahun 2021 sebesar 96,05%.

Dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2023 masih kurang sebesar 23,49 %

2. Capaian kinerja IKU

Angka capaian kinerja IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2022 sebesar 82,45%. Angka tersebut kurang sebesar 13,60% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2021 sebesar 96,05%. Realisasi Tahun 2022 sebesar 54,88 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 62,76 mengalami penurunan sebesar 7,88 dan angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,47% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 80,98%.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus Tahun 2022 dipengaruhi oleh :

1. Indeks Kualitas Air dengan nilai 47,00 dengan bobot pengaruh IKLH sebesar 37,60%

2. Indeks Kualitas Udara dengan nilai 79,47 dengan bobot pengaruh IKLH sebesar 40,50%
3. Indeks Tutupan Lahan dengan nilai 58,90 dengan bobot pengaruh IKLH sebesar 21,90%

Sehingga dari faktor diatas diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

No.	Indeks	Nilai	Bobot	Realisasi
1.	Indeks Kualitas Air	43,75	37,60%	16,45%
2.	Indeks Kualitas Udara	79,63	40,50%	32,25%
3.	Indeks Tutupan Lahan	28,22	21,90%	6,18%

Dengan rumus sebagai berikut :

$$(\text{Bobot} \times \text{IKA}) + (\text{Bobot} \times \text{IKU}) + (\text{Bobot} \times \text{ITL}) = \text{Realisasi}$$

$$(37,60\% \times 43,75) + (40,50\% \times 79,63) + (21,90\% \times 28,22) = 54,88$$

Faktor yang menyebabkan kegagalan tidak tercapainya kinerja IKLH Kabupaten Kudus Tahun 2022

1. Faktor yang menjadi penghambat dalam pemenuhan target IKA yaitu adanya pandemic Covid 19 dimana Kabupaten Kudus mengalami dampak besar pada awal dan pertengahan Tahun 2022, sehingga mempengaruhi kebiasaan dan perilaku masyarakat dalam menjaga kesehatan dan kebersihan. Perilaku pemenuhan protokol kesehatan berupa mencuci tangan pakai sabun mempengaruhi kualitas air permukaan di Kabupaten Kudus, sehingga menurunkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA ) Tahun 2022.
2. Faktor yang yang menjadi penghambat indeks kualitas udara adalah dengan adanya pandemi covid-19 mempengaruhi perilaku menjaga jarak dengan orang lain, berpengaruh terhadap pilihan moda transportasi yang digunakan untuk mobilitas masyarakat. Masyarakat memilih menggunakan kendaraan pribadi selama masa pandemic untuk menghindari berdekatan dengan orang lain dalam satu moda transportasi individu menyebabkan penurunan kualitas udara sehingga berpengaruh terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2022.

Program dan kegiatan untuk meningkatkan capaian IKLH :

1. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi penurunan kualitas air yaitu melaksanakan pengawasan secara rutin kepada pemilik persetujuan lingkungan dan segera menindaklanjuti pengaduan terkait pencemaran lingkungan.

2. Upaya dilaksanakan untuk mengurangi menurunkan kualitas udara yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pemilik persetujuan lingkungan.
3. Upaya untuk peningkatan Kualitas Tutupan Lahan yaitu dengan melaksanakan penanaman pohon dilahan Tahura untuk konservasi lahan kritis.

Analisa /Faktor pendukung keberhasilan

Dari capaian kinerja IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2022 sebesar 82,45% diatas, sebagaimana formula penghitungan, pencapaian IKU IKLH dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagaimanan tabel berikut:

Tabel 2.24  
Capaian Indikator IKA, IKU dan IKTL Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2022			% capaian Tahun 2020	% capaian Tahun 2021	Target akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2022 terhadap target akhir (2023)
		Target	Realisasi	% Capaian				
1	Indeks Kualitas Air	50,85	43,75	86,03%	100,02%	97,07%	50,85	92,43%
2	Indeks Kualitas Udara	93,92	79,63	84,78%	100,07%	86,86%	93,92	84,61%
3	Indeks Tutupan Lahan	60,85	28,22	40,37%	102,27%	99,67%	60,85	95,69%

Sumber : Dinas PKPLH Kab. Kudus

Indeks kualitas air

Angka capaian Indeks Kualitas Air tahun 2022 sebesar 86,03%. Realisasi Tahun 2022 sebesar 43,75 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 47,00 mengalami penurunan sebesar 3,25 dan angka tersebut telah melampaui sebesar 6,39% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 92,43%. Indeks kualitas udara.

Angka capaian Indeks Kualitas Udara tahun 2022 sebesar 84,78%. Realisasi Tahun 2022 sebesar 79,63 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 86,86 mengalami penurunan sebesar 7,23 dan angka tersebut telah melampaui sebesar 0,17% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 84,61%. Indeks tutupan lahan.

Angka capaian Indeks Tutupan Lahan tahun 2022 sebesar 40,37%. Realisasi Tahun 2022 sebesar 28,22 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 58,23 mengalami penurunan sebesar 30,01 dan angka tersebut mengalami penurunan sebesar 55,32% terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 95,69%.

Permasalahan :

Dengan adanya Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021, terhadap baku mutu referensi yang tidak sama dengan baku mutu kualitas ambien, sehingga perhitungan menggunakan baku mutu referensi yaitu angka 40 untuk NO<sub>2</sub> dan angka 20 untuk SO<sub>2</sub>.

Solusi

Perlunya sosialisasi kepada pemilik persetujuan dan koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk mengawasi lebih ketat lagi terhadap ambang batas NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub>.

Efektifitas dan Efisiensi

Dari uraian program dan kegiatan diatas dapat dilihat bahwa pencapaian sasaran meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dikatakan efektif dan efisien, karena program dan kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran dalam mencapai sasaran tersebut dan anggaran yang digunakan juga lebih sedikit dari target pagu anggaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran adalah 82,45% atau kategori **tinggi**.

Dalam rangka untuk mencapai 9 sasaran yang mendukung Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kudus telah mengalokasikan Anggaran sebesar Rp. 3.066.454.926.512,- untuk 120 program. Realisasi Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2022 untuk mendukung 20 IKU sebesar Rp. 2.408.590.117.353,-

Hasil Analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.25  
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harapan Lama Sekolah</li> <li>• Rata-rata lama sekolah</li> <li>• Persentase (%) akses dan mutu pendidikan</li> </ul>	Pengelolaan Pendidikan	74,16%	74,16%	197.021.608.078	187.360.104.708	95,10%	4,90%
			Pengendalian Perijinan Pendidikan	1 Tahun	1 Tahun	75.000.000	43.425.000	57,90%	42,10%
			Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	95,00%	95,00%	3.124.450.159	3.033.234.942	97,08%	2,92%
			Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	92,00%	92,00%	13.539.501.170	13.386.332.702	98,87%	1,13%
			Pembinaan Perpustakaan	8,70%	1,69%	30.950.000	30.829.000	99,61%	0,39%
			Pengelolaan arsip	22,58%	16,28%	330.512.882	300.189.351	90,83%	9,17%
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka Harapan Hidup</li> <li>• Angka Kematian Ibu</li> <li>• Angka Kematian Bayi</li> </ul>	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100,00%	100,00%	95.003.998.344	65.560.027.047	69,01%	30,99%
			Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	92,30%	92,30%	809.200.300	592.406.911	73,21%	26,79%
			Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	91,30%	91,30%	384.158.665	228.353.600	59,44%	40,56%
			Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100,00%	100,00%	1.253.305.800	1.060.967.418	84,65%	15,35%
			Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100,00%	100,00%	385.587.076.909	309.524.135.510	80,27%	19,30%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	100,00%	61,54%	2.197.500.000	917.500.084	41,75%	58,25%
			Pemberdayaan Sosial	85,00%	85,00%	161.999.920	153.994.698	95,06%	4,94%
			Rehabilitasi Sosial	30,47%	43,69%	2.004.881.090	1.894.855.903	94,51%	5,49%
			Perlindungan dan Jaminan Sosial	41,36%	46,49%	87.442.547.300	86.273.620.600	98,66%	1,34%
			Penangan bencana	100,00%	100,00%	56.999.030	37.706.000	66,15%	33,85%
			Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100,00%	100,00%	55.566.000	45.244.840	81,43%	18,57%
			Pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan	87,00%	92,00%	649.999.411	483.627.900	74,40%	25,60%
			Perlindungan perempuan	100,00%	100,00%	24.998.236	17.214.500	68,86%	31,14%
			Pengelolaan sistem data gender dan anak	85,80%	85,80%	9.999.280	6.204.800	62,05%	37,95%
			Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100,00%	100,00%	239.999.200	223.338.440	93,06%	6,94%
			Perlindungan khusus anak	100,00%	100,00%	86.277.100	48.602.700	56,33%	43,67%
			Pengendalian penduduk	100,00%	100,00%	170.075.000	62.475.062	36,73%	63,27%
			Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	85,00%	75,05%	4.461.711.000	2.634.057.398	59,13%	40,87%
			Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	13,30%	15,69%	3.862.546.800	683.761.950	17,70%	82,30%
3.	Meningkatnya Kemampuan Konsumsi Masyarakat	• Kemampuan konsumsi rumahtangga perkapita (ribu rupiah/org/th)	Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	100,00%	107,00%	3.009.941.740	3.009.136.000	99,97%	0,03%
			Peningkatan difersifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	100,00%	107,00%	508.599.800	494.542.385	97,24%	2,76%
			Penanganan kerawanan pangan	95,00%	100,00%	15.000.000	11.161.740	74,41%	25,59%
			Pengawasan Keamanan Pangan	89,00%	86,50%	19.999.810	17.121.950	85,61%	14,39%
			Pengelolaan Perikanan Budidaya	98,90%	98,90%	503.599.654	491.103.140	97,52%	2,48%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	98,90%	98,90%	61.199.750	54.579.880	89,18%	10,82%
			Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	98,52%	102,10%	10.000.000	9.975.000	99,75%	0,25%
			Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	98,52%	102,10%	8.425.204.082	8.124.057.660	96,43%	3,57%
			Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	95,24%	86,01%	937.541.720	804.305.790	85,79%	14,21%
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	98,52%	102,00%	222.850.000	218.228.116	97,93%	2,07%
			Penyuluhan Pertanian	98,52%	102,00%	1.319.863.352	1.161.955.484	88,04%	11,96%
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Reformasi Birokrasi</li> <li>• Nilai Akutabilitas Kinerja</li> <li>• Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)</li> <li>• Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</li> <li>• Indeks Kepuasan Masyarakat</li> </ul>	Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	85 Nilai	69,21 Nilai				
				81 Nilai	71,13 Nilai				
				WTP	WTP				
				2,68 Indeks	3,38 Indeks				
				83,5 Indeks	88,31 Indeks				
			Pendaftaran penduduk	100,00%	98,26%	2.409.296.820	2.229.341.539	92,53%	7,47%
			Pelayanan pencatatan sipil	100,00%	98,49%	912.713.383	874.732.176	95,84%	4,16%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	100,00%	100,00%	932.929.760	858.036.129	91,97%	8,03%
			Pengembangan Kebudayaan	67,00%	108,00%	1.114.999.470	1.035.366.561	92,86%	7,14%
			Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	19,00%	48,00%	110.099.628	102.064.400	92,70%	7,30%
			Pengelolaan Permuseuman	19,00%	48,00%	3.815.799.882	3.797.548.044	99,52%	0,48%
			Peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata	8,00%	8,00%	3.900.248.219	3.821.950.762	97,99%	2,01%
			Pemasaran Pariwisata	14,00%	14,00%	1.625.000.000	1.283.678.250	79,00%	21,00%
			Pengembangan sumber daya pariwisata dan Ekonomi kreatif	5,00%	5,00%	15.000.000	14.580.000	97,20%	2,80%
			Penataan desa	3 desa	3 desa	1.702.068.990	1.442.722.185	84,76%	15,24%
			Peningkatan kerjasama desa	1 produk hukum kawasan perdesaan	1 produk hukum kawasan perdesaan	99.999.960	87.810.700	87,81%	12,19%
			Administrasi pemerintahan desa	20,00%	20,00%	2.843.966.955	2.233.252.004	79,53%	20,47%
			Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	75,00%	75,00%	695.737.730	597.465.150	85,88%	14,12%
			Kepegawaian Daerah	85,60%	75,60%	4.068.816.140	3.077.716.550	75,64%	24,46%
			Pengembangan sumber daya manusia	7,20%	6,70%	1.240.087.340	849.631.620	68,51%	31,49%
			Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100,00%	100,00%	2.832.266.820	2.317.934.206	81,84%	18,16%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100,00%	100,00%	322.440.000	298.981.399	92,72%	7,28%
			Penelitian dan pengembangan daerah	86,00%	86,00%	335.670.000	321.293.673	95,72%	4,28%
			Pengelolaan keuangan daerah	100,00%	100,00%	289.212.262.745	278.011.715.804	96,13%	3,87%
			Pengelolaan barang milik daerah	95,00%	99,94%	3.515.054.930	3.341.050.859	95,05%	4,95%
			Pengelolaan pendapatan daerah	100,00%	96,10%	2.287.512.735	2.144.408.498	93,74%	6,26%
			Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100,00%	88,95%	37.519.907.000	20.654.865.131	55,05%	44,95%
			Penyelenggaraan pengawasan	100,00%	100,00%	454.347.180	279.910.250	61,61%	38,39%
			Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	95,00%	95,00%	690.337.900	457.101.549	66,21%	33,79%
			Informasi dan komunikasi publik	100,00%	100,00%	11.770.472.985	11.535.654.177	98,01%	1,99%
			Aplikasi informaiika	2,70 indeks	3,49 indeks	2.748.160.988	2.512.901.277	91,44%	8,56%
			Penyelenggaraan statistik sektoral	100,00%	100,00%	67.382.600	57.289.080	85,02%	14,98%
			Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	18,00%	82,00%	111.596.660	46.630.579	41,78%	58,22%
			Penanggulangan Bencana	100,00%	100,00%	1.015.834.540	987.989.564	97,26%	2,74%
			Penanganan Bencana	100,00%	100,00%	32.241.200	29.845.348	92,57%	7,43%
5.	Meningkatnya Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Serta Toleransi Umat Beragama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Rasa Aman</li> <li>• Indeks Toleransi</li> </ul>	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	80,33%	97,24%	2.114.076.820	2.043.177300	96,65%	3,35%
			Pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran	92,50%	100,00%	996.220.000	991.162.770	99,49%	0,51%
			Penguatan idiologi pancasila dan karakter kebangsaan	100,00%	100,00%	1.207.496.585	1.086.370.210	89,97%	10,03%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta kebudayaan politik	100,00%	100,00%	2.398.484.300	2.394.584.000	99,84%	0,16%
			Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100,00%	100,00%	235.367.100	218.937.700	93,02%	6,98%
			Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100,00%	100,00%	147.896.771	132.601.000	89,96%	10,34%
			Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	100,00%	100,00%	123.923.390	104.550.000	84,37%	15,63%
6.	Meningkatnya Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PDRB Perkapita (Juta Rupiah)</li> <li>• Angka Kemiskinan</li> <li>• Angka Pengangguran</li> </ul>	Peningkatan sarana distribusi perdagangan	90,00%	90,00%	7.489.361.663	1.081.653.200	14,44%	35,58%
			Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	95,00%	94,34%	5.351.203.128	20.754.900	0,39%	99,61%
			Pengembangan ekspor	1.625.069.000.000	1.201.260.876.000	1.625.069.000.000	1.201.260.876.000	73,92%	26,08%
			Standarisasi dan perlindungan konsumen	90,00%	75,00%	68.433.000	55.007.300	80,38%	19,62%
			Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	60,00%	40,00%	77.375.000	65.644.800	84,84%	15,16%
			Perencanaan tenaga kerja	0,3%	0,30%	9.999.520	9.071.000	90,71%	9,29%
			Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja	0,04%	0,70%	16.169.624.980	7.680.877.403	47,50%	52,50%
			Penempatan tenaga kerja	48,00%	47,62%	89.999.480	75.165.928	83,52%	16,48%
			Hubungan industrial	100,00%	100,00%	78.929.911	78.609.900	99,47%	0,53%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Pendidikan dan latihan perkoperasian	88,75%	88,75%	454.199.480	418.096.100	92,05%	7,95%
			Pemberdayaan usaha menengah usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	0,70%	0,30%	2.174.999.900	2.093.635.100	96,26%	3,74%
			Pengembangan UMKM	5,50%	5,16%	1.523.585.480	904.717.900	59,38%	40,62%
			Perencanaan dan pembangunan industri	0,35%	0,37%	55.962.895.432	8.291.758.393	14,82%	85,18%
			Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	30,00%	30,77%	5.000.000	2.884.000	57,68%	42,32%
			Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	25,00%	25,35%	5.000.000	3.284.000	65,68%	34,32%
			Pembangunan kawasan transmigrasi	100,00%	100,00%	5.000.000	5.000.000	100,00%	0,00%
7.	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	• Nilai Investasi	Pengembangan iklim penanaman modal	100,00%	100,00%	63.998.780	52.502.500	82,04%	17,96%
			Promosi penanaman modal	8,00%	-34,00%	238.999.270	220.786.000	92,38%	7,62%
			Pelayanan penanaman modal	67,50%	78,80%	5.945.668.100	5.418.810.592	91,14%	8,86%
			Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	3,30%	0,81%	439.537.000	312.224.200	71,03%	28,97%
			Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100,00%	100,00%	125.377.500	104.862.900	83,64%	16,36%
			Pengelolaan energi baru terbarukan	100,00%	100,00%	1.950.000	1.950.000	100,00%	0,00%
8.	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Pengembangan Wilayah	• Persentase (%) Insfrastruktur Dalam Kondisi Mantap	Pengelolaan sumber daya air (SDA)	84,00%	90,02%	12.461.875.603	11.994.419.510	96,25%	3,75%
			Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	99,00%	98,25%	3.490.099.000	2.866.410.800	82,13%	17,87%
			Pengembangan sistem dan pengelolaan sampah regional	50,00%	50,00%	3.082.329.400	3.072.630.000	99,69%	0,31%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	100,00%	100,00%	20.000.000	6.416.000	32,08%	67,92%
			Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	65,00%	65,00%	7.619.999.956	7.257.656.928	95,24%	4,76%
			Penataan bangunan gedung	55,00%	55,00%	2.629.999.920	2.320.130.220	88,22%	11,78%
			Penyelenggaraan jalan	89,63%	93,13%	58.602.787.940	56.047.914.653	95,64%	4,36%
			Penyelenggaraan penataan ruang	100,00%	100,00%	385.000.000	330.943.521	85,96%	14,04%
			Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	73,19%	80,78%	53.262.000	16.081.600	30,16%	69,81%
			Penatagunaan tanah	100,00%	100,00%	371.738.000	222.754.240	59,92%	40,08%
			Penyelenggaraan Lalu lintas dan angkutan jalan	100,00%	100,00%	4.656.303.900	4.455.815.035	95,69%	4,31%
9.	Meningkatnya Kesimbangan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Pengembangan perumahan	99,40%	99,07%	1.103.755.500	1.037.551.267	94,00%	6,00%
			Kawasan permukiman	0,04%	0,02%	23.280.000	12.657.500	54,37%	45,63%
			Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	98,80%	98,59%	39.432.534.992	38.239.561.745	96,97%	3,03%
			Perencanaan Lingkungan Hidup	62,55%	41,44%	77.999.474	74.987.100	96,14%	3,86%
			Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	69,30%	59,42%	176.392.000	162.971.939	92,39%	7,61%
			Pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	8,19%	8,11%	3.885.191.200	3.586.128.733	92,30%	7,70%
			Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	73,00%	75,05%	4.000.000	2.701.000	67,53%	32,48%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KINERJA		ANGGARAN			EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
			Pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	42,00%	79,12%	15.700.000	13.086.700	83,35%	16,65%
			Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	20,00%	36,17%	25.000.000	22.261.700	89,05%	10,95%
			Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	20,00%	36,17%	57.300.000	35.193.276	61,42%	38,58%
			Penanganan pengaduan lingkungan hidup	43,00%	79,12%	10.070.000	7.039.600	69,91%	30,09%
			Pengelolaan persampahan	73,00%	75,06%	7.668.791.195	7.366.783.402	96,06%	3,94%
			Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	0,40%	10,00%	7.000.000	6.720.115	96,00%	4,00%
			JUMLAH			3.066.454.926.512	2.408.590.117.353	78,55%	21,45%

Efisiensi penggunaan anggaran dapat kita lihat dengan memperbandingkan capaian kinerja sasaran dan realisasi anggaran, Tahun 2022 Capaian Kinerja 99,01%, sedangkan Realisasi Anggaran sebesar 78,14%, dengan demikian maka katagori pelaksanaan anggaran adalah Efisien sebesar 23,26%. Dimana Capaian Kinerja sasaran rata-rata mencapai diatas Realisasi anggaran.

Secara umum Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran 2022 dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, kinerjanya dikategorikan Sangat tinggi (nilai  $91\% \leq 100\%$ ), Tinggi (nilai  $79\% \leq 90\%$ ), Sedang (nilai  $66\% \leq 75\%$ ), Rendah (nilai  $51\% \leq 65\%$ ) dan Sangat Rendang (nilai  $\leq 50\%$ ), sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Sesuai dengan ikhtisar hasil pengukuran capaian kinerja terhadap 9 sasaran strategis dimaksud, capaian kinerja dalam kategori sangat tinggi sebanyak 6 sasaran dan dalam kategori tinggi sebanyak 3 sasaran.

Berkaitan hal tersebut, berikut ini disampaikan ikhtisar hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.26  
Ikhtisar hasil pengukuran capaian kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Kategori
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan	97,00%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	83,06 %	Tinggi
3.	Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat	100,00 %	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	115,94%	Sangat Tinggi
5.	Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama	131,13%	Sangat Tinggi
6.	Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	89,15%	Tinggi
7.	Meningkatnya daya saing investasi daerah	117,18%	Sangat Tinggi
8.	Meningkatnya infrastruktur pendukung pengembangan wilayah	102,59%	Sangat Tinggi
9.	Meningkatnya keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan	82,45%	Tinggi

**PENGHARGAAN YANG DIRAIH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022**

NO	TANGGAL	PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	FOTO / PIAGAM
1.	17 Januari 2022	Kepala Daerah yang Mendukung Gerakan Zakat	Badan Amil Zakat (Baznas) Award	

<b>NO</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>PENGHARGAAN</b>	<b>PEMBERI PENGHARGAAN</b>	<b>FOTO / PIAGAM</b>
2.	23 Mei 2022	Meraih WTP Sepuluh kali Berturut-Turut	BPK-RI Perwakilan Jawa Tengah	
3.	24 Juni 2022	Keterbukaan Informasi Publik Terbaik	Radar Kudus Award 2022	
4.	20 Juli 2022	Penghargaan Nirwasita Tantra Kementerian LH	Kementerian LH	
5.	27 Juli 2022	Kepala Daerah Inovatif 2022	Suara Merdeka Network	
6.	21 September 2022	Universal Health Coverage (UHC)	BPJS Kesehatan Kudus	
7.	26 Oktober 2022	Excellent Public Communication	Indonesia Awards 2022	
8.	6 Desember 2022	SAKIP dengan predikat BB dari Kementerian PAN RB	Kementerian PAN RB	

NO	TANGGAL	PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	FOTO / PIAGAM
9.	12 Desember 2022	Kabupaten Peduli HAM dari Kementerian KumHAM	Kementerian KUMHAM	
10.		Perpustakaan Kabupaten/ Kota Terbaik dalam Program Tranformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial		
11.	16 Desember 2022	Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi kategori "Menuju Informatif "	Komisi Informasi	
12.		Penyaji Terbaik Pentas Seni secara virtual Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah dari Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah		
13.	20 Desember 2022	Garnas Buana Award	Kemendagri	
14.	20 Desember 2022	Universal Health Care (UHC)	BPJS Kesehatan	
15.	22 Desember 2022	Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 Zona Hijau (Kualitas Tertinggi)	Ombudsman RI	

**BAB III**  
**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Prinsip Keuangan Negara menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Tugas Pembantuan mempunyai peran strategis untuk melaksanakan tiga fungsi ekonomi Pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan bagian dari APBN yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga. Pada umumnya dipertanyakan adanya kegiatan yang bersumber dari APBN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Hal ini disebabkan penulisan nomenklatur Dekonsentrasi selalu dibarengi dengan Tugas Pembantuan.

Tugas Pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kudus tidak mendapatkan tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat (Kementerian) maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (NIHIL), sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1.  
Tugas Pembantuan dan Penugasan yang Diterima Kabupaten Kudus  
Tahun Anggaran 2022

NO	K/L	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANAAN TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
- NIHIL -											

**BAB IV**  
**PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR MINIMAL**

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pendidikan di Kabupaten Kudus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus. Jenis Pelayanan Dasar yang dilaksanakan pada Urusan Pendidikan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, meliputi :

- a. Pendidikan Dasar;
- b. Pendidikan Kesetaraan;
- c. Pendidikan Anak Usia Dini

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Pelaksanaan target pemenuhan SPM pada Urusan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut :

Tabel 4.1  
Target Capaian SPM Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Anggaran	Waktu
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100% (27.722)	2,720,482,447	1 Tahun
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100 % (127.597)	2,142,274,375	1 Tahun
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100% (3.003)	679,998,752	1 Tahun

Sebagaimana tabel di atas, target dan realisasi pemenuhan SPM Urusan Pendidikan di Kabupaten Kudus terdiri atas 3 jenis pelayanan dasar, yaitu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan.

Pada Tahun 2022, capaian layanan Pendidikan Anak Usia Dini untuk usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam

pendidikan PAUD mencapai 83,1%. Hal ini relatif menurun dibandingkan dengan capaian Tahun 2021, yakni sebesar 83,89 %. Penurunan tersebut terjadi karena adanya refocussing anggaran di tahun 2022.

Kemudian, untuk capaian layanan Pendidikan Dasar untuk usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs) pada Tahun 2022 mencapai 98,34% meningkat cukup signifikan dibandingkan Tahun 2021 yang berada di angka 93,23%. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terkait Pendidikan Dasar sudah cukup baik dan Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus berhasil mengatasi kendala dan permasalahan yang ada.

Selanjutnya, capaian layanan Pendidikan Kesetaraan pada usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan pada tahun 2022 mencapai 54,68%. Capaian ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan sebelumnya pada Tahun mengindikasikan upaya Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat yang belum berhasil menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah sudah cukup baik, disamping kesadaran masyarakat yang semakin baik

#### 4.1.3 Realisasi

Realisasi SPM pada Urusan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut :

Tabel 4.2  
Realisasi SPM Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100% (27.722)	83,11 % (23.041)	1 Tahun
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100 % (127.597)	98,34 % (125.477)	1 Tahun
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7- 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100% (3.003)	54,68% (1.642)	1 Tahun

#### 4.1.4 Alokasi Anggaran

Adapun untuk dukungan anggaran dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Pendidikan ada dalam table dibawah ini:

Tabel 4.3  
Alokasi Anggaran

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sumber Dana
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah warga Negara usia 5-6 berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	2,720,482,447	2,389,605,225	APBN APBD
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga Negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi (SD/MI, SMP/MTs)	2,142,274,375	2,070,274,375	APBN APBD
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dsalam pendidikan kesetaraan	679,998,752	635,823,500	APBN APBD

#### 4.1.5 Dukungan Personil

Dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Pendidikan sebagaimana tersebut di atas, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dukungan dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan jenis pelayanan dasar pendidikan sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini terdiri dari 2.750 personil;
2. Pendidikan Dasar terdiri dari 9.031 personil;
3. Pendidikan Kesetaraan terdiri dari 409 personil.

#### 4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan pemenuhan standar pelayanan minimal Urusan Pendidikan, ditemukan beberapa kendala permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut :

##### a) Permasalahan

- Data jumlah penduduk hasil konsolidasi belum dirilis pada awal tahun, sehingga penghitungan kebutuhan tidak dapat dilakukan secara akurat dan berimbas pada penentuan target dalam dokumen perencanaan;
- Beberapa kegiatan belum terlaksana maksimal karena adanya refocussing anggaran di tahun 2022.

- b) Solusi
- Harus dilakukan perhitungan secara merinci dan didukung dengan data yang akurat agar tidak terjadi kesalahan
  - Penentuan target dilakukan dengan metode *forecasting*.

## 4.2 Urusan Kesehatan

### 4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Urusan Wajib Kesehatan di Kabupaten Kudus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah dr Loekmonohadi, meliputi Jenis Pelayanan Dasar:

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- b. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan Kesehatan Balita;
- e. Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar;
- f. Pelayanan Kesehatan Pada usia Produktif;
- g. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Millitus;
- i. Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi;
- j. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan Jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang dengan TB;
- l. Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko HIV.

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah Pelaksanaan target pemenuhan SPM pada Urusan Kesehatan di Kabupaten Kudus yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.4  
Target Capain SPM Urusan Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Anggaran	Waktu
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % (15.066)	2,135,980,750	1 Tahun
2.	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100 % (13.661)	593,091,000	1 Tahun
3.	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % (13.600)	245,246,500	1 Tahun
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % (68.108)	1,118,561,600	1 Tahun

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Anggaran	Waktu
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	Persentase usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 % (126.004)	882,249,600	1 Tahun
6.	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 % (576.104)	58,869,800	1 Tahun
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Persentase usia lanjut yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 % (88.188)	763,919,325	1 Tahun
8.	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Millitus	Persentase penderita <i>Diabetes Mellitus</i> yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 % (17.933)	269,880,000	1 Tahun
9.	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 % (231.173)	47,425,000	1 Tahun
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan Jiwa berat	Persentase ODGJ gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 % (2.166)	59,586,000	1 Tahun
11.	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100 % (10.995)	309,529,995	1 Tahun
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko HIV	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/ preventif	100 % (18.935)	309,529,995	1 tahun

Sebagaimana tampak pada tabel di atas, target dan realisasi pemenuhan SPM Urusan Kesehatan di Kabupaten Kudus terdiri atas 12 jenis pelayanan dasar, dengan gambaran capaian sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil di Kabupaten Kudus pada tahun 2022 mencapai 95%. Capaian ini meningkat tipis dari sebelumnya pada tahun 2021 yakni 94,86%, dan dipandang sudah cukup baik penerapannya. Hal tersebut mengindikasikan layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sudah cukup baik namun masih bisa ditingkatkan lagi, melalui edukasi untuk meningkatkan kesadaran ibu hamil untuk mendapatkan layanan kesehatan. Tetapi pada Tahun 2022 masih ada kasus kematian bayi dalam kandungan sebelum mendapatkan layanan kesehatan KN-3.

2. **Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**  
Untuk capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin pada tahun 2022 mencapai 100%. Artinya pelayanan kesehatan Ibu Bersalin di Kabupaten Kudus sudah optimal, kesadaran masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan juga sudah sangat baik.
3. **Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**  
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar oleh Pemerintah Kabupaten Kudus mencapai angka 99%. Capaian ini relatif tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan capaian pada tahun 2021 yakni 98,63% dan dipandang sudah cukup baik.
4. **Pelayanan Kesehatan Balita**  
Berbeda pada tahun sebelumnya, capaian Pelayanan Kesehatan Balita di Kabupaten Kudus pada Tahun 2021 berada di angka 82,90%. Kemudian di tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kudus berhasil mendorong Pelayanan Kesehatan Balita hingga mencapai angka 92%. Peningkatan tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Kudus dalam mendukung program nasional guna penurunan angka stunting.
5. **Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**  
Capaian Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar di tahun 2022 mencapai angka 92%. Hal ini meningkat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021, yakni sebesar 79,52%. Artinya beberapa kendala dan permasalahan yang pada Tahun 2021 terkait adanya pandemi Covid-19 berhasil ditemukan perbaikan oleh Perangkat Daerah terkait.
6. **Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif**  
Pelayanan kesehatan pada usia produktif tahun 2022 hanya mencapai angka 48%. Hal ini mengalami penurunan yang sangat tajam dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 yang sudah optimal mencapai 100%. Hal tersebut terkendala karena adanya kekhawatiran masyarakat untuk melakukan kontak dan interaksi dengan tenaga kesehatan pasca adanya pandemi Covid-19, sehingga mengurangi antusiasme masyarakat untuk mendapatkan hak layanan kesehatan standar.
7. **Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut**  
Penurunan yang sangat signifikan terjadi pada capaian Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut di tahun 2022 yang hanya mencapai 75%. Sangat jauh dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 yang sudah mencapai angka optimal 100%. Sama halnya dengan layanan

kesehatan standar untuk penduduk usia produktif, capaian pada layanan ini mengalami penurunan karena kendala yang sama.

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Millitus

Pada tahun 2021, capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Millitus di Kabupaten Kudus sudah optimal, mencapai 100%. Tetapi, di tahun 2022 capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Millitus justru mengalami penurunan menjadi 92%.

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Penurunan capaian yang sangat signifikan terjadi pada Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi pada tahun 2022 yang mencapai 52%. Hal ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 yang sudah optimal mencapai 100%. Hal ini dikarenakan adanya kecenderungan penurunan kesadaran masyarakat mengenai layanan standar bagi penderita hipertensi, disamping kemampuan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan yang belum berhasil dalam mengatasi kendala serta permasalahan yang ada.

10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat.

Pelayanan kesehatan untuk orang dengan gangguan jiwa berat pada tahun 2022 mengalami penurunan. Kemampuan Perangkat Daerah dalam mengatasi kendala dan permasalahan pun dianggap menurun. Hal itu ditunjukkan capaian yang menurun signifikan di angka 73%, turun dari capaian 2021 yang mencapai 100%.

11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB.

Pada capaian Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB di tahun 2022 ini mencapai 73%. Hal ini mengalami peningkatan dari capaian pada tahun 2021, yang berada di angka 40,81%. Adanya peningkatan tersebut tidak lepas dari keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mengatasi kendala terkait penjangkaran suspek yang terlalu ketat, misalnya apabila terindikasi batuk kurang dari 2 minggu maka tidak dimasukkan dalam suspek TB, tetapi dilakukan treatment standar layanan Covid-19.

12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko HIV

Pada tahun 2022, capaian pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV mencapai 98%. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 yang sudah optimal mencapai 100%. Hal tersebut disebabkan karena Sasaran penyuluhan dan screening belum terfokus pada kelompok berisiko

#### 4.2.3 Realisasi

Realisasi pemenuhan SPM pada Urusan Kesehatan di Kabupaten Kudus yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.5  
Realisasi Capaian SPM Urusan Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % (15.066)	95 % (14.372)	1 Tahun
2.	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100 % (13.661)	100 % (13.661)	1 Tahun
3.	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % (13.600)	99 % (13.467)	1 Tahun
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 % (68.108)	92 % (62.604)	1 Tahun
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	Persentase usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 % (126.004)	92 % (115.396)	1 Tahun
6.	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 % (576.104)	48 % (276.645)	1 Tahun
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Persentase usia lanjut yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 % (88.188)	75 % (65.868)	1 Tahun
8.	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Millitus	Persentase penderita <i>Diabetes Mellitus</i> yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 % (17.933)	92 % (16.542)	1 Tahun
9.	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 % (231.173)	52 % (120.310)	1 Tahun
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan Jiwa berat	Persentase ODGJ gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 % (2.166)	73 % (1.578)	1 Tahun
11.	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Persentase orang terduga tuberculosus yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100 % (10.995)	73 % (8.017)	1 Tahun
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko HIV	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/ preventif	100 % (18.935)	98 % (18.520)	1 tahun

#### 4.2.4 Alokasi Anggaran

Dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang kesehatan sebagaimana tersebut di atas, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Tabel 4.6  
Alokasi Anggaran

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi	Batas waktu capaian
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2,135,980,750	1,543,963,439	1 tahun
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	593,091,000	373,431,470	1 tahun
3	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	245,246,500	184,296,395	1 tahun
4	Pelayanan kesehatan Balita	1,118,561,600	938,442,770	1 tahun
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	882,249,600	667,418,500	1 tahun
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	58,869,800	45,359,400	1 tahun
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	763,919,325	619,003,325	1 tahun
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	47,425,000	41,898,000	1 tahun
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	269,880,000	191,163,820	1 tahun
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat	59,586,000	41,540,000	1 tahun
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	309,529,995	228,342,750	1 tahun
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	723,356,250	598,579,890	1 tahun

#### 4.2.5 Dukungan Personil

Dukungan personil pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam upaya pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan diantaranya termasuk 326 Dokter, 32 Dokter Spesialis Anak, 847 Bidan, 1.848 Perawat Kesehatan, 62 orang ahli gizi dan 80 orang kader kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kudus.

#### 4.2.6 Permasalahan dan Solusi

##### a) Permasalahan

1. Kegiatan yang bersumber anggaran dari DBHCHT ada penundaan pelaksanaan karena menunggu penetapan DPPA hasil desk/ verifikasi sesuai dengan PMK 215/PMK.07/2021 sehingga baru dapat dilaksanakan mulai Bulan Mei.

2. Terdapat rincian kegiatan yang dianggarkan lebih dari dua sumber dana sehingga tidak bisa direalisasikan dan mempengaruhi dalam pencapaian target realisasi.
  3. Pendapatan yang bersumber dari dana kapitasi dan non kapitasi BLUD tidak tercapai, menyebabkan ada kegiatan belanja barang/jasa dan belanja modal dari tidak bisa terlaksana.
- b) Solusi
- Penjadwalan pelaksanaan kegiatan disusun di awal tahun anggaran sehingga kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan di awal bisa segera dilaksanakan sehingga target pelaksanaan kegiatan per Tri Wulan bisa tercapai

#### 4.3 Urusan Pekerjaan Umum

##### 4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pekerjaan Umum di Kabupaten Kudus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, meliputi Jenis Pelayanan Dasar:

- a. Pemenuhan Kebutuhan air minum curah lintas kabupaten / kota
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota

##### 4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Pelaksanaan target SPM pada Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Kudus yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.7  
Target Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No.	Jenis pelayanan dasar	Indikator pencapaian	Target capaian	waktu
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok	100% (233.543)	Setiap tahun
2.	Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kab	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kab/kota	100% (233.543)	Setiap Tahun

Sebagaimana pada tabel di atas, pemenuhan SPM Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Kudus terdiri atas 2 jenis pelayanan dasar, yaitu Layanan Dasar Pemenuhan Kebutuhan Air Minum sehari-hari dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional.

Pada tahun 2022, capaian layanan Pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari untuk Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok sebanyak 229.472 ribu KK dari jumlah keseluruhan sebesar 233.543 KK atau sekitar 98%, persentase tersebut masih sama dengan capaian pada tahun 2021. Hal tersebut mengindikasikan konsistensi Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Kemudian, untuk capaian layanan Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten di Kabupaten Kudus pada tahun 2022 sudah optimal, yakni 100%. Hal itu menunjukkan penyediaan layanan oleh Pemerintah Daerah terkait pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten sudah baik

#### 4.3.3 Realisasi

Tabel 4.8  
Target Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum

No.	Jenis pelayanan dasar	Indikator pencapaian	Target capaian	Batas waktu capaian	Realisasi capaian
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok	100% (233.543)	Setiap tahun	98 % (229.472)
2.	Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kab	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kab/kota	100% (233.543)	Setiap Tahun	100% (233.543)

#### 4.3.4 Alokasi Anggaran

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum, Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	3,490,099,000	2,758,283,000
2.	Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	20,000,000	

#### 4.3.5 Dukungan Personil

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum sebagaimana tersebut di atas, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan

yang optimal kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum didukung 87 personil.

#### 4.3.6 Permasalahan dan Solusi

##### a) Permasalahan

Terbatasnya fasilitas Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu Domestik sehingga pelayanan pengolahan lumpur tinja di Kabupaten Kudus tidak sebanding dengan jumlah penduduk

##### b) Solusi

- Mengoptimalkan pengolahan lumpur tinja oleh pihak ketiga
- Mengusulkan penganggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi IPLT

#### 4.4 Urusan Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

##### 4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Urusan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kudus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, meliputi Jenis Pelayanan Dasar :

- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana.
- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten.

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah Pelaksanaan target dan realisasi pemenuhan SPM pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Perukiman di Kabupaten Kudus yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.9  
Target SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator	Target capaian	Batas waktu capaian
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100 % (2.352)	Setiap Tahun
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 % (21.417)	Setiap Tahun

Sebagaimana pada tabel di atas, target dan realisasi pemenuhan SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan di Kabupaten Kudus terdiri atas 2 jenis pelayanan dasar, yaitu layanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam dan Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten.

Capaian layanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam dan Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten pada tahun 2022 telah optimal, mencapai 100%. Dengan demikian layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam dan fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten sudah baik. Capaian pada tahun ini sebenarnya sama dengan tahun 2021 lalu, tetapi untuk capaian tahun lalu lebih dikarenakan tidak adanya korban bencana yang perlu layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni

#### 4.4.3 Realisasi

Tabel 4.10  
Realisasi SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator	Target capaian	Batas waktu capaian	Realisasi capaian
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100 % (2.352)	Setiap Tahun	100% (2.352)
2	Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100 % (21.418)	Setiap Tahun	100% (21.418)

#### 4.4.4 Alokasi Anggaran

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Kabupaten menganggarkan alokasi anggaran sebagai bentuk dukungan untuk terlaksananya pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, diantaranya sebagai tabel berikut ini :

Tabel 4.11  
Program dan Kegiatan SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan  
Permukiman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Anggaran	Realisasi
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	53.700.000	53.700.000
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat Progam Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		

#### 4.4.5 Dukungan Personil

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana tersebut di atas, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman didukung 147 personil.

#### 4.4.6 Permasalahan dan Solusi

##### 1. Permasalahan

Usulan perbaikan rumah tidak layak huni, setelah dilakukan verifikasi dan validasi ada yang tidak dapat dikerjakan diantaranya ada penerima yang sudah meninggal dan ada rumah yang sudah menjadi layak huni.

##### 2. Solusi

Tingkatkan koordinasi dengan berbagai pihak sehingga perubahan akan segera terpantau dan dilaporkan.

#### 4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kesehatan

##### 4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Urusan Wajib Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dengan dukungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, meliputi Jenis Pelayanan Dasar :

- a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

- c. Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah  
 Pelaksanaan target dan realisasi pemenuhan SPM pada Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.12  
 Target SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator	Target capaian	Batas waktu capaian
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100% (3)	Setiap Tahun
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100% (140.210)	Setiap Tahun
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	100% (120.424)	Setiap Tahun
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase (%) jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100% (130.384)	Setiap Tahun
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase warga negarayang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100% (66)	Setiap Tahun

Target dan realisasi layanan pemenuhan SPM Urusan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus sebagaimana tabel di atas terdiri atas 5 jenis pelayanan dasar, yaitu Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Informasi Rawan bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiap siagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran.

Pada tahun 2022, capaian 5 Layanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di

Kabupaten Kudus sudah optimal, yakni masing-masing Layanan Dasar telah mencapai 100%. Hal tersebut mengindikasikan penyelenggaraan pelayanan di bidang Trantibumlinmas sudah dilaksanakan secara konsisten oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, dalam hal ini oleh Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk layanan terkait kebencanaan.

#### 4.5.3 Realisasi

Tabel 4.13  
Realisasi SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator	Target capaian	Batas waktu capaian	Realisasi
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100% (3)	Setiap Tahun	100% (3)
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100% (140.210)	Setiap Tahun	100% (140.210)
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	100% (120.424)	Setiap Tahun	100% (120.424)
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase (%) jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100% (130.384)	Setiap Tahun	100% (130.384)
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase warga negarayang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100% (66)	Setiap Tahun	100% (66)

#### 4.5.4 Alokasi Anggaran

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.14  
Alokasi Anggaran SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban dan  
Perlindungan Masyarakat

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator	Anggaran	Realisasi	Ket
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	2,106,577,000	0	APBD
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	92,407,000	92,407,000	APBD
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	686,426,540	686,426,540	
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase (%) jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	200,773,000	190,773,000	
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase warga negarayang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	996.220,000	996.220,000	

#### 4.5.5 Dukungan Personil

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tersebut di atas, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat didukung 147 personil.

#### 4.5.6 Permasalahan dan Solusi

##### a) Permasalahan

Masih belum memadainya dukungan dana operasional, sarana prasarana penunjang kegiatan serta kualitas SDM yang belum mencukupi sehingga pelaksanaan kegiatan belum maksimal..

##### b) Solusi

Penambahan anggaran dan menutup kekurangan personil Satpol PP dari unsur P3K, sedangkan untuk mencapai jumlah PPNS yang ideal, maka dikirimkan anggota untuk mengikuti pelatihan dan bintek PPNS.

## 4.6 Urusan Sosial

### 4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus, meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota

### 4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Pelaksanaan target dan realisasi pemenuhan SPM pada Urusan Sosial di Kabupaten Kudus yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.15  
Pencapaian SPM Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target 2022 %	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 % (343)	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi di luar panti	100 % (38)	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 % (55)	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 % (83)	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	100 % (28.407)	Setiap Tahun

Sebagaimana pada tabel di atas, target dan realisasi pemenuhan SPM Urusan Sosial terdiri dari 5 layanan dasar, yakni Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti, Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial, Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti sosial, Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial, dan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & setelah bencana bagi korban bencana kab/kota.

Capaian 5 Layanan Dasar Urusan Sosial di Kabupaten Kudus pada tahun 2022 sudah optimal, yakni masing-masing Layanan Dasar telah mencapai 100%. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan Perangkat Daerah terkait dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang ada. Dibandingkan dengan hasil layanan SPM pada Tahun 2021, maka capaian tersebut masih sama, dengan demikian konsistensi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan layanan SPM urusan sosial dipandang cukup konsisten

#### 4.6.3 Realisasi

Tabel 4.16  
Pencapaian SPM Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target 2022 %	Batas Waktu Capaian	Realisasi
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 % (343)	Setiap Tahun	100 % (343)
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi di luar panti	100 % (38)	Setiap Tahun	100 % (38)
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 % (55)	Setiap Tahun	100 % (55)
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 % (83)	Setiap Tahun	100 % (83)
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	100 % (28.407)	Setiap Tahun	100 % (28.407)

#### 4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2022 Meliputi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Tabel 4.17  
Pencapaian SPM Sosial

No	Jenis Pelayanan	Indikator SPM	Anggaran	Realisasi	Ket
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	720,881,090	654,605,903	APBD
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi di luar panti			
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial			
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	56,999,030	37,706,000	

#### 4.6.5 Dukungan Personil

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial sebagaimana tersebut di atas, dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial didukung 36 personil

#### 4.6.6 Permasalahan dan Solusi

##### a) Permasalahan

1. Pendataan Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar belum optimal
2. penghitungan kebutuhan belum memenuhi standar SPM
3. belum terpenuhinya pelatihan pemberdayaan disabilitas sesuai kondisi

b) Solusi

- melaksanakan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Masyarakat secara berkala dengan melibatkan BPJS, Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya
- mengusulkan alokasi anggaran untuk pelatihan pemberdayaan disabilitas

4.7 Program dan Kegiatan

Dalam upaya penyelenggaraan pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat di Kabupaten Kudus sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, Pada Tahun Anggaran 2022 lalu Pemerintah Kabupaten Kudus mengalokasikan anggaran Program dan Kegiatan guna pencapaian pelayanan dasar, meliputi :

a. Urusan Pendidikan

Guna pelaksanaan pelayanan SPM pada bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga melalui 3 (tiga) program yang terbagi ke dalam 7 (tujuh) kegiatan.

Tabel Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGAM/ KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan	
		1 Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	
		a Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	130,000,000
		b Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	140,000,000
		c Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	10,000,000
		d Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	1,980,000,000
		2 Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	
		a Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	460,482,447

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGAM/ KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	
2.	Pendidikan Dasar	Program Pengelolaan Pendidikan		
		3	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/ Paket B)	
		a	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	312,000,000
		4	Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	
		a	Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	1,360,000,000
		5	Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	
		a	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	40,000,000
		b	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	25,000,000
		6	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	
		a	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	400,000,000
b	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	5,274,375		
3.	Pendidikan Kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan		
		7	Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan)	
		a	Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	29,999,275

Sebagaimana terlihat dalam tabel, pelaksanaan layanan SPM pada bidang pendidikan dilakukan melalui 3 (tiga) program yang terbagi ke dalam 7 (tujuh) kegiatan

b. Urusan Kesehatan

Guna pelaksanaan pelayanan SPM pada bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Kesehatan melaksanakan 12 (dua belas) sub-kegiatan guna memenuhi kebutuhan pelayanan dasar.

Tabel Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1   Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
		a   Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2,135,980,750
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2   Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
		a   Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	593,091,000
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3   Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
		a   Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	245,246,500
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	4   Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
		a   Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1,118,561,600
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5   Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
		a   Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	882,249,600
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	6   Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
		a   Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	58,869,800
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	7   Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
		a   Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	763,919,325
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8   Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
		a   Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	47,425,000
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	9   Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
		a   Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	269,880,000
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	10   Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	
		a   Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	59,586,000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)
11.	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkolosis	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkolosis	309,529,995
		a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkolosis	
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	723,356,250
		a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	

c. Urusan Pekerjaan Umum

Tabel Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGAM/ KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		3,490,099,000
		1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	
		a	Pelayanan SPAM jaringan perpipaan	
		b	Pelayanan SPAM bukan jaringan perpipaan	
2.	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		20,000,000
		2	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	
		a	Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	
		b	Kualitas pelayanan air limbah domestik	

d. Urusan Perumahan Rakyat

Tabel Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)
		Program Pengembangan Perumahan		53,700,000
1.	Penanganan untuk rumah korban bencana	1	Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	
		a	Pendataan dan verifikasi penerimaan rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten/kota	
2.	Peningkatan mutu pelayanan penyediaan rumah layak huni	Program Pengembangan Perumahan		
		2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	
		a	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	

e. Urusan Trantibumlinmas

Tabel Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Trantibumlinmas Tahun 2022:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum/masyarakat dan penegakan perda/perkada sesuai SOP	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1.400.650.000
		1 Kegiatan Penyelenggaraan ketertiban umum	190.605.000
		2 Kegiatan pelaksanaan operasi dan pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1.210.045.000
2	Penanganan terhadap warga yang terkena dampak penegakan perda dan perkada	Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang trantibum	
		3 Kegiatan Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah ttg trantibum	34.435.000
		4 Kegiatan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang trantibum	100.000.000
3.	Peningkatan pembinaan dan kapasitas anggota Satpol PP, PPNS dan Anggota Satlinmas	5 Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	705.918.000
4.	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Satpol PP dan Satlinmas	6 Kegiatan peningkatan perlindungan masyarakat	86.635.000
5.	Penyediaan dokumen perencanaan penanggulangan bencana		
6.	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana daerah Kab/Kota		
7.	Penanganan tanggap darurat bencana	7 Program Perlindungan Masyarakat dan penanggulangan bahaya kebakaran	1.430.631.000
8.	Penanganan Penyelamatan korban kebakaran	8 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	895.185.000
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		9 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota	
9.	Penanganan evakuasi korban kebakaran	10 Kegiatan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bahaya kebakaran	628.886.000

f. URUSAN SOSIAL

Tabel Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar di luar panti	Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial	
		1 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	
		a Penyediaan permakanan	225,000,000
		b Penyediaan sandang	10,000,000
		c Penyediaan alat bantu	90,890,275
		d Pemberian pelayanan reunifikasi	41,000,000
		e Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	13,999,350
		f Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	234,000,000
		g Pemberian layanan data dan pengaduan	10,000,000
		h Pemberian layanan kedaruratan	85,991,465
		i Pemberian layanan rujukan	10,000,000
2.	Jumlah korban bencana kab/kota yang dilayani	Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial	
		2 Kegiatan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kab/Kota	
		a Penyediaan permakanan	26,999,030
		b Penyediaan sandang	15,000,000
		c Penanganan khusus bagi kelompok rentan	15,000,000

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

Capaian penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dilaporkan secara lengkap dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini. LPPD juga menyampaikan laporan mencakup akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, pelaksanaan tugas pembantuan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan indikator kinerja *outcome* dan *output* yang telah ditentukan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, bahwa Pemerintah Kabupaten Kudus telah melaksanakan seluruh Urusan Wajib Pemerintahan pada Tahun Anggaran 2022 lalu, walaupun dalam pelaksanaannya banyak mengalami kendala terutama berkaitan dengan dampak pandemi Covid-19 yang memaksa Pemerintah Kabupaten Kudus untuk fokus dalam penanganan pandemi agar dampak kepada masyarakat dapat diminimalisir sekecil mungkin.

Untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pilihan, terdapat satu bidang yang tidak dapat dilaksanakan di Kabupaten Kudus yaitu dalam urusan Energi dan Sumber Daya Mineral mengingat kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam urusan tersebut adalah pengelolaan panas bumi, sedangkan di wilayah Kabupaten Kudus selama ini belum ditemukan sumber energi panas bumi.

Secara umum seluruh kewajiban penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, namun demikian masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, LPPD ini dapat menjadi bahan dan materi bagi Pemerintah untuk memberikan evaluasi kebijakan yang bersifat konstruktif dan pembinaan bagi peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus.

Sedangkan dalam implementasi penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Kudus berupaya melaksanakan secara maksimal, dan diharapkan target yang dicapai senantiasa meningkat pada masa-masa mendatang.

LPPD juga memuat laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kudus terhadap masyarakat Kabupaten Kudus dalam pencapaian Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah khususnya pada Tahun 2022 lalu. Dari LPPD ini dapat didapatkan gambaran tingkat pencapaian kinerja Kabupaten yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan. .

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	.....%	22.977	83,89
				Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan		27.391	
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	.....%	84.273	99,29
				Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan		84.873	
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	.....%	39.019	95,61
				Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan		40.810	
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	.....%	1.467	35,86
				Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan		4.091	
		5	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di kabupaten		1.199	0,14
				Jumlah Penduduk kabupaten		867.205	
		6	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan kabupaten yang terakreditasi minimal Tingkat Utama	.....%	5	71,43
				Jumlah RS kabupaten		7	
		7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	.....%	14.809	94,86
				Jumlah ibu hamil di kabupaten		15.612	
		8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	.....%	14.005	100,00
				Jumlah ibu bersalin di kabupaten		14.005	
		9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	.....%	13.720	98,63
				Jumlah bayi baru lahir di kabupaten		13.911	
		10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	.....%	47.381	82,90
Jumlah balita di kabupaten				57.152			
11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	.....%	100.197	79,52		
		Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten		126.004			

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
2	Kesehatan	12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	.....%	262.596	45,64
				Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten		575.338	
		13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	.....%	61.239	68,06
				Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten		89.983	
		14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	.....%	98.452	100,00
				Jumlah penderita hipertensi di kabupaten		98.452	
		15	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	.....%	16.542	92,24
				Jumlah penderita DM di kabupaten		17.933	
		16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	.....%	1.645	100,00
				Jumlah penderita ODGJ di kabupaten		1.645	
		17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	.....%	4.257	40,81
				Jumlah penderita TBC di kabupaten		10.430	
18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	.....%	19.622	100,00		
		Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten		19.622			
		19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan kabupaten (ha)	.....%	35,253	100,00
				Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan kabupaten (ha)		35,253	
		20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan kabupaten (ha)	.....%	Tidak ada wilayah pantai	tidak ada wilayah pantai
				Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten (ha)			

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting	.....%	9.049,40	87,90
				Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten		10.295,40	
		22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten.	.....%	241.506	97,996
				Jumlah total rumah tangga di seluruh kabupaten tersebut.		246.445	
		23	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	.....%	246.445	100,00
				Jumlah rumah di Kabupaten		246.445	
		24	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya	.....%	12257	100,00
				Jumlah IMB yang berlaku		12257	
		25	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten	Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap	.....%	590,30	92,34
				Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten		639,26	
		26	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	.....%	164	47,40
				Jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah kabupaten		346	
				Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	.....%	31	100,00
						jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	
27	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2020	.....%	0	0,00		
		Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2020					

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		
						Elemen data	Capaian Kinerja	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	.....%		0	
				Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan				
		29	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	.....%	136,515	93,89	
				Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha		145,402		
		30	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah kumuh/tidak layak huni	.....%	7.211	2,93	
				Jumlah total unit rumah Kabupaten		246.445		
31	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	.....%	40	100,00			
		Jumlah unit rumah kab/kota		40				
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	32	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang diselesaikan	.....%	894	89,94	
				Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk		994		
		33	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	.....%	55	98,21	
				Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi		56		
		34	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			Orang	136.828	136.828
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			Orang	137.828
		36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			Orang	156.432	156.432
		37	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah	.....%	46	100,00	
				Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten		46		
		38	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran			Menit	13,304	13,304

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
6	Sosial	39	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	.....%	1744	86,81
			gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis		2.009	
		40	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	.....%	31.351	100,00
				Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten		31.351	
7	Tenaga Kerja	41	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	.....%	24	2,61
				Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten		919	
		42	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	.....%	218	0,04
				Jumlah tenaga kerja keseluruhan		501.443	
		43	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)		69.556.930.000.000	13871353274,45
				Jumlah tenaga kerja		501.443	
		44	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	.....%	495	73,12
				Jumlah Perusahaan		677	
		45	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan	.....%	3957	53,04
				Jumlah pencaker yang terdaftar		7460	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	46	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD	.....%	267.035.199.990	27,88
				Jumlah seluruh belanja langsung APBD		957.960.969.844	
		47	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten yang didampingi	.....%	15	0,01
				Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)		241.012	
		48	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	Per 100.000	10	3,15
				Jumlah penduduk perempuan		317.032	

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
9	Pangan	49	Persentase cadangan pangan	Jumlah cadangan pangan kabupaten	.....%	139.723	188,66
				Jumlah kebutuhan pangan kabupaten		74.059	
10	Pertanahan	50	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi	.....%	10,1	100,00
				Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi		10,1	
		51	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu	.....%	0	0
				Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum			
		52	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi	.....%	0	0
				Luas izin lokasi yang diterbitkan			
		53	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah luas Tanah Obyek Landreform (TOL)	.....%	0	0
				Jumlah penerima tanah obyek landreform			
		54	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah	.....%	0	0
				Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan		-	
		55	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	.....%	12	100,00
				Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan		12	
11	Lingkungan Hidup	56	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	.....%		62,60
				Indeks Kualitas Pencemaran Air (30%)	43,8	43,75	
				Indeks Kualitas Pencemaran Udara (30%)	79,63	79,63	
				Indeks Tutupan Hutan/Lahan (40%)	28,22	28,22	
		57	Terlaksananya pengelolaan sampah Regional/Terpadu di wilayah Kabupaten	Total Vol sampah yang dapat ditangani	.....%	121.865,69	77,00
				Total vol timbunan sampah Kabupaten		158.264,91	
		58	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah kabupaten	.....%	3	1,88
				Jumlah Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan		160	

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	59	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman	.....%	637.436	98,97
				Jumlah penduduk wajib KTP-el		644.101	
		60	Persentase anak usia 0- 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	.....%	138.351	60,55
				Jumlah anak usia 0-17 tahun		228.492	
		61	Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran	Jumlah penduduk usia 0 – 18 Tahun tahun yang memiliki akte kelahiran	.....%	249.916	98,16
				Jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun		254.612	
		62	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	.....%	18	54,55
				Jumlah PD		33	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	63	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks	.....%	tidak ada desa tertinggal	tdk ada desa tertinggal
				Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)			
		64	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	.....%	17	29,82
				Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)		57	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	65	TFR (Angka Kelahiran Total)	$5\sum ASFR$			2,10
		66	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern	.....%	105.350	72,62
				Jumlah Pasangan Usia Subur		145.064	
		67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	.....%	20.150	13,89
Jumlah Pasangan Usia Subur				145.064			
15	Perhubungan	68	Rasio konektivitas kabupaten	Rasio konektivitas kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)		0,68	0,68
		69	Kinerja lalu lintas kabupaten	V/C ratio di jalan kabupaten		0,66	0,56
16	Komunikasi dan Informatika	70	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	.....%	33	100,00
				Jumlah PD		33	
		71	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	.....%	52	16,83
				Jumlah Layanan Publik		309	

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
		72	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	.....%	556.987	64,23
				Jumlah penduduk (diatas 17 tahun)		867.205	
17	Koperasi dan UKM	73	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	.....%	85	15,68
				Jumlah seluruh koperasi		542	
		74	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha	.....%	16290	100,00
				Jumlah usaha kecil keseluruhan		16290	
18	Penanaman Modal	75	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	(Jumlah investasi tahun 2022 - jumlah investasi tahun 2021) di kabupaten	.....%	8.709.351.070.000	267,24
				Jumlah investasi tahun 2021 di kabupaten		3.258.977.290.000,00	
19	Kepemudaan dan Olahraga	76	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten	.....%	55	0,03
				Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten		199.892	
		77	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan orgaisasi	.....%	146.273	73,18
				Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten		199.892	
		78	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	Medali	15	15,00
		20	Statistik	79	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	.....%
Jumlah PD						33	
80	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah			Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	.....%	33	100,00
				Jumlah PD		33	
21	Persandian	81	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi		170	26,36
				Jumlah area penilaian		645	
22	Kebudayaan	82	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	.....%	138	35,57
				Jumlah cagar budaya yang terdata		388	
		83	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	.....%		19,60

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
23	Perpustakaan	84	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	.....%		34,09
24	Kearsipan	85	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan	$T = (a + i + s + j)/4$	.....%		84,09
		86	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$	.....%		56,07
<b>Urusan Pilihan</b>							
25	Kelautan Perikanan	87	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP)	Ton	2.702,71	2.702,71
26	Pariwisata	88	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun 2022 – Jumlah wisatawan tahun 2021)	.....%	0	0,00
				Jumlah wisatawan tahun 2022		0	
		89	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	(Jumlah wisatawan tahun 2022 – Jumlah wisatawan tahun 2021)	.....%	66.435	7,49
				Jumlah wisatawan tahun 2022		887.409	
		90	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual	.....%	523	32,93
				Jumlah kamar yang tersedia		1.588	
91	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata (dalam satuan rupiah)	.....%	1.908.161,37	1,23		
		Jumlah total PDRB (dalam satuan rupiah)		108.214.899,14			
92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Realisasi PAD dari Sektor Pariwisata Tahun 2020	.....%	3.618.518.506,00	0,18		
		Realisasi PAD Tahun 2020		1.980.781.072.843,00			
27	Pertanian	93	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun (ton)	ton	161.791	6,66
				Luas Panen (ha)		24.277	
		94	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus hewan menular tahun berjalan (2021) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (2020)	.....%	0	tidak ada kasus

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
				Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun 2020		0	
28	Kehutanan						Tidak Perlu Diisi
29	ESDM	95	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/Kabupaten	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin	.....%	1	100,00
				Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi		1	
30	Perdagangan	96	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	.....%	9934	68,99
				Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten		14400	
		97	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi	.....%	19507,51	86,67
				RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani)		22507	
		98	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan	.....%	11.151	72,88
				Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten		15.300	
31	Perindustrian	99	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten	(Jumlah Industri Kecil dan Menengah tahun 2021 - Jumlah industri Kecil dan Menengah tahun 2020)	.....%	14	0,32
				Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2020		4322	
				Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2019		4336	
		100	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)	Jumlah Target Jenis Industri Prioritas kabupaten yang ditetapkan	.....%		100,00
				Jumlah Realisasi Jenis Industri Prioritas kabupaten			
		101	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	.....%	5	100,00
				Jumlah izin yang dikeluarkan		5	
		102	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	.....%		0,00
				Jumlah izin yang dikeluarkan			

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
		103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	#DIV/0!		0,00
				Jumlah izin yang dikeluarkan			
		104	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	7 Informasi industri secara lengkap dan terkini			50,00
32	Transmigrasi						
33	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)	1	Persentase Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan (realisasi)	.....%	229.049.650.880	12,06
				Jumlah APBD (realisasi)		1.899.820.614.694	
		2	Persentase PAD	Jumlah PAD	.....%	507.167.074.775	0,00
				Jumlah PDRB non migas		#####	
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	level 2	level 3
				Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	level 3	level 3
		5	Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures (realiasi)	.....%	270.147.109.844	14,22
				Jumlah belanja APBD (realisasi)		1.899.820.614.694	
		6	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	WTP		0,00
					WTP		0,00
WTP					0,00		
WTP					0,00		
34	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)	7	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n	.....%	0	0,00
				Jumlah kontrak keseluruhan tahun n		85	
		8	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	.....%	2262	48,06
				Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif		4.707	

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		9	Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan	.....%	926.538.378.125	89,58	
				Total belanja langsung			1.034.324.586.945	
			Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan PDN, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2022 - Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan PDN, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2021			11.845.393.379,67	14,67
				Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan PDN, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2021		80.725.667.672		
35	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)	10	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan Pendidikan Tinggi ke atas (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	.....%	1.749	61,18	
			Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			2.859		
		11	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	.....%	117	4,09	
			Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			2.859		
		12	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	.....%	117	100,00	
			Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			117		
36	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)	13	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi	.....%	1.899.820.614.694	91,47	
			Total belanja APBD dikurangi satu (Sebelum Perubahan)			22.268.883.977.950		
		14	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi	.....%	507.167.074.775	86,20	
			Total PAD dalam APBD dikurangi satu (Sebelum Perubahan)			3.675.043.396.000		
		15	Assets management	Jumlah Asset Manaiemen	Jumlah			0
				Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	ya	ya		KIB A s/d KIB E
				Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	ya	ya		Permendagri No. 47 Tahun 2021
				Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)	ya	ya		Rekon 1 th sekali
				Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	ya	ya		Rekapitulasi Barang ke Neraca
		16	Cash Management: Persentase anggaran	Nilai Realisasi SILPA	.....%		#DIV/0!	

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
		16	sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya (realisasi)			
37	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)	17	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	.....%	2.268.883.977.950	121,16
				Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda		1.872.563.437.018	
		18	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda	.....%	3	18,75
				Total jumlah dokumen yang telah dirinci		16	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
<b>PENDIDIKAN PAUD</b>							
		1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)		Unit	392	392
		2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	0	0
		3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	359	359
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)		Orang	1.733	1.733
		5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)		Orang	1.730	1.730
		6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini,		Orang	1066	1066
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	342	342
<b>PENDIDIKAN DASAR</b>							
		1	Jumlah SD Negeri Terakreditasi		Unit	420	420
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	0	0
		3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah		Orang	0	0
		4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	31.861	31.861
		5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	10.982	10.982
		6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	3.581	3.581
		7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	1.539	1.539
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar		Orang	3.374	3.374
		9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	1.125	1.125
		10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	848	848
		11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	236	236

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
		12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	803	803
		13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	288	288
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Orang	1700	1700
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Orang	771	771
		16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	386	386
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	42	42
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Orang	346	346
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Orang	204	204
<b>PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA</b>							
		1	Jumlah SMP Negeri Terakreditasi		Unit	50	50
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	47.562	47.562
		3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	19.026	19.026
		4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	31.861	31.861
		5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	10.983	10.983
		6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	3.581	3.581

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
1	Pendidikan	7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	1.538	1.538
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar		Orang	3.374	3.374
		9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	1.398	1.398
		10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	848	848
		11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	236	236
		12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	803	803
		13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	347	347
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Orang	1700	1700
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Orang	771	771
		16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	386	386
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	38	38
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Orang	346	346
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Orang	282	282

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		
						Elemen data	Capaian Kinerja	
			<b>PENDIDIKAN KESETARAAN</b>					
		1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan		Orang	12	12	
		2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	0	0	
		3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	0	0	
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		Orang	223	223	
		5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		Orang	380	380	
		6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)		Orang	201	201	
		7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	0	0	
		8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1		Orang	16	16	
			<b>Rasio daya tampung rumah sakit rujukan</b>					
		1	Jumlah RS Rujukan kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar		Unit	16	16	
		1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya		Unit	16	16	
			<b>Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil</b>					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			15.066	15.066	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal		Orang	1.205	1.205	
			<b>Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan</b>					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			13.661	13.661	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan,persalinan sesuai standar		Orang	3.115	3.115	
			<b>Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir</b>					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			13.600	13.600	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Dokter :326, Dokter spesialis 32, Bidan 847, Perawat 1848, Nutrisionis 62	Orang	3.115	3.115	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD			
						Elemen data	Capaian Kinerja		
2	Kesehatan	<b>Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar</b>							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia				68.108	68.108	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai	Dokter :326, Bidan 847, Perawat 1848, Nutrisionis 62			3.083	3.083	
		<b>Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</b>							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia				125.543	125.543	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Dokter :326, Bidan 847, Perawat 1848, Nutrisionis 62, tenaga kesehatan masyarakat 80		Orang	3.163	3.163	
		<b>Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</b>							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia				576.104	576.104	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokter :326, Bidan 847, Perawat 1848, Nutrisionis 62, tenaga kesehatan masyarakat 80		Orang	3.163	3.163	
		<b>Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</b>							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia				88.188	88.188	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokter :326, Bidan 847, Perawat 1848, Nutrisionis 62, tenaga kesehatan masyarakat 80		Orang	3.163	3.163	
		<b>Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</b>							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia				231.173	231.173	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokter :326, Bidan 847, Perawat 1848, Nutrisionis 62, tenaga kesehatan masyarakat 80		Orang	3.163	3.163	
		<b>Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</b>							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia				17.933	17.933	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokter :326, Bidan 847, Perawat 1848, Nutrisionis 62, tenaga kesehatan masyarakat 80		Orang	3.163	3.163	
		<b>Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar</b>							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia				2.166	2.166	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokter :326, Perawat 1848		Orang	2.174	2.174	
		<b>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar</b>							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia				10.995	10.995	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokter :326, Perawat 1848, Analis Tehnik Laboratorium Medik (ATLM) 121, tenaga kesehatan masyarakat 13, radiographer penata rontgen) 50		Orang	2.358	2.358	
		<b>Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar</b>							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia				18.935	18.935	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokter :326, Bidan 847, Perawat 1848, ATLM 121, tenaga kesehatan masyarakat 80		Orang	3.222	3.222	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
<b>Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir</b>							
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kota (ha)		Ha	638,88	638,88
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kota (m)		M	17.702,00	17.702,00
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS		Ha	Nihil	Nihil
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kota (m)		M	Tidak ada wilayah pantai	Tidak ada wilayah pantai
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kota		Ada/Tidak	Tidak ada	Tidak ada
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kota		Ada/Tidak	ada	ada
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kota		Jumlah	Tidak ada	Tidak ada
<b>Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kota/Kota</b>							
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kota (ha)		Ha	Tidak ada	Tidak ada
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kota (m)		M	Tidak ada	Tidak ada
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kota (ha)		Ha	Tidak ada	Tidak ada
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kota (m)		M	Tidak ada	Tidak ada
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kota		Ada/Tidak	Tidak ada	Tidak ada
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air		Ada/Tidak	Tidak ada	Tidak ada
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kota		Jumlah	Tidak ada	Tidak ada
<b>Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi</b>							
		1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m)	%	157,5	90,02
				Panjang jaringan irigasi primer (m)		175	
		2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi Sekunder dalam kondisi baik (m)	%	256.089,80	90,02
				Panjang jaringan irigasi Sekunder (m)		284.481	
		3	Persentase panjang jaringan irigasi Tersier dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi Tersier dalam kondisi baik (m)	%	17.958,99	90,02
				Panjang jaringan irigasi Tersier (m)		19.950	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
<b>Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota</b>							
		1	Pemenuhan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) lintas kota		Ada/Tidak	1 Dokumen	1 Dokumen
		2	Tersusun dan ditetapkannya Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) kota		Ada/Tidak	1 Dokumen	1 Dokumen
		3	Jumlah BUMD dan atau UPTD kota		BUMD/UPTD	Tidak ada	Tidak ada
		4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM		Izin	Tidak ada	Tidak ada
		5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah		Kerjasama	Tidak ada	Tidak ada
<b>Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik</b>							
		1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan		Rumah	2.056	2.056
		2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T		Rumah	1.356	1.356
		3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T		Rumah	3.812	3.812
		4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		Rumah	32	32
		5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur		Rumah	32	32
		6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik		Rumah	1356	1356
		7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik	%	2456	30,57
				rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun <25 jiwa/ha		8034	
		8	Kinerja penyediaan pelayanan IPLT akses aman	rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	%	0,03	0,03
				rumah di wilayah pengembangan IPLT			
		9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di SPALD T	%	1356	23,66
				rumah di wilayah pengembangan SPALD T		5731	
		10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat	%	1356	23,66
				jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S		5731	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD			
						Elemen data	Capaian Kinerja		
		11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	jumlah sarana pengangkutan yang tersedia	%	1	33,33		
				jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota		3			
		12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia	%	25	11,53		
				jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota		216,8			
		13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD	%	284877	100,00		
				jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota		284877			
		14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot	%	34	0,42		
				jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPADLD-S		8.034			
		<b>Rasio kepatuhan IMB kab/ kota</b>							
		1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Jumlah bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana yang laik fungsi yang berlaku	%	3743	100		
				Jumlah bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana		3743			
		2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/kota dalam tahun eksisting		Izin	12.736	12.736		
		3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Perda No. 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung	Ada/Tidak	ada	ada		
		4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang	Keputusan Bupati Kudus No. 600/226/2021 tentang Pembentu	Ada/Tidak	ada	ada		
5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Keputusan Bupati Kudus No. 432/159/2020 tentang Penetapan Rumah Kapal	Bangunan	1	1				
6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kota		Bangunan	0	0				
7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah kota		Bangunan	3.743	3.743				
8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kota yang dipelihara/dirawat		Bangunan	173	173				

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD			
						Elemen data	Capaian Kinerja		
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<b>Rasio kemantapan jalan</b>							
		1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kota		M	639.262	639.262		
		2	Panjang jalan yang dibangun		M	Tidak ada	Tidak ada		
		3	Panjang jembatan yg dibangun		M	12	12		
		4	Panjang jalan yang ditingkatkan		M	8.785,16	8.785,16		
		5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan		M	93	93		
		6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi		M	21.417,86	21.417,86		
		7	Panjang jembatan yang direhabilitasi		M	Tidak ada	Tidak ada		
		8	Panjang jalan yang dipelihara		M	8.395	8.395		
		9	Panjang jembatan yang dipelihara		M	235	235		
		<b>Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli</b>							
		1	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kota		Orang	0	0		
		2	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kota		Orang	164	164		
		3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kota		Orang	164	164		
		4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kota yang aktif dengan data termutakhir		Ada/Tidak	-	-		
		5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar		Ada/Tidak	Tidak ada	Tidak ada		
		6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota yang bersumber dari APBN		Ada/Tidak	Tidak ada	Tidak ada		
		7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota yang bersumber dari pendanaan lainnya		Ada/Tidak	Tidak ada	Tidak ada		
		8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala		Ada/Tidak	Tidak ada	Tidak ada		
		9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kota		Ada/Tidak	Tidak ada	Tidak ada		
10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.		Ada/Tidak	Tidak ada	Tidak ada				

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
		11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis		Ada/Tidak	Tidak ada	Tidak ada
		12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota		Ada/Tidak	Tidak ada	Tidak ada
		13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kota		Ada/Tidak	Tidak ada	Tidak ada
		14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		Ada/Tidak	Tidak ada	Tidak ada
		15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada/Tidak	Tidak ada	Tidak ada
		16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada/Tidak	Tidak ada	Tidak ada
		17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada/Tidak	ada	ada
		18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota		Badan Usaha	78	78
		19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kota		Badan Usaha	Tidak ada	Tidak ada
		20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/kota		Badan Usaha	Tidak ada	Tidak ada
		21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/kota		Badan Usaha	Tidak ada	Tidak ada
		22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		izin	Tidak ada	Tidak ada
		23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Pengawasan	Tidak ada	Tidak ada
		24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Kecelakaan Konstruksi	Tidak ada	Tidak ada

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
		25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Pengawasan	Tidak ada	Tidak ada
<b>Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota</b>							
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		Unit	22.433	22.433
		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam		Unit	2.352	2.352
		3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		Orang	2.613	2.613
		4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		Unit	NIHIL	NIHIL
		5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		Unit	Nihil	Nihil
		6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi		Unit	NIHIL	NIHIL
		7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban		Unit	99	99
		8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi		Orang	NIHIL	NIHIL
		9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan		Ha	NIHIL	NIHIL
<b>Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota</b>							
		1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT	NIHIL	0
		2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT	NIHIL	0
		3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT	NIHIL	0
		4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT	NIHIL	0
		5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT	NIHIL	0
		6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah		Ha	NIHIL	0

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
<b>Persentase Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani</b>							
		1	Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh < 10 Ha		Ha	8,589	8,589
		2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		Unit	437	437
		3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh		Ha	136,814	136,814
<b>Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)</b>							
		1	Jumlah rumah di kab/kota		Rumah	246.714	0
		2	Jumlah unit PK RTLH		Rumah	437	318
		3	Jumlah rumah tidak layak huni		Rumah	6.774	7.211
		4	Jumlah rumah yang tidak dihuni		Rumah	270,96	12322
		5	Rasio rumah dan KK	Jumlah KK	%	284.877	1,14
				Jumlah total unit rumah		246.714	
		6	Jumlah rumah pembangunan baru			269	123
<b>Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)</b>							
		1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU		Perumahan	40	40
		2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum		Rumah	98	98
		3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan		Rumah	246.714	246.714
		4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi(on site / off site)		Rumah	100	100
		5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH		Perumahan	9	9
		6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU		Rumah	246.714	246.714
		7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi		Pengemban	20	20
		8	Jumlah pengembang yang terregistrasi		Pengemban	20	20
		9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan		Pengemban	0	0
<b>Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan</b>							
		1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/kota yang		Jumlah	1942	1942
		2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan		Orang	4.137	4.137
		3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan		Perda&Perk	56	56
		4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS		Orang	4	4
		5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum		Orang	10	10
		6	Tersedianya sarana prasarana minimal		SOP	1	1

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		
						Elemen data	Capaian Kinerja	
5	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<b>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</b>						
		1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan	%		100	
		2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana Seluruh penduduk di kawasan rawan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%		100,00	
		<b>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>						
		1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan	%		100	
		2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah	%		100	
		3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah aparatur dan warga negarayang ikut pelatihan Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan	%		1,07	
		4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	%		1,92	
		5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	%		10,97	
		6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	%		100,00	
		<b>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>						
		1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB Jumlah seluruh penetapan status KLB	%		100,00	
		2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana	%		0,00	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
		3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	%		100,00
				Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat			
		4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi	%		100,00
				Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana			
<b>Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</b>							
		1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kota		Layanan	46	46
		2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan		Pos	Nihil	Nihil
		3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan		Orang	Nihil	Nihil
		4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa		Pos	Nihil	Nihil
		5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi		Sarpras	3	3
		6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur		Orang	32	32
		7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran		Orang	103	103
		8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran		Kegiatan	2	2
<b>Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</b>							
		1	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan Yang Dimiliki		layanan	4	4
		2	Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Untuk Masuk Dalam Data Terpadu FM dan OTM		orang	2009	2009
		3	Jumlah Tim Reaksi Cepat Yang Dibentuk		tim	1	1
		4	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Dijangkau		orang	1744	1744
		5	Jumlah Kendaraan Roda Empat yang Akses Khusus Layanan Kedaruratan yang Dimiliki		unit	1 unit mobil rescue	1 unit mobil rescue

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD			
						Elemen data	Capaian Kinerja		
6	Sosial	6	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Trelantar dan Gepeng Yang Menerima Paket Permakanan Sesuai Standar Gizi		Orang	413	413		
		7	Jumlah Rumah Singgah/Shelter/ Tempat Tinggal Sementara yang Dimiliki Sesuai Standar		unit	1	1		
		8	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Trelantar dan Gepeng Yang Menerima Paket Sandang		Orang	20	20		
		9	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Trelantar dan Gepeng Yang Memanfaatkan Alat Bantu		Orang	37	37		
		10	Jumlah Alat Bantu Yang Tersedia di Rumah Singgah/ Shelter		unit	1 kursi roda 2 kruk	1 kursi roda 2 kruk		
		11	Jumlah Paket Perbekalan Kesehatan Yang Tersedia		Paket	-	-		
		12	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Trelantar dan Gepeng Yang Memanfaatkan Paket Perbekalan Kesehatan		Orang	-	-		
		13	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Disediakan di Rumah Singgah			-	-		
		14	Jumlah Pekerja Sosial Profesional dan/atau TKS dan/atau Relawan Sosial yang Disediakan		Orang	1	1		
		15	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Trelantar dan Gepeng Yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial Sesuai Standar di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial		Orang	1744	1744		
		16	Jumlah Bimbingan Sosial Yang Dilaksanakan Kepada Keluarga dan Masyarakat			1 bl 1 kali	1 bl 1 kali		
		17	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Trelantar dan Gepeng Yang Difasilitasi Untuk Mendapatkan Dokumen Kependudukan		orang	39	39		
		18	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Trelantar dan Gepeng Yang Mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		orang	44	44		
		19	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Trelantar dan Gepeng Yang Mendapatkan Layanan Penelusuran Keluarga		orang	9	9		
		20	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Trelantar dan Gepeng Yang Direunifikasi Dengan Keluarga		Orang	9	9		
		21	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Trelantar dan Gepeng Yang Dirujuk		Orang	49	49		
		<b>Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten</b>							
				1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan		Orang	14.554	14.554
				2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang		Orang	431	431

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
		3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki		Penampungan	132 desa/kel	132 desa/kel
		4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan		Paket	230	230
		5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan		Orang	4034	4034
		6	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia		Orang	33	33
7	Tenaga Kerja	<b>Persentase kota/kota yang menyusun rencana tenaga kerja</b>					
		1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kota		Ada/Tidak	ada	ada
		2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja		%	99,91	99,91
		3	Jumlah perusahaan yang Menyusun rencana tenaga kerja		Perusahaan	3	3
		<b>Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi</b>					
		1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNI atau keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi	%	12 56	21,43
		2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun 2022 jumlah instruktur seluruhnya pada tahun 2022	%	70 88	79,55
		3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah instruktur pada tahun 2022 jumlah peserta pelatihan pada tahun 2022	%	88 2960	2,97
		4	Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun 2022 jumlah seluruh LPK pada tahun 202	%	0 62	0,00
		5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun 2022 jumlah LPK yang terdata pada tahun 2022	%	32 62	51,61
		6	Jumah penganggur yang dilatih		Orang	2704	
		7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun 2022	%	2960 2960	100,00
		8	Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun 2022 jumlah lulusan pada tahun 2020	%	1212 2960	40,95
		9	Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat Kompetensi Jumlah lulusan bersertifikat Kompetensi pada tahun 2020	%	67 2960	2,26
		10	Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang	$\sum$ CPMI dilatih $\sum$ CPMI terdaftar	%	0 358	0,00
		11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia	0	pelatihan	0	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
<b>Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja</b>							
1		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Jumlah perusahaan yang menerapkan program jumlah perusahaan pada tahun 2020		%	0 1107	0,00
2		Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi dikurangi				
<b>Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)</b>							
1		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun 2020 Jumlah perusahaan yg memiliki tenaga kerja 10 orang		%	157 250	62,80
2		Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun Jumlah perusahaan yg memiliki Serikat Pekerja/Serikat		%	85 84	101,19
3		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan			SP/SB	Konfederasi SPISB : 1 Federasi SPISB : 12 SPISB diluar perusahaan : 109 Anggota SPISB di	Konfederasi SPISB : 1 Federasi SPISB : 12 SPISB diluar perusahaan : 109 Anggota SPISB di
4		Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (dalam PP atau PKB)		%	223 241	92,53
5		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor		%	704 1107	63,60
6		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan yang berselisih Jumlah perusahaan pada tahun 2020		%	9 1107	0,81
7		Jumlah Mogok Kerja			Mogok	0	0
8		Jumlah Penutupa Perusahaan			Perusahaan	0	0
9		Jumlah Perselisihan Kepentingan			Perselisihan	0	0
10		Jumlah Perselisihan antar Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1			Perselisihan	0	0
11		Jumlah Perselisihan PHK			Perselisihan	10	10
12		Jumlah Pekerja / Buruh yang Ter-PHK			Perselisihan	16	16
13		Jumlah Perselisihan yang Diselesaikan Melalui Perundingan Bipartite			Perselisihan	4	4
14		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten/ Kota yang Diberdayakan			LKS	1	1
15		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah Perjanjian Bersama Jumlah kasus perselisihan		%	4 16	25,00

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
<b>Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kota/kota dalam 1 (satu) daerah kota</b>							
		1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kab		Lowongan	3.509	3.509
		2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota		Orang	67.709	67.709
		3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab		BKK	23	23
		4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kota		Orang	0	0
		5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja		Orang	5	5
		6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab		Lembaga	0	0
		7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab		Perjanjian	13	13
		8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)		orang	3195	3195
		9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi		Orang	358	358
		10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata		Orang	358	358
		11	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Yang Mendapatkan Fasilitas Kepulangan	$\sum$ fasilitasi PMI yang dipulangkan	%		0
				$\sum$ PMI yang pulang			
		12	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Kerja	$\sum$ PMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	%		77,09
				$\sum$ PMI/TKI			
		13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	$\sum$ PMI/atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan	%	0	0,00
				$\sum$ PMI/TKI purna dan keluarganya		0	
		14	Jumlah Layanan Terpadu satu Atap (LTSA) Yang Dibentuk (layanan TKI / PMI)	$\sum$ LTSA yang terbentuk	%	0	0,00
				Jumlah daerah kantong PMI/TKI		0	
<b>Persentase ARG pada belanja langsung APBD</b>							
		1	Jumlah Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Kab Yang Telah Dilatih PUG		Lembaga	34 OPD 27 Desa	34 OPD 27 Desa
		2	Jumlah Program PUG di Pemda yang Sudah Dievaluasi Melalui Analisis Gender Tingkat Kab		Prog/Keg	24	24
<b>Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten</b>							
		1	Jumlah Media Massa Yang Pernah Berkerjasama Untuk Melakukan "KIE" Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak		Media Massa	2	2
		2	Jumlah Lembaga Layanan Anak Yang Telah Memiliki SPM		Lembaga	6	6

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		
						Elemen data	Capaian Kinerja	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3	Persentase Korban Kekerasan Anak Yang Terlayani	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani jumlah korban kekerasan anak di tingkat kota	%		#DIV/0!	
		4	Jumlah Lembaga Layanan Anak Yang Mendapatkan Pelatihan		lembaga	6	6	
		5	Jumlah Lembaga Layanan Anak Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan/ Fasilitas Oleh Pemkab/Kota (APBD Kab)		Lembaga	-	2	
		<b>Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 anak</b>						
		1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten yang mendapatkan pelatihan		orang	1	1	
		2	Jumlah kader perempuan tingkat kota yang sudah dilatih		Orang	7	7	
		3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	(JPPA)	Lembaga	1	1	
		4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan	(JPPA dan forum Anak)	Lembaga	2 JPPA dan forum anak	2 JPPA dan forum anak	
		5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	(JPPA)	Kebijakan/ Program	tdk ada	tdk ada	
		6	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi		Lembaga	1 (JPPA)	1 (JPPA)	
7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan	%					
<b>Persentase Cadangan Pangan</b>								
9	Pangan	1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak gudang cadangan pangan dan sarana pendukung lainnya	Ada/Tidak	ada	18	
		2	Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/Tidak	ada	25.250	
		3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	Ada/Tidak	tidak ada	Tidak ada	
		4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat	Ada/Tidak	ada	Tidak ada	
		5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/Tidak	ada	Ada	
		6	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	Ada/Tidak	ada	18	
		7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/Tidak	ada	Tidak ada	
		8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	Ada/Tidak	ada	10	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
10	Pertanahan	<b>Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan</b>					
		1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses ditolak seluruhnya Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun	%	10	100,00
		2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilih tanah kelebihan maksimumabsentee Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek	%	tidak ada	tidak ada
		3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilih tanah kelebihan maksimum/absentee Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum	%	tidak ada	tidak ada
		4	Dokumen Izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang diproses penerbitannya Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun	%	tidak ada	tidak ada
		5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah kabupatten	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun	%	tidak ada	tidak ada
		<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kota</b>					
		1	Hasil Perhitungan kota terhadap :				62,6
			a) Indeks Kualitas Air,(IKA)				43,75
			b) Indeks Kualitas Udara (IKU)				79,63
	c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)						
<b>Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kota</b>							
1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten	Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan	% m3 %		58,23 69.200 0,03		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD			
						Elemen data	Capaian Kinerja		
11	Lingkungan Hidup	<b>Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kota</b>							
		1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten	Izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab jumlah usulan permohonan yang teregistrasi	%		92,86		
		2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten	Jumlah PPLHD yang ada Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah kab	%		0,00		
		3	Penetapan Hak MHA Terkait Dengan PPLH Yang Berada di Daerah Kabupaten	Jumlah MHA (masyarakat hukum adat) yg diakui dgn perda Jumlah usulan MHA	%		0		
		4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah Masyarakat Hukum Adat yg mendapatkan pelatihan Jumlah Masyarakat Hukum Adat yg ada	%		0		
		5	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yg diberikan diklat/rencana target lembaga kemasyarakatan yg akan diberikan diklat	%		100,00		
		6	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten yang ditangani	Pengaduan masyarakat yang ditangani Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	%				
		<b>Perekaman KTP Elektronik</b>							
		12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	1	Penerbitan akta perkawinan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan Peristiwa perkawinan yang diterbitkan	%		147,25
				2	Penerbitan akta perceraian	Jumlah akta Percerian yang diterbitkan Peristiwa Perceraian yang diterbitkan	%		200,00
3	Penerbitan akta kematian			Jumlah akta kematian yang diterbitkan Peristiwa kematian yang diterbitkan	%		100,00		
4	Penyajian data kependudukan			Jumlah penyajian data kependudukan skalakabupaten dalam satu tahun 2 tahun	%		0,00		
<b>Persentase Pengentasan Desa Tertinggal</b>									
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama		Desa	-			
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun		Desa	-	tidak ada desa tertinggal		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		
						Elemen data	Capaian Kinerja	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		Lembaga	-		
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		Desa	-		
		<b>Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri</b>						
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama		Desa	109	109	
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		Desa	5	5	
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Posyandu : 132, PKK : 132, LPMD : 123, RT/RW : 716/3785, Karang Taruna ; 132	Lembaga	5719	5719	
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	BUMDes : 80 BUMDesMA ; 2	Desa	80	80	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<b>TFR</b>						
		1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-		Ada/Tidak		Tidak ada	
		2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.	Nilai Tengah		25-49	
		3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		orang		766	
		4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK advokasi dan KIE Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK advokasi dan KIE	%		#DIV/0!	
		5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan KKBPK		Stakeholder		7	
		<b>Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)</b>						
		1	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP Jumlah faskes	%		#DIV/0!	
		2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Peserta KB Aktif Jumlah PUS	%		#DIV/0!	
		3	Pemerintah Daerah yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif		kampung KB			

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern)	%		#DIV/0!	
				jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan				
		<b>Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)</b>						
		1	Persentase kesertaan KB di kab dengan kesertaan rendah	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu kabupaten	%		#DIV/0!	
				Jumlah desa/kelurahan dalam kabupaten				
		2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	jumlah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI	%		#DIV/0!	
Jumlah Keluarga PBI								
15	Perhubungan	<b>Rasio konektivitas kota</b>						
		1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia	%	4	200,00	
				Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan		2		
		2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun	%	15.171	198,31	
				Jumlah kendaraan wajib uji		7.650		
		3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam	Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan	%	42.800	3292,31	
				Jumlah lintas penyeberangan dalam kabupaten		13		
		3	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota atau	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kabupaten	%	390	78,31	
				Target kebutuhan perlengkapan jalan kabupaten		498		
		<b>V/C Ratio di Jalan kota</b>						
		1	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota atau	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kabupaten	%	390	78,31	
				Target kebutuhan perlengkapan jalan kabupaten		498		
<b>: Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo</b>								
1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	34	100,00			
		Jumlah Perangkat Daerah		34				
2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan dinas kominfo	%	34	100,00			
		Jumlah Perangkat Daerah		34				

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		
						Elemen data	Capaian Kinerja	
16	Komunikasi dan Informatika	3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah		Ada/Tidak	ada		
		<b>Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi</b>						
		1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	Jumlah kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah @yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015)	%	46	20,63	
				Jumlah Kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah		223		
		2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	%	25	73,53	
				Jumlah Perangkat Daerah		34		
		3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	344	1011,76	
				Jumlah Perangkat Daerah		34		
		4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	%	138	64,49	
				Jumlah layanan		214		
		5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layanan SPBE layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang memanfaatkan sertifikat elektronik	%	16	11,59	
				Jumlah layanan		138		
		6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	%	39	34,21	
				Jumlah sistem elektronik		114		
		7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	%	50	43,86	
		Jumlah layanan publik dan layanan administrasi		114				
8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	%	34	100,00			
		Jumlah perangkat daerah		34				

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD			
						Elemen data	Capaian Kinerja		
		9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat	%	34	100,00		
				Jumlah perangkat daerah				34	
		10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya	%	34	100,00		
				Jumlah perangkat daerah				34	
		11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai	%	36	100,00		
				Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah				36	
		12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	%	26	76,47		
				Jumlah perangkat daerah				34	
		13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfo	%	8	100,00		
				Jumlah ASN Pengelola TIK				8	
		14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government			Ada/tidak	ada		
		<b>Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah kota</b>							
		1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota	$\Sigma$ komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah kabupaten yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah	%	4	100,00		
				$\Sigma$ komunitas masyarakat atau Mitra Komunikasi Pemerintah kabupaten				4	
2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	%	210	100,00				
		$\Sigma$ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten				210			
3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Diseminasi dan layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP	%	54	100,00				
		$\Sigma$ Diseminasi dan layanan informasi Publik				54			

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
<b>Meningkatnya Koperasi yang berkualitas</b>							
		1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kota	Jumlah penerbitan izin usaha simpanpinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam	%	0 85	0,00
		2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	%	1 1	100,00
		3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi Jumlah koperasi yang ada	%	150 543	27,62
		4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada	%	7 85	8,24
		5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Jumlah koperasi yang ada	%	82 543	15,10
		6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian Jumlah anggota koperasi yang ada	%	135 122969	0,11
		7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Jumlah koperasi yang ada	%	61 543	11,23
		8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan			0	
		9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasinya Jumlah koperasi yang ada	%	25 543	4,60
		10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan Jumlah koperasi yang ada	%	46 543	8,47
		11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran Jumlah koperasi yang ada	%	0 543	0,00

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD			
						Elemen data	Capaian Kinerja		
17	Koperasi dan UKM	12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha	%	118	21,73		
				Jumlah koperasi yang ada		543			
		13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kota dalam 1 (satu) daerah kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan	%	0	0,00		
				Jumlah koperasi yang ada		543			
		<b>Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha</b>							
		1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru	%	102	0,62		
				Jumlah wirausaha yang ada		16392			
		2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS)	%	0	0,00		
				Jumlah usaha mikro yang ada		16392			
		3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Jumlah usaha mikro yang bermitra	%	248	1,51		
				Jumlah usaha mikro yang ada		16392			
		4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi	%	80	0,49		
				Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi		16312			
		5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	305	1,90		
				Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran		16087			
6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	708	4,32				
		Jumlah usaha mikro yang ada		16392					
7	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan	%	424	2,59				
		Jumlah usaha mikro yang ada		16392					
<b>Persentase peningkatan investasi di kota</b>									
		1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kota	3 fasilitas	Ada/Tidak	ada	ada		
		2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif		Ada/Tidak	Tidak ada	Tidak ada		
		3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian	tahun 2021 baru dilaksanakan	Jumlah Laporan	0	0		
		4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one		Jumlah Kegiatan	2	2		
		5	Kegiatan pameran penanaman modal		Jumlah Kegiatan	0	0		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		
						Elemen data	Capaian Kinerja	
18	Penanaman Modal	6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal		Jumlah Kegiatan	0	0	
		7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal		Jumlah	1.702	1.702	
		8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal		Jumlah Perizinan	6645	6645	
		9	Laporan realisasi penanaman modal		Jumlah Realisasi	1.086.472.800.000	1.086.472.800.000	
		10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kota serta kota	ASN 21 org, PHD 1 org	Jumlah Realisasi	22	22	
		11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	270 perusahaan	Jumlah	270	270	
		12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten	umlah permintaan data dan informasi yg terpenuhi jml permintaan data dan informasi yg diterima	Ada/Tidak	8	8	
19	Pemuda dan Olahraga	<b>Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri</b>						
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan		Orang	74	74	
		2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan		Orang	0	0	
		<b>Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan</b>						
		1	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda		Orang	200	200	
		2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi		Orang	100	100	
		<b>Peningkatan Prestasi Olahraga</b>						
		1	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan		Orang	161	161	
2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah		Event	25	25			
20	Statistik	<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</b>						
		1	Tersedianya buku profil daerah		Ada/tidak	ada	ada	
		2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan		Jumlah Survey	7	7	
		3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		Jumlah	8	8	
		4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS		Jumlah Survey	2	2	
		5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr		Jumlah	1	1	
		6	Persentase kelengkapan metadada kegiatan statistik sektoral	Jumlah metadada kegiatan statistik sektoral		%	10	66,67
				Jumlah kegiatan statistik sektoral			15	
7	Persentase kelengkapan metadada indikator sektoral	Jumlah metadada indikator statistik sektoral		%	558	100,00		
		jumlah indikator statistik sektoral			558			
		<b>Tingkat keamanan informasi pemerintah</b>						
		1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan	Jumlah kegiatan strategis teramankan	%	0	0,00	
				Jumlah kegiatan strategis yang ada			0	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
21	Persandian	2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen	Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian	%	58	50,88
				Jumlah SE yang ada		114	
		3	Persentase sistem elektronik/ aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko	%	0	#DIV/0!
				Jumlah SE yang ada		0	
		4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS)	Jumlah titik teramankan	%	16	47,06
				Jumlah titik pada PHKS		34	
<b>Terlestarikannya Cagar Budaya</b>							
22	Kebudayaan	1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan)	inventaris = 85 publikasi = 29	Obyek	115	115
		2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	penyebarluasan = 29 pengkajian = 8 penayaan keberagaman = 6	Obyek	48	48
		3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	membangun karakter bangsa = 63 meningkatkan ketahanan budaya = 17 meningkatkan kesejahteraan masy = 12	Obyek	92	92
		4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)		Orang	0	0
		5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)		Cagar Budaya	25	25
		6	Perlindungan cagar budaya kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)		Cagar Budaya	222	222
		7	Layanan perizinan membawa cagar budaya kabupaten ke luar kabupaten dengan dukungan data		Cagar Budaya	0	0
		8	Pengembangan cagar budaya kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi),		Cagar Budaya	2	2
		9	Pemanfaatan cagar budaya kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)		Cagar Budaya	2	2
		10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		Koleksi	224	224
		11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan		Orang	75415	75415
		12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana				
		13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya		Tim	1	1

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
		14	Pembentukan tim ahli cagar budaya kota		Tim	1	1
		15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya		Tim	5	5
		16	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman		Orang	41	41
		17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman		Orang	9	9
		18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan		Unit	12	12
		19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat		Kegiatan	26	26
		<b>Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat</b>					
23	Perpustakaan	1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar)	%	1.578.751	182,05
				Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)		867.205	
		2	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite	%	122.726	14,15
				Jumlah penduduk di wilayahnya		867.205	
		3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya	%	495	0,06
				Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)		867.205	
		4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	28	5,66
				Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya		495	
		5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat		kali	160	160
				<b>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat</b>			
		1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya		Naskah Kuno	1	1
		2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa		Naskah Kuno		
		3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di		Budaya Etnis	116 buku	116 buku
		<b>Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43</b>					
		1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	1.303	100,00
				Jumlah seluruh arsip aktif		1.303	
		2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	751	100,00
				Jumlah seluruh arsip inaktif		751	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		
						Elemen data	Capaian Kinerja	
24	Kearsipan	3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu	%	52	19,33	
				Jumlah seluruh arsip Statis		269		
		4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	%	78	4,96	
				Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan kabupaten		1572		
		<b>Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat</b>						
		1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK		Jumlah Arsip	0	0	
		2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat		Jumlah Arsip	0	0	
		3	Penyelamatan arsip perangkat daerah kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kota yang sesuai NSPK di kota		Jumlah Arsip	0	0	
		4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kota yang sesuai NSPK		Jumlah Arsip	0	0	
		5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai		Jumlah Arsip	0	0	
6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kota yang sesuai NSPK		Jumlah Arsip	0	0			
<b>Urusan Pilihan</b>								
25	Kelautan Perikanan	<b>Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)</b>						
		1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)		orang	560	560	
		2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi minimal 3 (tiga) standar operasional	%	0	0	
				Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah kabupaten		0	0	
		3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kota/ kota yang diterbitkan		Izin	0	0	
		4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)		Pembudidaya	170	170	
5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi		Benih	118.080.000	118.080.000			
		<b>Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan</b>						
		1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi			66	48	
		2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas			679	591	
		3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kota		TDUP	15	15	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
26	Pariwisata	4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		orang	11	0
		5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri		Kegiatan	9	3
		6	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		orang	11	0
		7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri		Industri	2	2
		8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi	%	227	10,47
				Jumlah tenaga kerja pariwisata		2169	
		9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan	%	200	71,43
				Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan		280	
		10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan	28 desa wisata	Lokasi	28	11
		27	Pertanian	<b>Produktivitas pertanian per hektar per tahun</b>			
1	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan			Irigasi tersier: 17 paket, jaringan tk usaha tani: 2 paket, Irigasi air tanah dangkal : 2 unit, Jalan usaha tani : 41 paket, embung : 1paket, cultivator : 5 unit, hand traktor : 2 unit, cobine : 5unit	Unit	75	41
2	Prasaran pertanian yang digunakan					75	41
3	Penerbitan izin usaha pertanian				Dokumen	97	52
4	Persentase Prasarana pertanian yang digunakan			Jumlah prasarana yang aktif digunakan	%	75	100,00
				Jumlah prasarana yang dibangun		75	
5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kabupaten			Jumlah usulan yang difasilitasi	%	97	100,00
		Jumlah usulan usaha pertanian		97			
28	Kehutanan	1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan		Dokumen		
		2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga				
		3	Pemulihan ekosistem pada Tahura				
		4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA				
		<b>Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kota</b>					
29	ESDM	1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota		ada/tidak		
		<b>Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)</b>					
		1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan	jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan <= 5 hari kerja	%	0	0
jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar				0			

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
30	Perdagangan		b. Toko swalayan	jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan <= 5 hari kerja	%	1	0
				jumlah permohonan izintoko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar		1	
		2	presentas epenerbitan TDG	Jumlah penerbitan TDG ≤5 hari kerja	%	11	100,00
				Jumlah permohonan penerbitan TDG		12	
		3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	Jumlah penerbitan TDG		33	93,00
				Jumlah gudang yang ada di Kab kota		318	
		4a	a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	%	0	0,00
				Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri		0	
		4b	b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan@waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	%	0	0,00
				Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri		0	
		4c	c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba	%	0	0,00
				Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan		0	
		5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/kota	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat kabupaten	%	0	0,00
				Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer		0	
		6	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	Jumlah SKA yang terbit ≤1 hari kerja 1 x 24 jam	%		0
				Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar		0	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
		7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a + b) \times 100\%$ K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)	%	0	100,00
		8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu		%		87,00
		1	Jumlah penanganan pengaduan konsumen		Pengaduan		0,00
		2	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang tereduksi		Konsumen		0,00
<b>Persentase kinerja realisasi pupuk</b>							
		1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$X = a/(b \times c) \times 100\%$ X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan a = Jumlah pupuk yang disalurkan b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat kota sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)		21595,477 / 22368	86,67
<b>Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku</b>							
		1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan	%		72,88
				Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kab			
		2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku	%		100,00
				Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan			
<b>Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kota</b>							
		1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kota	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	%	0	0,00
				Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk			
<b>Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP</b>							
		1	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda		%	0	0

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
31	Perindustrian	<b>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil yang dikeluarkan oleh instansi terkait</b>					
		1	Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) kecil yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	%	38	0,00
				Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk		38	
		<b>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri kecil yang dikeluarkan oleh instansi terkait</b>					
		1	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPIU) bagi industri kecil yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	%	0	0
				Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk		0	
		<b>Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini</b>					
		1	Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri di kota	Jumlah data perusahaan industri kecil dan perusahaan kawasan industri di kab di SIINas	%	152	3,49
				Total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri di kab		4352	
		31	Transmigrasi	1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi		Kawasan
2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang				Permukiman		
3	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang				Permukiman		